

**ANALISIS KONSISTENSI  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2018**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



**OLEH :**

**NAMA : MUHAMAD FAISAL HARAHAAP  
NOMOR MAHASISWA : 147120173  
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
BKU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2018**

**ANALISIS KONSISTENSI PERANCANAAN DAN  
PENGANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SIAK TAHUN 2018**

**TESIS**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Oleh :

**MUHAMAD FAISAL HARAHAP  
147120173**

**TIM PENGUJI**

**Ketua**

  
**Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si**

**Sekretaris**

  
**Drs. Parjiana, M. Si**

**Anggota**

  
**Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec**

**Anggota**

  
**Indra Safri, S.Sos. M. Si**

**Mengetahui  
Direktur Program Pasca Sarjana  
Universitas Islam Riau**



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**

**ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018**

---

Oleh :

Nama : Muhamad Faisal Harahap

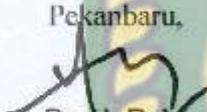
NPM : 147120173

Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah diperiksa dan disetujui Oleh Dosen Pembimbing

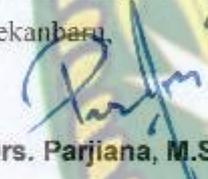
Pembimbing I

Pekanbaru,

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II

Pekanbaru,

  
Drs. Parjiana, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik  
Pascasarjana Universitas Islam Riau

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian komprehensif Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Faisal Harahap  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 07 Oktober, 1983  
NPM : 147120173  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)  
Judul Tesis : Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Siak Sri Indrapura, 17 Desember 2018  
Pelaku Pernyataan



Muhamad Faisal Harahap



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 106/UIR/KPTS/PS-IA/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

### DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor : 85/M/1999
    - b. Nomor : 102/M/2001
    - c. Nomor : 228/M/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/O/2001
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
    - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
    - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
    - c. Nomor : 156/D/T/2007
    - d. Nomor : 2/Dik/KeP/1991
    - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
    - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
    - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
  6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
    - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-IV/1993
    - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
  8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Drs. Parjana, M.Si	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD FAISAL HARAHAP
N P M	: 147120173
Program Studi	: Ilmu Administrasi
Judul Tesis	: "ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018".
  2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usuf dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 11 Oktober 2018

Direktor

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.  
NPK 92 11 02 199

Dokumen ini adalah Aasip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada OPD Sekretariat Daerah tahun 2018 di Kabupaten Siak yang dilihat melalui dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD tahun 2016-2021, Renstra Sekretariat Daerah tahun 2016-2021, Renja Sekretariat Daerah tahun 2018, RKPD tahun 2018, PPAS Sekretariat Daerah tahun 2018 dan DPA Sekretariat Daerah tahun 2018. Hasil analisa tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran untuk melihat sejauh mana tingkat konsistensi yang terjadi dan melalui wawancara dianalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan inkonsistensi serta upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya inkonsistensi pernyataan tujuan dan sasaran pada Renstra, terkait program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran cukup konsisten, terkait indikator kinerja dinilai masih kurang konsisten, terkait alokasi anggaran pada dokumen penganggaran termasuk kurang konsisten.

Ketidakkonsistenan ini terjadi karena kurangnya komitmen OPD, keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan sistem perencanaan dan penganggaran, kurangnya perhatian terhadap konsistensi indikator kinerja dan kurangnya komitmen bersama.

Kata kunci:

Konsistensi, perencanaan, penganggaran, pemerintah daerah

## ABSTRACT

This study aim to analyze consistency between planning and budgeting document in Regional Secretariat years 2018 in the Siak district, it's seen through the planning and budgeting documents like RPJMD years 2016-2021, Renstra Regional Secretariat years 2016-2021, Renja Regional Secretariat years 2018, PPAS Regional Secretariat years 2018 and DPA Regional Secretariat years 2018. The results of the analysis continuously was analyzed by using Matrik of planning and budgeting consolidation to look at the level of consistency that occur. and using interview analyzed what kind of factors which caused inconsistency and what kind of effort to create consistency between planning and budgeting.

The results of this study show that occur the inconsistency of aims and targets at Renstra, related program and activity planning and budgeting is fairly consistently, related performance indicator is less consistent, related budget allocation an budgeting document is include less consistent.

This inconsistency occurs because of less commitment OPD, human recources limitedness, lack of planning and budgeting system, lack of attention about consistency performance indicator and lack of together commitment.

Key words

consistency, planning, budgeting, local government

## KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr.Wb

Alhamdulillah, atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan Tesis yang berjudul "**Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018**" ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister strata dua pada Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap bab per bab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembar ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah (alm), Ibu, Abang, Istri dan anak karena telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu;

2. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin;
3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin;
4. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.si yang turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi;
5. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar, meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
6. Drs. Parjiana, M.Si selaku pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan meberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
8. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini;

9. Bapak Drs. H. Wan Muhamad Yunus, MT selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak beserta jajarannya;
10. Bapak Drs. Yan Prana Jaya, M.Si selaku Kepala Badan Keuangan Daerah beserta jajarannya;
11. Saudara Rafi dan Gusti serta teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik angkatan XII terkhusus kelas B, dan adik-adik tingkat yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillaitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 15 Desember 2018  
Penulis,

Muhamad Faisal Harahap

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Perencanaan .....	11
2.2 Penganggaran .....	17
2.3 Hubungan Perencanaan dan Penganggaran .....	21
2.4 Kualitas Perencanaan Pembangunan .....	23
2.5 Koordinasi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan .....	28
2.6 Konsep Medium Term Expenditure Framework (MTEF)	30
2.6.1 Karakteristik Konsistensi Perencanaan dan	

	Penganggaran.....	30
2.6.2	Konsolidasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.....	35
2.7	Kerangka pemikiran.....	39
2.8	Hipotesis.....	40
2.9	Hasil Penelitian Terdahulu.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Lokasi Penelitian.....	46
3.3	Populasi dan Sampel.....	47
3.4	Teknik Penarikan Sampel.....	48
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	48
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.7	Teknik Analisa Data.....	51
3.8	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	52
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>		
4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Siak.....	53
4.2	Kondisi Geografis Kabupaten Siak.....	54
4.3	Visi dan Misi Kabupaten Siak.....	56
4.4	Rencana Strategis Sekretariat Daerah.....	57

4.5	Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah.....	57
4.6	Fungsi dan Tugas Sekretariat Daerah.....	59
4.7	Sumber Daya Sekretariat Daerah.....	60
4.8	Struktur Sekretariat Daerah.....	60

**BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

5.1	Analisis Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan.....	63
5.1.1	Konsistensi Dokumen Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021 Dengan RPJMD Kabupaten Siak 2016- 2021.....	63
5.1.2	Analisis Konsistensi RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2018.....	75
5.1.3	Analisis Konsistensi RKPD 2018 dan Renja Sekretariat Daerah.....	77
5.2	Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran.....	100
5.2.1	Analisis Konsistensi Renja dengan PPAS.....	100
5.2.2	Analisis Konsistensi RKPD dan DPA Sekretariat Daerah 2018.....	117
5.3	Analisis Konsistensi Antar Dokumen Penganggaran PPAS dan DPA.....	126
5.4	Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara. ....	157

5.4.1	Proses Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah.....	157
5.4.2	Kelemahan Proses Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah.....	159
5.4.3	Upaya Mewujudkan Konsistensi Perencanaan dan penganggaran.....	161
5.5	Pembahasan Kaitan Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah.....	163

**BAB VI PENUTUP**

6.1	Kesimpulan.....	171
6.2	Saran.....	174

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
2.1	Perbandingan Unsur Perangkat Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.....	11
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	45
3.2	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
5.1	Matriks Konsolidasi Program dan Indikator Kinerja Program antara RENSTRA dengan RPJMD.....	63
5.2	Matriks Konsolidasi Tujuan Program antara RENSTRA dengan RPJMD.....	68
5.3	Matriks Konsolidasi Sasaran Program RENSTRA dengan RPJMD....	71
5.4	Matriks Konsolidasi Program antara RPJMD dengan RKPD Sekretariat Daerah 2018.....	75
5.5	Matriks Konsolidasi Program/Kegiatan antara RKPD dengan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2018 .....	77
5.6	Matriks Konsolidasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan antara RKPD dan RENJA.....	83
5.7	Matriks Konsolidasi Program/Kegiatan antara RENJA Sekretariat Daerah dan PPAS Tahun 2018.....	100
5.8	Matriks konsolidasi Indikator Kinerja kegiatan Renja dan PPAS .....	106
5.9	Matriks Konsolidasi Program/Kegiatan RKPD dan DPA.....	117
5.10	Matriks konsolidasi Program Kegiatan PPAS dengan DPA Sekretariat Daerah 2018.....	126
5.11	Matriks Konsolidasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan PPAS dan DPA Sekretariat Daerah tahun 2018.....	135
5.12	Matriks Konsolidasi pagu Program/Kegiatan PPAS dan DPA.....	147

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Keterkaitan antara Perencanaan dan Anggaran.....	23
2.2	Kerangka Berpikir Penelitian.....	40
4.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Siak.....	55
5.1	Diagram keterkaitan antara program RPJMD dengan program RENSTRA .....	66
5.2	Diagram keterkaitan antara indikator kinerja RPJMD dengan indikator kinerja RENSTRA.....	67
5.3	Diagram Keterkaitan antara Program RPJMD dan Program RKPD.....	76
5.4	Diagram Keterkaitan antara kegiatan RKPD dan Kegiatan RENJA.....	81
5.5	Diagram Keterkaitan indikator kinerja program pada kegiatan RKPD dengan indikator kinerja Program pada kegiatan RENJA..	97
5.6	Diagram Keterkaitan Indikator Kinerja Kegiatan RKPD Dengan Indikator Kinerja Kegiatan RENJA.....	99
5.7	Diagram keterkaitan Kegiatan Renja dan PPAS.....	104
5.8	Diagram keterkaitan indikator kinerja Renja dan Indikator kinerja PPAS.....	116
5.9	Diagram keterkaitan antara Program RKPD dan DPA.....	124
5.10	Diagram kesesuaian Kegiatan RKPD dan DPA.....	125
5.11	Diagram keterkaitan antara Program PPAS dan DPA.....	132
5.12	Diagram keterkaitan antara Kegiatan PPAS dan DPA.....	133
5.13	Diagram keterkaitan indikator kinerja PPAS dan Indikator kinerja DPA.....	145
5.14	Diagram keterkaitan indikator kinerja Kegiatan dalam PPAS dan DPA.....	146

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 menjelaskan bahwa dalam mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan reformasi birokrasi diseluruh Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus melaksanakan reformasi birokrasi.(Presiden Republik Indonesia, 2010).

Reformasi birokrasi adalah upaya mendasar untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dampak perubahannya adalah kepada struktur dan sistem yang ada di dalam birokrasi tersebut. Sistem adalah kaitan antar unsur atau elemen yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sedangkan struktur berkaitan dengan tatanan secara teratur. Perubahannya mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, organisasi maupun lingkungannya. Oleh karena itu, reformasi birokrasi mengikat terhadap sistem dan struktur yang ada dalam birokrasi untuk melakukan berbagai perubahan secara komprehensif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan menuju tatanan yang lebih baik (Hayat, 2016).

Hasil yang diharapkan dari reformasi pelayanan publik ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkelas dunia. Beberapa contoh reformasi birokrasi yang berada dalam area pelayanan publik misalnya reformasi pelayanan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, perencanaan dan penganggaran, keimigrasian, kepabeanaan, perpajakan, pertanahan, penanaman modal dan sistem informasi dengan melakukan pengembangan dengan mudah melalui sistem secara online dan pembuatan sistem agar pengelolaan data pada basis data menjadi lebih mudah (Kastanti et al., 2015).

Menilik hal di atas, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) reformasi birokrasi perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat yang mana salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah perencanaan dan penganggaran.

Sekretariat Daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang tugas pokok penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan administrasi dan tatalaksana, dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang tata pemerintahan, ekonomi pembangunan, dan administrasi daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Siak merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai harapan akan memposisikan diri

dalam peran dan kedudukan sebagai Pelayan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Harapan ini lahir dan berkembang sejalan dengan semakin kritisnya tuntutan publik akan kualitas pelayanan dan pesatnya kemajuan teknologi berbagai bidang. Untuk itulah diperlukan perubahan-perubahan yang signifikan yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional serta Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarnya.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran. Namun hingga saat ini proses penyusunan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai harapan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh para perencana setiap tahun diantaranya adalah sulitnya sinkronisasi dan koordinasi antar unit serta waktu perencanaan yang terkesan singkat atau tergesa-gesa.

Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian. Konsistensi

perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pentingnya peranan perencanaan pembangunan menjadi bagian tak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program dan kegiatan yang secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati bersama. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan (Wrihatnolo, 2006).

Perencanaan pembangunan daerah baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan akan tinggal sebagai dokumen yang sia-sia jika tidak dikaitkan dengan penganggarnya. Karena anggaran merupakan bagian yang sangat penting untuk merealisasikan rencana dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun disisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien dengan kata lain agar sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya benar-benar tercapai sesuai dengan target. Oleh karena itu hubungan fungsi perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang sangat penting.

Pada prinsipnya perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain. Hal ini dikarenakan penganggaran adalah media untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan. Tanpa perencanaan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cenderung tidak fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara pada inefektifitas dan inkonsistensi.

Isu pembangunan mengenai inkonsistensi dan ketidaksinkronan dokumen perencanaan dan penganggaran telah terjadi sejak lama. Pada saat rapat terbatas tentang rancangan Instruksi Presiden (Inpres), Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak mau mengulang tradisi lama, yakni perencanaan dan penganggaran yang seringkali mengalami ketidaksinkronan dan inkonsistensi sehingga tujuan pembangunan tidak tercapai ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id), 2016).

Sinkronisasi, konsistensi dan integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran harus mulai ditingkatkan. Pemerintah baik pusat maupun daerah haruslah memiliki komitmen untuk melakukan sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran supaya sasaran pembangunan dapat tercapai.

Fenomena yang sering terjadi di daerah, khususnya Kabupaten Siak yaitu masih kurangnya pemahaman dari Organisasi Perangkat Daerah, sehingga menyebabkan sering terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan sering tidak

tercapainya sasaran pembangunan dan akhirnya pembangunan menjadi tidak terarah / tidak fokus.

Berdasarkan hasil survey di lapangan, peneliti menemukan gejala antara lain :

1. Adanya pengaruh politik dalam perencanaan daerah.
2. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran membutuhkan proses yang cukup panjang.
3. OPD sering terlambat dan tidak lengkap dalam menyampaikan data/informasi terkait dokumen perencanaan kepada BAPPEDA.
4. Pelaksanaan Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten terlalu singkat sedangkan bahan yang harus dibahas cukup banyak.
5. Perencanaan yang disusun cenderung berupa kegiatan rutinitas dan perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya memperhatikan dokumen perencanaan yang telah dibuat serta lebih berorientasi kepada anggaran, belum kepada kinerja/manfaat.
6. Belum berjalannya evaluasi kinerja dan penganggaran secara efektif.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita – cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dalam landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa antara perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi dan sinkron satu sama lain. Dengan kata lain perencanaan yang telah disusun harus didukung oleh penganggaran dan begitu juga dalam penyusunan anggaran harus konsisten dan sinkron dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pernyataan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Perencanaan dan penganggaran di tingkat OPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran daerah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis konsistensi antar Dokumen Perencanaan pada Sekretariat Daerah.
2. Menganalisis konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
3. Menganalisis konsistensi antar Dokumen Penganggaran pada Sekretariat Daerah.
4. Menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini dapat sebagai pedoman dan masukan untuk perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Daerah khususnya dan Pemerintah Kabupaten Siak pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai konsistensi perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

#### DAN HIPOTESA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa didasarkan dan taat kepada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dijelaskan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan dibantu oleh perangkat daerah".

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh unsur pemerintahan daerah, yakni kepala daerah dan lembaga DPRD yang berada pada posisi sejajar, sehingga disebut unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kedua unsur pemerintahan daerah ini dibantu oleh perangkat daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah; "Kepala Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Dalam hal kedudukan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan dari unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (pemberian kewenangan atau urusan dari pemerintah kepala daerah), atau Kepala Daerah pada dasarnya memimpin dan melaksanakan kewenangan bidang eksekutif pada pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Keberadaan dari unsur perangkat daerah telah diakui dalam sistem pemerintahan daerah, unsur perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten Siak telah mengacu pada pasal 209 Undang-Undang 23 Tahun 2014, yakni Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan.

Menurut Rahyunir Rauf (2016), bahwa ada perbedaan antara unsur perangkat daerah pada UU nomor 23 tahun 2014 dengan unsur perangkat daerah yang ada pada UU nomor 32 tahun 2004. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Perbandingan Unsur Perangkat Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

NO.	Unsur Perangkat Daerah Provinsi Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014	Unsur Perangkat Daerah Provinsi Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat	Dinas Daerah
4	Dinas	Lembaga Teknis Daerah
5	Badan	
NO.	Unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014	Unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat	Dinas Daerah
4	Dinas	Lembaga Teknis Daerah
5	Badan	Kecamatan
6	Kecamatan	Kelurahan

Sumber: Rahyunir Rauf (2016)

## 2.1 Perencanaan

Definisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian

dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efesiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Tjokroamidojo (2003), yang selengkapnya sebagai berikut: Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tersebut.

Menurut Munir (2002) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

1. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

3. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Rencana Pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,

responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

George R Terry (1960), mengatakan bahwa perencanaan adalah memilih, dan berhubungan dengan fakta dan pembuatan serta menggunakan asumsi mengenai masa depan dalam visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan, diyakini, diperlukan, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di pihak lain, D. Conyers dan Hill (1984) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang kontiniu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Dan Jhingan (2000), dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara, mengatakan bahwa perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Arti atau definisi perencanaan yang dikemukakan oleh UU RI No 25 tahun 2004 ini, seperti terbaca di atas, tidak berbeda jauh dari perencanaan-perencanaan yang dikemukakan oleh Terry, Conveys dan Hill maupun Jhingan, yang

berbeda hanya susunan kata dan keringkasannya. UU RI No, 25 tahun 2004 memberikan definisi perencanaan yang lebih ringkas dibandingkan dengan yang dikemukakan para pakar tadi (Terry, Conveys dan Gill serta Jingham).

Perencanaan yang dimaksud oleh UU RI Nomor 25 tahun 2004, sesuai dengan namanya Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah perencanaan pembangunan nasional di Indonesia (yang juga harus diacu oleh daerah-daerah ketika merumuskan perencanaan pembangunan di daerahnya). Perencanaan ini mencakup makro maupun mikro dan perencanaan ini mempunyai tujuan untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mempertahankan stabilitas harga, menyediakan peluang kerja yang besar bagi rakyat, meratakan hasil pembangunan, dan meniadakan kemiskinan; sehingga pada akhirnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia akan menjadi lebih baik.

Dari semua ini maka dapatlah disimpulkan bahwa perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah hasil upaya dari pengelola (perusahaan atau negara atau organisasi lainnya) memutuskan strategi serta tindakan apa yang harus dilakukan di masa datang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Keputusan atas strategi dan kegiatan itu tidak ditentukan sembarangan melainkan setelah menganalisis kenyataan-kenyataan masa kini dan perkiraannya di masa datang. Cara menganalisis kenyataan-kenyataan masa kini dan perkiraan masa mendatang itu

menggunakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan rasional serta menggunakan asumsi yang relevan.

Perencanaan juga merupakan suatu proses pemilihan dan pemikiran yang menghubungkan fakta-fakta berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menguraikan bagaimana pencapaiannya.

Berdasarkan aktor yang melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan, Innes (2000) membedakannya dalam beberapa model yaitu:

#### 1. Technical Bureaucratic Planning

Perencanaan ini berbasis kepada penilaian birokrasi atas alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta proyeksi, untuk membuat suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan berdasarkan informasi dan penilaian atas dampak politik dan perubahan yang dikehendaki.

#### 2. Political Influence Planning

Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan daerah atau anggota legislatif yang terpilih. Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari masing-masing kontituennya.

### 3. Social Movement Planning

Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.

### 4. Collaborative Planning

Dalam model ini setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi dan tujuannya, menyampaikan kepentingannya untuk diketahui bersama, mengembangkan saling pengertian atas masalah dan perjanjian yang mereka butuhkan, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang diperjanjikan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## 2.2 Penganggaran

Menurut Abdullah (1995) anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif (uang) yang disusun dalam secara sistematis dalam perkiraan pendapatan, belanja (dan pembiayaan), sedangkan Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Bastian (2001) mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja yang akan berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta

sebagai alat pengendalian. Tahap-tahap penyusunan anggaran meliputi (Kepmendagri 29/2002): (1) Penyusunan anggaran satuan kerja berdasarkan usulan program/kegiatan, (2) Penyusunan rancangan APBD, (3) Pengajuan rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, (4) Penetapan APBD.

Penganggaran adalah serangkaian tindakan organisasi dalam jangka waktu yang relatif pendek (biasanya 1 tahun) untuk menentukan: (i) sasaran apa yang terlebih dahulu ingin dicapai –dari sejumlah sasaran yang diperlukan untuk menggapai tujuan organisasi; (ii) kegiatan apa yang mesti dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut; (iii) siapa yang harus melaksanakan kegiatan tersebut; dan (iv) berapa banyak sumberdaya - kesemuanya dinyatakan dalam nilai uang untuk bisa mendukung kegiatan tersebut.

Dalam sejarahnya, setidaknya dikenal empat sistem penganggaran untuk organisasi pemerintah, yakni :

1. Tradisional atau line items budgeting system

Titik berat pada sistem ini terletak pada segi pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Dari segi pelaksanaan, yang dipentingkan adalah pembelanjaan pengeluaran negara oleh lembaga diharapkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku namun kurang memperhatikan hasil akhir dari pembelanjaan pengeluaran negara. Sedangkan dari pengawasannya yang dipentingkan adalah kesahihan

bukti transaksi dan kewajaran laporan. Bentuk laporan lebih mengutamakan realisasi anggaran dan cenderung mengabaikan prestasi yang dicapai dibalik penggunaan anggaran.

## 2. Penganggaran kinerja atau performance budgeting system

Titik berat pada sistem anggaran kinerja terletak pada segi manajemen anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan keuangan pelaksanaan anggaran, maupun hasil fisik yang dicapainya.

Anggaran berbasis Kinerja (Performance budgeting) didasarkan pada hasil proses perencanaan yang realistis dan sistimatis. Proses perencanaan tersebut menjamin adanya kesinambungan dan konsistensi antara masalah; tujuan; kegiatan; output atau kinerja kegiatan; dan input yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ciri lain dari anggaran berbasis kinerja adalah keseimbangan antara anggaran untuk kegiatan pelayanan langsung dengan kegiatan penunjang.

Pada dasarnya anggaran berbasis kinerja adalah bagaimana menghitung dan mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup dan tepat sehingga kegiatan tersebut bisa terlaksana, sehingga tujuan yang ditargetkan dapat tercapai.

## 3. Perencanaan, pemrograman dan penganggaran (PPBS) atau *planning, programming and budgeting system*

Perhatian pada sistem ini tidak lagi terletak pada segi pengendalian anggaran, melainkan pada segi persiapan anggaran. Dalam tahap persiapan ini semua implikasi positif dan negatif dari setiap keputusan

yang telah dan atau akan diambil, dipertimbangkan secara matang. Sehingga diharapkan rencana serta program yang disusun, benar-benar merupakan rencana dan program yang paling baik.

Sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran (PPBS) lebih jauh lagi kehendaknya daripada penganggaran kinerja. Di sini bukan hanya kaitan antara sumberdaya yang digunakan dengan keluaran yang dihasilkan yang dipertanyakan, tetapi juga dipertanyakan perihal apakah keluaran tadi akan sejalan dengan pencaian tujuan di masa datang. Jadi, persoalan efektivitas jangka panjang dari penggunaan sumberdaya dipersoalkan. PPBS berangkat dari pemikiran bahwa sumberdaya yang dimiliki organisasi (pemerintah) itu terbatas, jadi setiap penggunaannya harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan tujuan tercapai.

Dengan perkataan lain bahwa setiap penggunaan sumberdaya harus memberikan manfaat yang besar kepada organisasi (masyarakat keseluruhan).

Pada PPBS, umumnya perencanaan tersusun dalam sejumlah program, selanjutnya program-program ini terpilah dalam beberapa kegiatan. Analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) pada system ini biasanya digunakan untuk menilai kelayakan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut.

Banyak program dan kegiatan memiliki jangka waktu penyelesaian lebih dari satu tahun. Karena itu tidak jarang pembuatan rencana program dan anggaran juga lebih dari satu tahun (multi years). Permasalahan tidak

akan muncul jika pelaksana program atau kegiatan bersikap jujur. Bila pada satu tahun anggaran tertentu bisa terjadi kelebihan sumberdaya (anggaran), atas upaya efisiensi, kelebihan itu dilaporkan saat pertanggung jawabannya. Namun sering terjadi pelaksana program atau proyek tidak jujur, peluang kelebihan anggaran tadi sengaja ditiadakan.

#### 4. Dasar nol atau zero base budgeting.

Pada sistem penganggaran ini setiap pelaksana program maupun proyek mesti membuat rencana untuk tahun yang bersangkutan, meski program dan proyek tadi nantinya akan memakan waktu lebih dari satu tahun. Untuk tahun berikutnya setiap pelaksana program atau proyek harus membuat rencana lagi yang baru untuk tahun berikut tersebut. Artinya setiap tahun, meski pelaksanaan program atau proyek sudah merupakan tahun ke-n, seolah membuat perencanaan dari awal kembali.

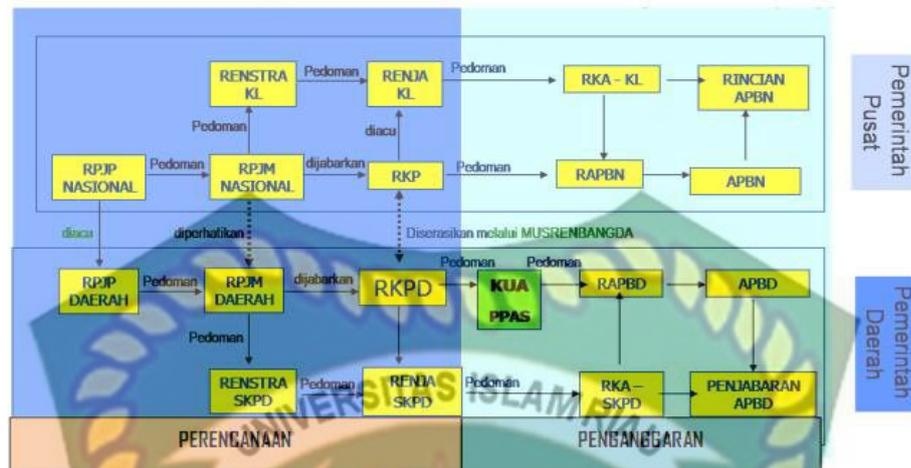
### 2.3 Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Adanya keterkaitan antara anggaran dengan perencanaan tentu sangat penting. Anggaran merupakan sebuah upaya untuk merealisasikan tujuan jangka panjang dengan menghasilkan keluaran-keluaran yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan jangka panjang tadi. Anggaran merupakan media alokasi sumberdaya dalam jangka pendek, media memilih tindakan yang tepat di dalam jangka pendek, media untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan alokasi sumberdaya dan

pelaksanaan tindakan dalam jangka pendek. Muara semuanya haruslah tujuan yang hendak dicapai dalam jangka panjang.

Caiden dan Wildavsky (1974) dalam bukunya *Planning and Budgeting in Poor Countries* mengatakan bahwa di samping pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional tergantung pada kemampuan para perencana untuk merumuskan strategi, tindakan dan kebijakan yang diperlukan juga tergantung pada seberapa jauh sumberdaya yang ada diarahkan dan digunakan secara efisien dan efektif melalui anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Atas dasar tersebut untuk menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah diatur hirarki perencanaan dimaksud. Berikut di bawah ini adalah ilustrasi keterkaitan antara perencanaan (pembangunan) dengan anggaran (pemerintah).



**Gambar 2.1 Keterkaitan antara perencanaan dengan Anggaran**

Dari gambar 2.1 dapat dikemukakan bahwa Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

## 2.4 Kualitas Perencanaan Pembangunan

Beberapa definisi yang dikutip oleh Yamit (2001) yaitu: (a) Kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen (W Edwards Dening). (b) Kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan (Philip B Crosby), (c) Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi (Joseph M Juran).

Garvin (1994) yang dikutip Yamit (2001), tujuan mengidentifikasi lima pendekatan perspektif kualitas yaitu: (a) Transcendental Approach, adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. (b) Product Based Approach, adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur, (c) User Based Approach, adalah kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera (fitness for used) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. (d) Manufacturing Based Approach, adalah bersifat supply based atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur.

Untuk mengukur kualitas rencana, Keban (2001) memberikan pernyataannya sebagai berikut: "Isi, proses dan konteks merupakan parameter yang sering digunakan untuk mengukur kualitas suatu rencana strategis. Suatu rencana dapat dianggap berkualitas baik apabila isi dari dokumen tersebut menggambarkan aspirasi dan kehendak para stakeholders nya, kualitas dokumen itu juga dapat dinilai dari proses yang ditempuh atau metode yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada".

Menurut Solihin (2008), perencanaan yang ideal harus memenuhi: (a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya, (b) prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap;

tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran, (c) prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan, (d) mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system), (e) terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Lebih lanjut Solihin (2008), syarat perencanaan harus: (a) faktual dan realistis, yang mengacu kepada dinamika yang ada (b) logis dan rasional, yaitu perencanaan yang masuk akal dan dapat dimengerti, (c) fleksibel, yaitu rencana yang luwes dengan memperhatikan kendala dan limitasi lingkungan sosial maupun fisik, (d) objektif, yaitu memenuhi komitmen terhadap kepentingan umum (e) komprehensif atau menyeluruh.

Menurut Bappenas (2003) pembaharuan sistem perencanaan pembangunan nasional perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan pokok dalam manajemen pembangunan, antara lain:

1. Adanya inkonsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;

3. Ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan;
4. Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya keuangan publik;
5. Kurang efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Koordinasi ini bertujuan untuk membahas rancangan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) sebagai arah kebijakan umum APBD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dengan mengacu pada: Program Pembangunan Daerah (Propeda); Rencana Strategis Daerah (Renstrada); dan RKPD kabupaten/kota tahun-tahun sebelumnya, serta hasil pengawasan pelaksanaan program. Untuk keperluan koordinasi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau badan/lembaga yang membidangi perencanaan di daerah bersama-sama dengan SKPD menyiapkan RKPD Kabupaten/Kota.

Kualitas RKPD menunjukkan kinerja tenaga perencana pada masing-masing SKPD. Menurut Bappenas (2003) tentang pedoman koordinasi pembangunan nasional disebutkan bahwa dalam penetapan tujuan rencana pelayanan perlu berpegang pada prinsip SMART, yaitu:

1. Tujuan harus bersifat khusus, spesifik (specific)
2. Tujuan tersebut harus terukur (measurement)
3. Tujuan tersebut harus mungkin dan dapat dicapai (achievable)
4. Tujuan tersebut harus realistis, rasional dan logis (realistic)
5. Tujuan harus mempunyai rentang waktu untuk dicapai (timely)

Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" (Dunn, 2003:608). Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

## 2.5 Koordinasi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggungjawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi hal ini diperlukan perencanaan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal formal maupun aspek akademik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan, pembinaan penyelenggaraan daerah, pengembangan kota, serta penilaian atas pelaksanaannya. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencana, koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan – badan pemerintahan lainnya sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi utamanya organisasi birokrasi pemerintah karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan semua unit organisasi yang bertugas di daerah terutama Bappeda dapat melaksanakan

fungsinya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan yang sama yaitu tujuan nasional.

## 2.6 Konsep Medium Term Expenditure Framework (MTEF)

Medium Term Expenditure Framework (MTEF) adalah suatu konsep yang diperkenalkan Bank Dunia dan IMF, yang tiada lain adalah anjuran agar pemerintah-pemerintah di dunia, utamanya negara berkembang, berupaya untuk memikirkan dan merancang rencana kegiatan, beserta pembiayaannya, yang sinambung dari tahun ke tahun agar misi dan visi akhirnya benar-benar dapat dicapai. Pemerintah tidak cukup hanya pada soal penyusunan anggaran di tahun tertentu tanpa ada kaitannya dengan tahun sebelumnya dan sesudahnya. Sebab, anggaran pada tahun sekarang kerap kali berkait dengan anggaran tahun sebelumnya maupun sesudahnya, karena keluaran dari kegiatan tahun sebelumnya akan menjadi dasar pijak penentuan kegiatan tahun sekarang, dan keluaran tahun sekarang akan mempengaruhi skala kegiatan dan pembiayaannya di tahun mendatang.

Pemerintah Australia di tahun 1980'an memulai sebuah program reformasi ekonomi yang komprehensif pada tahun 1980an dan mengangkat sistem prakiraan ke depan yang sedang dirintis untuk peran utama dalam perencanaan alokasi sumber daya dan penggunaan sumber daya. Setelah menguji pendekatan negosiasi selama fase awal mereka mengembangkan metode, yang sekarang menjadi basis KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/MTEF), untuk membuat sebuah program

patokan dalam hal kebijakan saat ini dan membuat perkiraan ke depan berdasarkan faktor-faktor perkiraan. Dengan memberikan jaminan anggaran untuk program patokan selama periode tiga tahun, perdebatan politik bergeser dari tawar-menawar mengenai program dasar menjadi berfokus pada efektivitas kebijakan yang melandasi dan manfaat perubahan kebijakan. Ketiga unsur utama dari proses meliputi pembuatan kebijakan strategis, portofolio penganggaran dan sistem biaya berjalan. Dengan menetapkan lingkup sektor melalui pembuatan kebijakan strategis, kementerian kemudian diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengelola program portofolio untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Penggunaan sistem biaya berjalan mendelegasikan masalah personel dan administrasi pada para pengelola, dan membebaskan kementerian dari masalah administrasi yang detail. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat didistribusikan secara efisien dalam Kabinet, melalui para Menteri ke manajer sektor. Penganggaran Berbasis Kinerja diperkenalkan secara progresif untuk menghubungkan asupan (sumber daya) dengan keluaran dan manfaat, dan untuk menentukan akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Hasilnya adalah perbaikan yang menerus dalam hal efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah, dan ketahanan yang lebih besar untuk menangani krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan 2009.

### 2.6.1 Karakteristik Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Menurut Caiden dan Wildavsky (1974), perencanaan adalah salah satu dari tindakan rasional. Norma-norma rasionalitas yang terkait didalamnya seperti identifikasi efisiensi, konsistensi, dan koordinasi dalam setiap proses dapat dinilai.

Asumsinya adalah bila mengikuti norma-norma tersebut akan mengarah pada keputusan yang lebih baik. Seperti yang diilustrasikan oleh Harbert Simon dalam Caiden dan Wildavsky (1974), proses perencanaan sering memiliki kekurangan, yaitu inkonsistensi. Jadi, yang diperlukan dalam perencanaan adalah konsistensi. Konsistensi dapat dipahami secara horisontal (relative terhadap beberapa kebijakan pada satu waktu), dan secara vertikal (satu kebijakan atas serangkaian waktu dilihat perkembangan ke depan). Konsistensi vertikal mensyaratkan bahwa kebijakan yang sama harus dikejar dari waktu ke waktu sedangkan konsistensi horizontal melihat perkembangan atau kesesuaian beberapa kebijakan dengan yang lainnya pada waktu yang sama.

Konsistensi yang pertama (vertikal) membutuhkan kontinuitas sebuah rezim pemerintahan yang kuat yang mampu menerapkan preferensinya. Konsistensi kedua (horizontal) membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana kebijakan tersebut saling berinteraksi. Hal ini menuntut syarat, yang satu membutuhkan sikap tegas/kekakuan untuk menjamin kebijakan itu berlangsung, yang lain sikap fleksibilitas untuk

mengakomodasi antar kebijakan tersebut agar dapat berjalan. Bersikap tegas dan fleksibel secara bersamaan cukup sulit untuk dijalankan.

Arah yang berbeda tersirat dalam konsistensi yang dikatakan bahwa kebaikan dalam konsistensi tidak harus diambil untuk dilaksanakan, tapi juga mungkin diinginkan untuk mendapatkan strategi utama dengan menaruhkan banyak energi dan pengabdian, yang dapat membuktikan harga dari suatu nilai taruhan. Konsistensi menyelamatkan banyak pengorbanan untuk sebuah kesuksesan, tetapi juga mempertaruhkan kegagalan. Jika beberapa kebijakan yang berbeda sedang dikejar di daerah yang sama, hal ini dapat bertentangan satu sama lain, tetapi ada juga kemungkinan bahwa hal tersebut dapat berhasil.

Konsistensi tidak selalu kompatibel dengan kebaikan dari adaptasi. Meskipun mungkin diharapkan untuk mencapai suatu keadaan yang stabil. Ada keadaan dimana tujuan tidak berubah walaupun dilaksanakan dengan banyak cara, namun ada juga keadaan dimana pengalaman menyebabkan manusia beradaptasi dengan perubahan keadaan yang mengubah tujuan mereka.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi. Perencanaan merupakan panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai, dalam proses penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa aspek yaitu :

1. Kesesuaian atau keterkaitan antara belanja yang dikeluarkan dengan isu strategis, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang disepakati, penganggaran dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis;
2. Terdapat tujuan dan program yang jelas;
3. Terdapat standar pelayanan yang jelas;
4. Terdapat indikator kinerja yang disepakati untuk mengukur kinerja program/kegiatan.

Menurut PEACH (Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization) Program yang dikembangkan oleh World Bank, konsistensi terjadi bila ada keterkaitan atau kesesuaian yang jelas antara perencanaan dan penganggaran yang tercermin dari setiap dokumen perencanaan dan penganggaran. Antara proses perencanaan dan penganggaran harus dipandang sebagai satu kesatuan waktu yang berkesinambungan dan bukan terputus-putus setiap tahunnya. Merujuk dari MTEF yang diterapkan di Indonesia, bahwa konsistensi dapat ditunjukkan dengan adanya keterkaitan/kesesuaian antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek, baik di tingkat SKPD maupun Pemerintahan Daerah. Selain itu, perencanaan di tingkat SKPD juga harus merujuk pada perencanaan yang terjadi di tingkat Pemerintahan Daerah. Dan sebaliknya inkonsistensi atau ketidakkonsistenan antara perencanaan dan penganggaran itu terjadi apabila proses perencanaan yang tercermin

dalam dokumen perencanaan jangka panjang sampai dengan jangka pendek tidak ada kesesuaian.

### 2.6.2 Konsolidasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Sebagaimana Konsep PEACH (Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization) Program dapat dikemukakan bahwa untuk menelusuri keterkaitan perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan dua tahapan/konsolidasi :

1. Konsolidasi dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Konsolidasi kerangka waktu perencanaan dan penganggaran.

Konsolidasi pertama adalah konsolidasi yang meliputi pengintegrasian berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Konsolidasi ini tentunya tidak terlepas dari tujuan agar dokumen penganggaran konsisten dengan dokumen perencanaan. Selain itu, diperlukan pula konsistensi antar dokumen perencanaan itu sendiri. Dokumen perencanaan meliputi Perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Perencanaan SKPD meliputi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); sedangkan dokumen Penganggaran meliputi Kebijakan Umum APBD (KUA), Plafon dan Prioritas APBD (PPA),

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, terdapat pula dokumen penganggaran pada tingkat SKPD dalam bentuk RKA SKPD yang akhirnya menjadi dokumen anggaran SKPD dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD).

Analisis yang dikembangkan terkait dengan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan untuk pencapaian agenda pembangunan daerah, nasional dan global;
2. Penjabaran target kinerja SKPD untuk pencapaian target pembangunan daerah tercermin dalam dokumen perencanaan SKPD;
3. Konsistensi antara dokumen perencanaan pemerintahan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD;
4. Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

Untuk Konsolidasi Kedua, terkait dengan konsolidasi kerangka waktu perencanaan dan penganggaran. Dalam dokumen perencanaan, terdapat tiga jenis perencanaan menurut waktu yaitu perencanaan jangka panjang 20 tahun tercermin dalam RPJPD, perencanaan lima tahunan di tingkat Pemda adalah RPJMD dan di tingkat SKPD adalah Renstra SKPD. Selain itu, terdapat pula perencanaan jangka pendek 1 tahun di tingkat

Pemerintahan Daerah tercermin dalam RPKD dan di tingkat SKPD dalam bentuk Renja SKPD.

Berkaitan dengan dokumen penganggaran, Pemerintah telah menerapkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF) yang termanifestasi dalam RPJMD. Selain itu, proses penganggaran jangka menengah juga terjadi di tingkat SKPD tercermin dalam program dan kegiatan serta pagu indikatif dalam Renstra SKPD. Konsolidasi kerangka waktu perencanaan ini dapat ditunjukkan dengan adanya konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek, baik di tingkat SKPD maupun Pemerintahan Daerah.

Selain itu, perencanaan di tingkat SKPD juga harus merujuk pada perencanaan yang terjadi di tingkat Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, maka harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. RPKD harus merujuk dan konsisten dengan matriks perencanaan untuk lima tahun periode kepemimpinan Kepala/Wakil Kepala Daerah seperti tercermin dalam RPJMD.
2. Target kinerja perencanaan tahunan dalam RPKD harus merujuk dan ditujukan untuk mencapai target agenda pembangunan seperti yang tercermin dalam RPJMD.
3. Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat SKPD harus merujuk pada perencanaan jangka menengah di tingkat Pemda.

- Renstra SKPD merujuk pada RPJMD, dimana target kinerja SKPD merupakan penjabaran dan usaha pencapaian target kinerja RPJMD.
4. Arah kebijakan keuangan dalam RPJMD menjadi panduan bagi SKPD dalam menentukan pagu indikatif kerangka pengeluaran jangka menengah dalam Renstra SKPD.
  5. Perencanaan tahunan di tingkat SKPD (Renja SKPD) dalam tataran draft awal merujuk pada Renstra SKPD, serta memperhatikan perencanaan tahunan di tingkat Pemda (RKPD).
  6. Proses penganggaran tahunan yang dilakukan oleh Pemda harus memperhatikan kerangka pengeluaran jangka menengah.

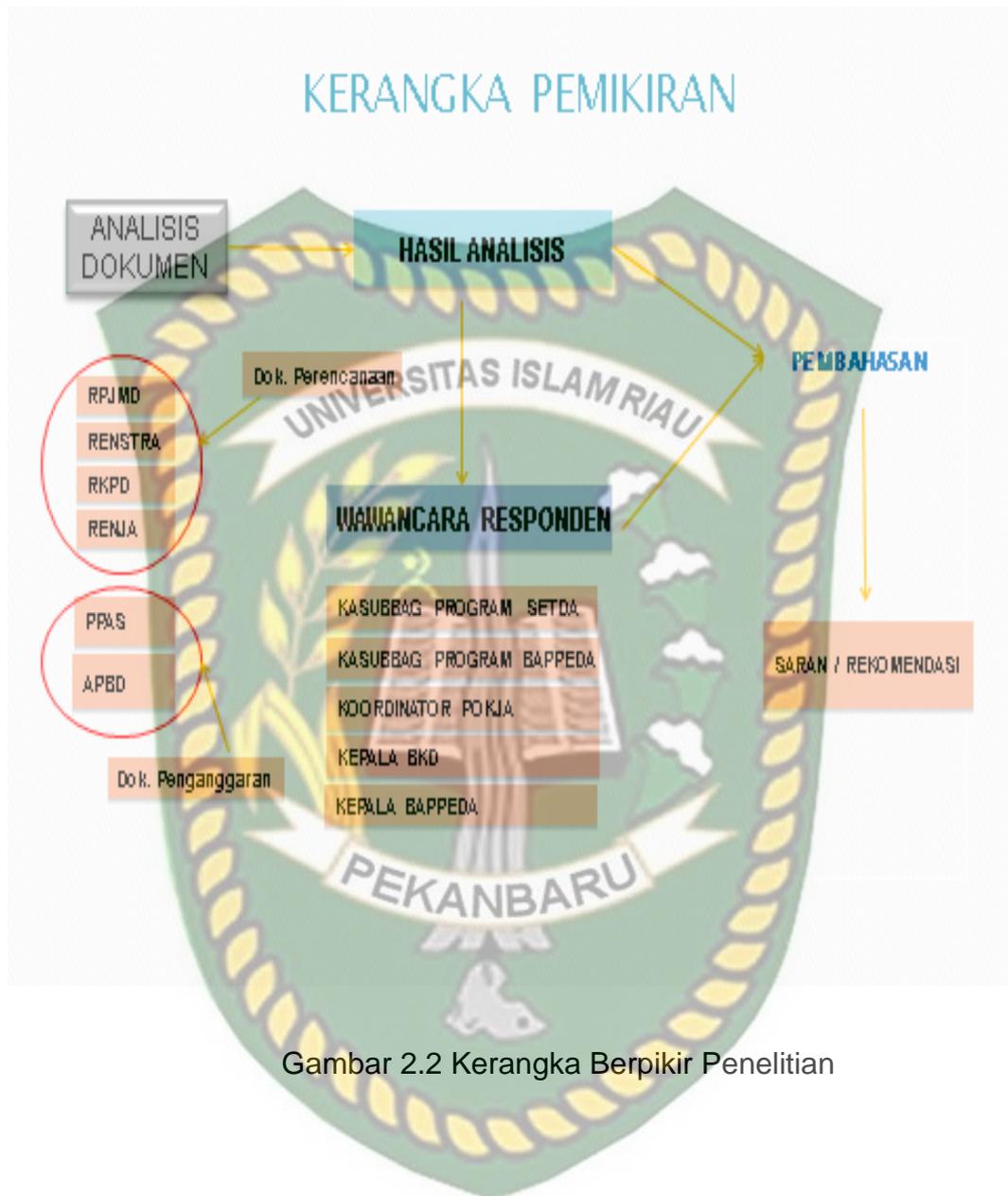
Perencanaan Jangka Menengah tersebut adalah jabaran rencana jangka panjang (RPJPD) yang memuat visi dan misi daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional (UU No.25 Tahun 2004) bahwa perencanaan jangka panjang yang memuat visi dan misi dijabarkan lebih jauh dalam bentuk kebijakan dan arah pembangunan jangka menengah dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Perencanaan jangka menengah tersebut memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan jabaran dari misi, serta bersifat indikatif. Hasil musrenbang baik dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi sampai tingkat nasional dapat merubah kerangka waktu program dan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPD dan Renstra SKPD. Sedangkan Perencanaan jangka pendek (Renja SKPD dan RKPD)

akan menjadi dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian dapat dibuat RKA dan Rancangan APBD.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari fenomena yang sering terjadi di daerah yaitu masih sering terjadi inkonsistensi antar perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan sering tidak tercapainya sasaran pembangunan dan akhirnya pembangunan menjadi tidak terarah/tidak fokus, yang dalam penelitian ini dikhususkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Untuk itu penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian dengan memanfaatkan data yang tersedia (sekunder) dan didukung dengan data primer yang berasal dari wawancara dengan responden. Dari analisa terhadap data yang diperoleh kemudian dilakukan pembahasan guna menghasilkan rekomendasi/saran.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

## 2.8 Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Bisnis” , Hipotesis adalah :

“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho : Kecenderungan proses perencanaan dan penganggaran tidak konsisten sehingga tujuan pembangunan tidak dapat tercapai secara maksimal.

H1 : Adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

## 2.9 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah konsistensi perencanaan dan penganggaran diantaranya adalah :

1. Rutiana D. Wahyuningsih (2007), penelitiannya berjudul *Responsibilitas Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah (studi Konsisten Dokumen RKPD, PPAS dan APBD Tahun 2008 dari Aspek Pro Job, Pro Poo dan Pro Growth di Kabupaten Palopo, Semarang, Klaten, Nagan Raya, Ace Jaya, Simalungun, Malang dan Probolinggo)*. Temuan penelitian, secara umum dari aspek regulasi, sistematika KUA dan sistematika PPAS memiliki nilai konsistensi tinggi (lebih dari 80%), dibandingkan dengan konsistens pada dokumen

RKPD. Konsistensi terendah muatan dokumen menurut regulasi adalah RKPD. Dari segi kesesuaian program dan kegiatan konsisten tertinggi ada pada dokumen PPAS ke APBD. Konsistensi terendah pada dokumen RKPD dengan APBD. Dari segi kesesuaian prioritas daerah dengan prioritas Nasional, secara umum akomodir isu nasional ke dalam dokumen perencanaan RKPD cukup tinggi, yaitu sekitar 80%. Namun demikian dalam perjalanan proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran sering terdapat ketidak konsistenan. Dari segi konsistensi besaran anggaran, secara umum korelasi besaran anggaran antar dokumen perencanaan dan penganggaran pada kategori “Agak Rendah”. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS dan APBD. Konsistensi terendah pada keterkaitan dokumen RKPD dan APBD. Penyebab Umum inkonsistensi adalah kurangnya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan, tim anggaran dan DPRD; pada: (1) aspek regulasi; (2) kelompok miskin sebagai sasaran program dan kegiatan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran; (3) evaluasi hasil capaian kinerja kebijakan sebelumnya; serta kurangnya komitmen dan kapasitas stakeholder daerah dalam melakukan proses pengawalan dan tindak lanjut hasil proses perencanaan *bottom up* dan partisipatif. Rekomendasi yang diusulkan secara garis besar; (1) Optimalisasi fungsi kelembagaan perencana di tiap SKPD; (2) Perlu komitmen bersama antara Dewan dan eksekutif untuk menjaga konsistensi perencanaan dan

penganggaran; (3) Adanya jaminan keterbukaan informasi proses perencanaan dan penganggaran untuk diakses publik untuk menguatkan kualitas pengawalan publik terhadap isu-isu kritis untuk perencanaan dan penganggaran.

2. Saifuddin (2007), penelitiannya berjudul Analisis Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak pada Puskesmas di Kota Banjar Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang fenomena perencanaan dan penganggaran program KIA pada puskesmas di Kota Banjar yang meliputi proses analisis situasi, proses penentuan tujuan proses identifikasi kegiatan dan proses perhitungan anggaran, juga untuk mengetahui berapa jumlah anggaran program KIA yang telah dihitung oleh puskesmas melalui P2KT dan berapa jumlah anggaran Program KIA untuk Puskesmas melalui perhitungan template UW SPM. Hasil penelitian menunjukkan Analisis situasi dan penentuan masalah sebagian besar informan menyatakan dipengaruhi oleh keadaan masalah kesehatan, kinerja program faktor perilaku dan lingkungan. Dalam penentuan tujuan program KIA ada dua fenomena pertama puskesmas menentukan tujuan sendiri dan kedua puskesmas tidak menentukan tujuan tapi mengikuti tujuan dan target dinas. Adapun proses penentuan tujuan/target KIA di puskesmas dipengaruhi oleh tujuan dan target dinas, ketersediaan anggaran, cakupan target sarana, motivasi pegawai trend kinerja, budaya dan tuntutan lingkungan. Keterlibatan

lintas program dalam identifikasi kegiatan muncul dua kelompok pertama perencanaan disusun dengan keterlibatan lintas program kedua perencanaan hanya disusun orang-orang tertentu saja. Hasil Penghitungan anggaran berdasarkan P2KT oleh Puskesmas dan manual/template UW SPM oleh peneliti menunjukkan hasil perhitungan manual UW SPM lebih besar dibandingkan perhitungan P2KT. Perencanaan dan perhitungan anggaran di Puskesmas dapat mengkombinasikan pendekatan P2KT pada proses perencanaan dari analisis masalah sampai dengan identifikasi kegiatan dan rencana operasional dan manual UW SPM untuk penghitungan anggaran.

3. Rini Octavianti (2008), penelitiannya berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini mencoba melakukan analisa terhadap konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan daerah yang saling terkait mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan RPJPD dan RPJMD di Solo Selatan kurang menunjukkan konsistensi, secara kuantitatif hanya sekitar 50 program kegiatan di RPJMD yang sinkron dengan program kegiatan RPJPD. Hal ini disebabkan karena RPJMD tidak membahas secara rinci program untuk SKPD Dinas Pendidikan. Sementara itu analisis antar dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD Dinas Pendidikan konsisten sekitar 75%. Analisis antara Renstra SKPD dengan Renja SKPD

menunjukkan konsistensi 100%. Selanjutnya analisis konsistensi antara Renja SKPD da APBD menunjukkan tingkat konsistensi sebesar 40%.

4. Ramadhiani Fitry (2012), penelitiannya berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau tahun 2010. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Kota Lubuklinggau seperti RPJPD, RPJMD tahun 2008-2013, RKPD tahun 2010, Renstra Kesehatan, Renja dan DPA Kesehatan tahun 2010.
5. Febie Yandra, penelitiannya berjudul analisis Perencanaan Dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Tipe/Jenis Penelitian

Penelitian ini mencoba menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018. Dengan memperhatikan pokok permasalahan dan tujuan penelitian, maka pendekatan dan desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang lebih tampak dominan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak. Sedangkan untuk menjelaskan pola hubungan tersebut dan mempertegas hasil analisa kuantitatif digunakan pendekatan kualitatif dalam artian memberikan penjelasan dari angka angka ke dalam bentuk narasi. Tambahan berbagai informasi kualitatif tersebut diharapkan dapat menjelaskan hasil analisis yang dilakukan secara kuantitatif.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Kabupaten Siak, khususnya pada aspek proses perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Alasan ini diambil karena penulis bekerja sebagai di

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak yang sudah menjadi salah satu tugas fungsi dari penulis yang juga termasuk sebagai anggota POKJA.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dan sampel dari penelitian ini seperti pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

OPD/Bagian	Populasi	Sampel
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak	112 Orang	10 Orang
Bagian Umum	19	1
Bagian Pertanahan	10	1
Bagian Adm Pembangunan	4	1
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	10	1
Bagian Administrasi Pemerintahan	11	1
Bagian Hukum	8	1
Bagian Humas Dan Protokol	13	1
Bagian Organisasi	8	1
Bagian Administrasi Perekonomian	8	1
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	21	1

### 3.4 Teknik Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling (penetapan sampling dengan pertimbangan tertentu).

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk memberikan informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Siak khususnya pada tahun 2018. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah:
  - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2016-2021.
  - 2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah tahun 2016-2021.
  - 3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2018.
  - 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018.
  - 5) PPAS Sekretariat Daerah Tahun 2018.
  - 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah tahun 2018.
  - 7) Dokumentasi Perencanaan dan Keuangan lainnya yang mendukung penelitian.
2. Data primer, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Responden yang diwawancarai adalah

*Policy maker* yang terdiri dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Koordinator POKJA dan Kasubbag Program Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber, baik primer maupun sekunder, serta data yang diperoleh dari observasi dan telaah dokumen secara menyeluruh.
2. Untuk menjawab permasalahan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan mengevaluasi beberapa dokumen terkait yaitu mulai dari Visi dan Misi Kabupaten Siak yang tertuang dari RPJPD Kabupaten Siak, RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016 - 2021, Renstra, Renja dan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2018, PPAS dan DPA Sekretariat Daerah tahun 2018. Hasil evaluasi tersebut disusun dalam suatu Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), dimana MKPP ini disusun dengan cara melakukan integrasi antara dokumen perencanaan dengan dokumen Penganggaran Kabupaten Siak. MKPP ini disadur/diacu berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Penentuan konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan mensinkronkan program dan kegiatan secara nomenklatur. Kegiatan dianggap konsisten apabila terdapat saling keterkaitan, sinkron atau mempunyai maksud dan isi yang sama dengan dokumen yang dibandingkan. Selanjutnya untuk menentukan tingkat konsistensi secara keseluruhan dari dokumen tersebut dilakukan melalui teknik persentase yaitu:

$$\text{Tingkat Konsistensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yang konsisten}}{\text{Total kegiatan}} \times 100\%$$

Tingkatan Konsistensi Berdasarkan Persentase (Sugiyono, 2003):

- Sangat buruk : 0,0 – 19,9
- Buruk : 20,0 – 39,9
- Sedang : 40,0 – 59,9
- Baik : 60,0 – 79,9
- Sangat Baik : 80,0 – 100,0

4. Mencari akar permasalahan yang membuat terjadinya inkonsistensi dan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Siak tahun 2018

dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut jika memang ditemukan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yang dapat digali dari hasil wawancara dari beberapa pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kabupaten Siak, jika pun tidak ditemukan peneliti akan memberikan saran untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran Kabupaten Siak.

### 3.7 Teknik Analisa Data

Metode analisis data menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), yakni untuk menganalisis konsistensi program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif secara menyeluruh antara RPJMD dan RENSTRA, RENSTRA dengan RENJA, RENJA dengan RKPD, RKPD dengan PPAS serta antara PPAS dengan APBD. Selanjutnya diidentifikasi apa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakkonsistenan antar dokumen dengan hasil wawancara peneliti dengan pejabat terkait.

### 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian untuk thesis ini adalah pada bulan Oktober - November 2018 seperti pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	OKTOBER				NOVEMBER				Ket
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
<b>A.</b>	<b>TAHAP PERSIAPAN</b>									
1.	Konsultasi ke Dosen Pembimbing meminta arahan mengenai Tesis									
2.	Mengumpulkan referensi sebagai bahan perbandingan menyusun Tesis									
3.	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyusun Tesis									
<b>B.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>									
1.	Konsultasi Ke Dosen Pembimbing meminta arahan selanjutnya									
2.	Analisis dan mengolah data yang dibutuhkan									
3.	Melakukan <i>In Depth Interview Responden</i>									
4.	Membuat Laporan Tesis									
6.	Evaluasi pembuatan Tesis									

Catatan : Jadwal bersifat tentative, dapat terjadi perubahan sesuai dengan keadaan penelitian

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten induknya yakni, Kabupaten Bengkalis yang berdiri pada tahun 1999, dan Kabupaten Siak terus bergerak maju di berbagai bidang mulai dari pembangunan fisik maupun pengembangan sumber daya manusianya. Berdasarkan historinya Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M, oleh raja kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, hingga dipimpin oleh dua belas orang raja. Raja yang terakhir bernama Sutan Syarif Qasim II yang ditabalkan sebagai raja pada tahun 1915. Pada masa kepemimpinan sultan syarif Hasyim ini kerajaan Siak mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi.

Pembentukan pemerintah Kabupaten Siak dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri ( ad-interim) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999 sekaligus pelantikan Pejabat Siak H. Tengku Rafi'an dan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arwin, AS.,SH dengan SK Mendagri No. 131.24.1129 tanggal 8 Oktober 1999.

## 4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Siak

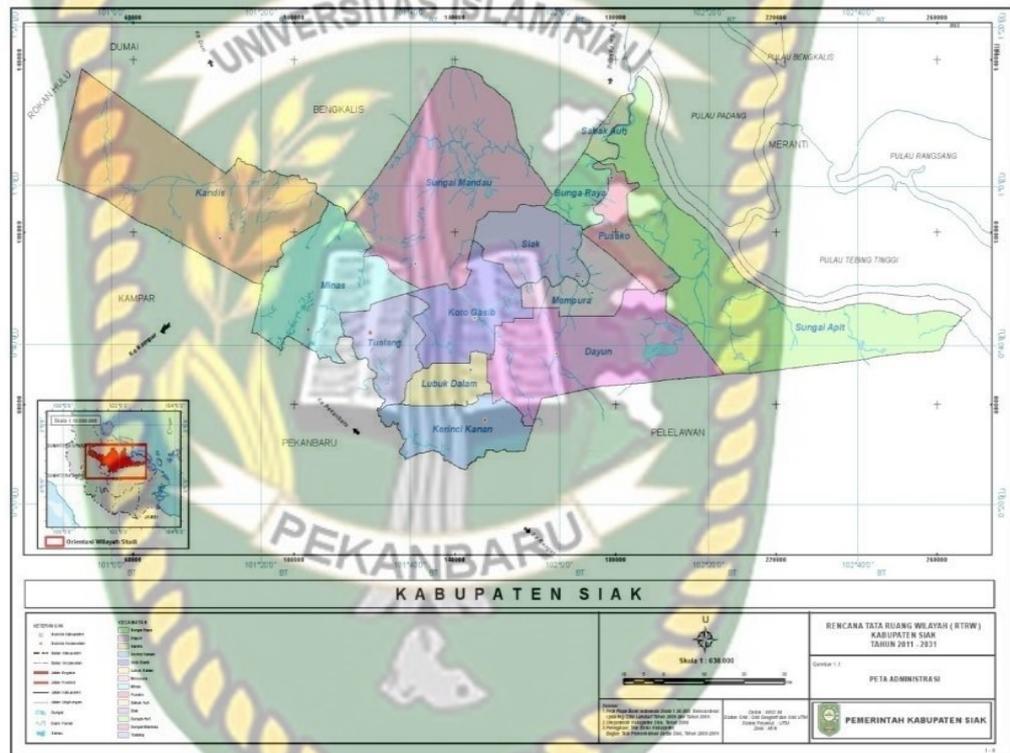
Kabupaten Siak terletak diantara  $1^{\circ}16'30''$  LU -  $0^{\circ}20'49''$ LU dan  $100^{\circ}54'21''$ BT -  $102^{\circ}10'59''$ BT, yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran mencakup sekitar 60% Wilayah Kabupaten Siak, morfologi perbukitan rendah terdapat di bagian utara, timur, dan memanjang dari arah barat laut sampai tenggara, dan morfologi perbukitan tinggi terletak di bagian barat daya wilayah DAS Siak. Kabupaten Siak memiliki luas wilayah 8.556,09 Km<sup>2</sup> dan merupakan kabupaten dengan luas yang mencapai 9,74 persen dari total wilayah Provinsi Riau.

Secara geografis, Kabupaten Siak berada pada posisi strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera yang berbatasan dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Kota Pekanbaru;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.

Lebih jelasnya, berikut adalah peta administrasi Kabupaten Siak berdasarkan RTRW Kabupaten Siak Tahun 2011-2031.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Siak

Berdasarkan peta administratif Kabupaten Siak, dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Siak terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri atas 131 desa/kelurahan (kampung) dengan total luas wilayah 8.556,09 km<sup>2</sup>.

### 4.3 Visi dan Misi Kabupaten Siak

Visi pembangunan Kabupaten Siak merupakan rumusan umum untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, berkenaan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005 – 2025 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu Serta Menjadi Tujuan Pariwisata di Sumatera”.

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Beriman dan Bertaqwa serta Berbudaya Melayu.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Serta Pelayanan Publik Yang Prima.

Misi RPJMD Kabupaten Siak tahun 2016 – 2021 berpedoman pada RPJMN tahun 2015 – 2019, dan RPJMD Provinsi Riau tahun 2015 – 2019.

#### 4.4 Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Rencana strategis Sekretariat Daerah dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### 4.5 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yang meliputi menetapkan kebijakan, program operasional, dan kegiatan (aktifitas) dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kabupaten Siak dan kebijakan intern Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Memperhatikan hal tersebut di atas, strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dalam mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan daerah;
2. Menyusun rencana dan merumuskan pengembangan dan pembinaan hukum serta peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan, akan ditempuh dengan upaya kebijakan yang merupakan arah yang diambil oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut meliputi :

1. Pembinaan dan pengawasan tugas-tugas dinas, lembaga teknis

daerah;

2. Desentralisasi urusan wajib dan urusan pilihan serta model perencanaan dari bawah yang serasi dengan model perencanaan daerah;
3. Standarisasi administrasi pemerintahan dan standarisasi kualitas pelayanan publik;
4. Menindak lanjuti regulasi aturan pemerintah pusat.

#### **4.6 Fungsi dan Tugas Sekretariat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten siak menyatakan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dan penunjang urusan Pemerintah Daerah serta pelayanan administrasi.
2. Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana urusan Pemerintah Daerah dan penunjang urusan Pemerintah Daerah

- serta pelayanan administrasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.7 Sumber Daya Sekretariat Daerah**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 142 orang. Jumlah pegawai eselon II sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai yaitu Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta 5 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing-masing sebanyak 8 orang dan 25 orang yaitu para kepala bagian, dan kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Pelaksana sebanyak 100 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di bawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

#### **4.8 Struktur Sekretariat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, adapun

kerangka struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
  - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
  - c. Bagian Pertanahan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - a. Bagian Administrasi Perekonomian
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Asisten Administrasi Umum
  - a. Bagian Organisasi
  - b. Bagian Hukum
  - c. Bagian Umum
  - d. Bagian Humas dan Protokol
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis dan pembahasan terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Siak tahun 2018. Pentingnya konsistensi perencanaan dan penganggaran adalah sebagai pedoman dan pemberi arah pembangunan supaya pembangunan dilaksanakan secara terencana, terarah komprehensif dan berkelanjutan. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut komitmen dan konsistensi dari seluruh stakeholder penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyusun suatu perencanaan dan penganggaran termasuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan kepada perencanaan yang telah disusun secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat inilah diharapkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dengan harapan agar sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tersebut dapat tercapai.

## 5.1 Analisis Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

### 5.1.1 Konsistensi Dokumen Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021

Untuk menganalisis konsistensi program dan indikator kinerja program antara RENSTRA dan RPJMD dilihat dari matiks tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matriks Konsolidasi Program dan Indikator Kinerja Program antara RENSTRA dan RPJMD

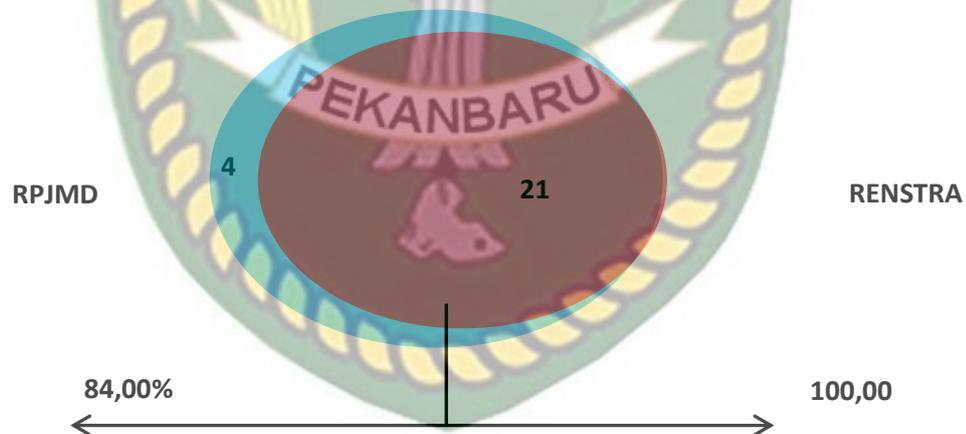
NO.	RPJMD	RENSTRA	Konsistensi		Ket
	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	YA	TIDAK	
1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	√		
	Meningkatnya Tingkat Pengetahuan Informasi Pertanahan	Meningkatnya Tingkat Pengetahuan Informasi Pertanahan	√		
2.	<b>Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	√		
	Terpenuhinya Kebutuhan Peta dan Tabel Data Lahan	Terpenuhinya Kebutuhan Peta dan Tabel Data Lahan	√		
3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	√		
	Menurunnya Tingkat Permasalahan Pertanahan	Menurunnya Tingkat Permasalahan Pertanahan	√		
4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	√		
	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	√		
5.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	√		
	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	√		
6.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	√		
	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	√		
7.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	√		
	Cakupan peningkatan sumberdaya aparatur	Cakupan peningkatan sumberdaya aparatur	√		
8.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem</b>	√		

NO.	RPJMD	RENSTRA	Konsistensi		Ket
	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	YA	TIDAK	
	<b>pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
	Terpenuhnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Terpenuhnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	√		
9.	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	√		
	Output Capaian kegiatan kepala daerah/ wakil kepala daerah sesuai jadwal	Cakupan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		√	
10	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	√		
	Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP	Meningkatnya Kualitas lembaga		√	
11	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	√		
	Cakupan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	Cakupan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	√		
12	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	√		
	Capaian manajemen Mutu sesuai standar ISO 9001:2008 di kecamatan	Capaian manajemen Mutu sesuai standar ISO 9001:2008 di kecamatan	√		
13	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	√		
	Meningkatnya kemampuan dan kinerja BUMD	Meningkatnya kemampuan dan kinerja BUMD	√		
14	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	√		
	Capaian Manajemen Mutu Pelayanan Publik di SKPD Pelayanan Publik	Capaian Manajemen Mutu Pelayanan Publik di OPD Pelayanan Publik	√		
15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	√		
	Terlaksananya Kegiatan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan kehidupan umat di bidang agama	Cakupan peningkatan pelayanan kehidupan umat beragama		√	
16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan</b>	√		

NO.	RPJMD	RENSTRA	Konsistensi		Ket
	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	YA	TIDAK	
	<b>beragama</b> Terwujudnya masyarakat yang memiliki kualitas pemahaman dan pengamalan agama yang baik	<b>beragama</b> Terwujudnya masyarakat yang memiliki kualitas pemahaman dan pengamalan agama yang baik	√		
17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b> Persentase Ketersediaan informasi batas kecamatan dalam kabupaten siak dalam bentuk peta	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b> Persentase Ketersediaan informasi batas kecamatan dalam kabupaten siak dalam bentuk peta	√		
18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b> Meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang perekonomian	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b> Meningkatnya koordinasi dan kerjasama bidang perekonomian	√		
19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b> Terpenuhinya Kerjasama dengan Mas Media	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b> Terpenuhinya Kerjasama dengan Mas Media	√		
20.	<b>Program Jaminan Sosial</b> Capaian pemberian bantuan Raskin	<b>Program Jaminan Sosial</b> Capaian pemberian bantuan Raskin	√		
21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b> Persentase pengelolaan administrasi pemerintah daerah yang baik	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b> Persentase Pengelolaan Administrasi Pemerintah Daerah Yang Baik	√		
22.	<b>Program Pembinaan Perekonomian Rakyat</b> Meningkatnya kemampuan petugas pengelola perekonomian rakyat	<b>Tidak Ada</b> Tidak Ada		√	
23.	<b>Program Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan</b> Persentase peraturan perundang-undangan yang terevaluasi	<b>Tidak Ada</b> Tidak Ada		√	
24.	<b>Program Sosialisasi Hukum Daerah</b> Cakupan produk hukum yang tersosialisasikan	<b>Tidak Ada</b> Tidak Ada		√	

NO.	RPJMD	RENSTRA	Konsistensi		Ket
	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	YA	TIDAK	
25	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	Tidak Ada		√	
	Jumlah kegiatan yang memiliki SOP/Pedoman	Tidak Ada		√	

Dari matriks tabel 5.1 dapat dilihat bahwa pada RPJMD terdapat 25 program dengan 25 indikator kinerja program, sedangkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah terdapat 21 Program dengan 21 indikator kinerja program. Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan program antara Renstra dan RPJMD dapat dilihat pada gambar 5.1 dibawah ini.

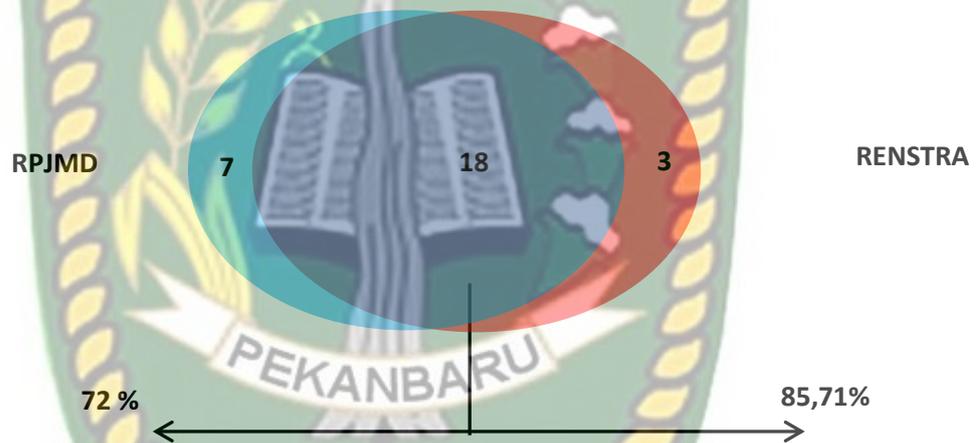


Gambar 5.1. Diagram Keterkaitan Antara Program RPJMD Dengan Program RENSTRA

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa dari 25 program yang tertuang dalam RPJMD tersebut, sebanyak 21 program (84,00%) yang diakomodir dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018, artinya menunjukkan

*tingkat konsistensi yang baik.* Sedangkan sebanyak 4 program (16,00%) yang tidak diakomodir dalam dokumen Renstra. Dengan adanya beberapa program yang tidak diakomodir menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan Renstra Sekretariat Daerah tidak sepenuhnya mempedomani pada dokumen perencanaan RPJMD.

Analisa mengenai keterkaitan indikator kinerja program antara Renstra dan RPJMD dapat dilihat dari gambar 5.2.



Gambar 5.2 Diagram keterkaitan antara indikator kinerja RPJMD dengan indikator kinerja RENSTRA

Berdasarkan gambar 5.2 menunjukkan bahwa dari 21 indikator kinerja program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah, ada 3 indikator kinerja program atau 14,28% yang tidak sesuai dengan indikator kinerja program RPJMD dan terdapat 18 (85,71%) indikator kinerja Renstra yang disusun berpedoman kepada RPJMD. Hal ini menandakan dalam penyusunan indikator kinerja tidak sepenuhnya mempedomani RPJMD, secara keseluruhan dinilai memiliki *tingkat konsistensi baik.*

Untuk menganalisis konsistensi tujuan program antara RENSTRA dan RPJMD dapat dilihat berdasarkan tabel 5.2.

Tabel 5.2 Matriks Konsolidasi Tujuan Program antara RENSTRA dan RPJMD

NO.	PROGRAM	TUJUAN		KONSISTENSI		KET
		RPJMD	RENSTRA	YA	TIDAK	
1.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
2.	Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
3.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak Ada	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak Ada	Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
6.	Program peningkatan disiplin aparatur	Tidak Ada	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tidak Ada	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
8.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Tidak Ada	Meningkatkan Koordinasi Perumusan Kebijakan		√	

NO.	PROGRAM	TUJUAN		KONSISTENSI		KET
		RPJMD	RENSTRA	YA	TIDAK	
	capaian kinerja dan keuangan		Ekonomi dan Pembangunan			
9.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional penataan penguasaan;	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
10	Program peningkatan kualitas kelembagaan	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional penataan penguasaan;	Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional penataan penguasaan;	Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
12	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional penataan penguasaan;	Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
13	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional penataan penguasaan;	Meningkatkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan		√	
14	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesional penataan penguasaan;	Meningkatkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan		√	
15.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Pembangunan Manusia	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
16	Program	Meningkatkan	Mewujudkan		√	

NO.	PROGRAM	TUJUAN		KONSISTENSI		KET
		RPJMD	RENSTRA	YA	TIDAK	
	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama	kualitas hidup masyarakat dan Pembangunan Manusia	Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik			
17.	Program Batas Wilayah Pemerintahan	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
18.	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesionalpenataan penguasaan;	Meningkatkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan		√	
19.	Program kerjasama informasi dengan Mass Media	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesionalpenataan penguasaan;	Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
20.	Program Jaminan Sosial	Meningkatkan Perekonomian serta pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Daerah	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Baik		√	
21.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah dan sistem birokrasi yang baik dan profesionalpenataan penguasaan;	Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	

Dari matriks diatas dapat dilihat bahwa pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Siak mempunyai 21 Program dengan 21 Tujuan Program, dari 21 Tujuan Program tersebut tidak satupun (100%)

mempedomani Tujuan yang ada di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021. Terdapat ketidakselarasan antara tujuan yang tertuang dalam RPJMD dengan Renstra. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa Tujuan program di Renstra *sangat tidak konsisten* dengan Tujuan yang ada dalam dokumen RPJMD.

Adapun untuk menganalisis konsistensi sasaran program RENSTRA dan RPJMD dapat dilihat dari tabel 5.3.

Tabel 5.3 Matriks Konsolidasi Sasaran Program RENSTRA dan RPJMD

No.	PROGRAM	SASARAN		Konsistensi		Ket
		RPJMD	RENSTRA	Ya	Tidak	
1.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Meningkatnya kinerja birokrasi	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		√	
2.	Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya kinerja birokrasi	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		√	
3.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		√	
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak Ada	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan		√	

No.	PROGRAM	SASARAN		Konsistensi		Ket
		RPJMD	RENSTRA	Ya	Tidak	
			Pelayanan Publik Serta Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat			
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tidak Ada	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
6.	Program peningkatan disiplin aparatur	Tidak Ada	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat		√	
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tidak Ada	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat		√	
8.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tidak Ada	Meningkatnya Ekonomi dan Pembangunan Daerah		√	
9.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya kinerja birokrasi	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat		√	
10	Program peningkatan kualitas kelembagaan	Meningkatnya kinerja birokrasi	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
11	Program Penataan Peraturan	Meningkatnya kinerja birokrasi	Terlaksananya Penataan Administrasi		√	

No.	PROGRAM	SASARAN		Konsistensi		Ket
		RPJMD	RENSTRA	Ya	Tidak	
	Perundang-Undangan		Umum, Hukum Dan Kelembagaan			
12	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur	Meningkatnya kinerja birokrasi	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
13	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	Meningkatnya kinerja birokrasi	Meningkatnya Ekonomi dan Pembangunan Daerah		√	
14	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kinerja birokrasi	Meningkatnya Ekonomi dan Pembangunan Daerah		√	
15.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	Meningkatnya Kerukunan kehidupan Beragama	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		√	
16	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama	Meningkatnya Kerukunan kehidupan Beragama	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		√	
17.	Program Batas Wilayah Pemerintahan	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		√	
18.	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian	Meningkatnya kinerja birokrasi	Meningkatnya Ekonomi dan Pembangunan Daerah		√	

No.	PROGRAM	SASARAN		Konsistensi		Ket
		RPJMD	RENSTRA	Ya	Tidak	
19.	Program kerjasama informasi dengan Mass Media	Meningkatnya kinerja birokrasi	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	
20.	Program Jaminan Sosial	Menurunnya tingkat kemiskinan	Terciptanya pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		√	
21.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum, Hukum Dan Kelembagaan		√	

Matriks diatas dapat dilihat bahwa Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Siak mempunyai 21 program dengan 21 Sasaran. Keseluruhan Sasaran tersebut tidak satupun (100%) mempedomani Sasaran yang ada di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021. Hal ini menunjukkan Sasaran program di Renstra sangat tidak konsisten dengan Sasaran yang ada dalam dokumen RPJMD. Artinya penyusunan sasaran Renstra tidak berpedoman pada RPJMD.

Dari kedua tabel diatas, menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi (100%) dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Siak terkait Sasaran dan Tujuan yang tidak mempedomani Sasaran dan Tujuan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021 Kabupaten Siak.

## 5.1.2 Analisis Konsistensi RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2018

Dalam menganalisis dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD dibuat berdasarkan tabel 5.4.

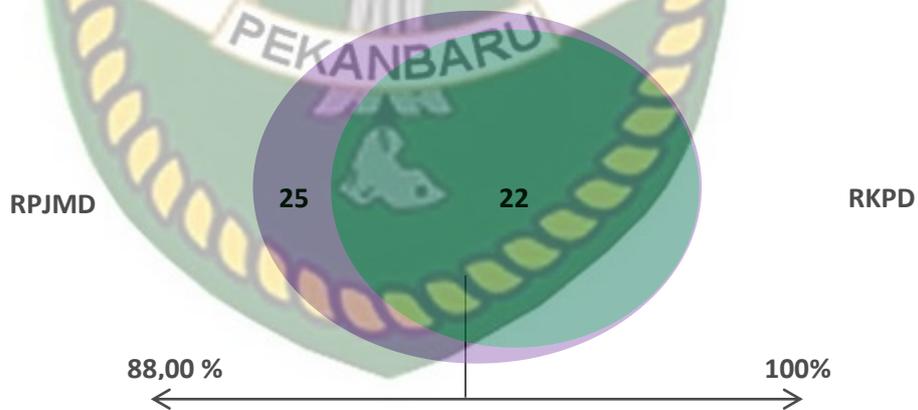
Tabel 5.4 Matriks Konsolidasi Program antara RPJMD dengan RKPD Sekretariat Daerah Tahun 2018

NO.	RPJMD	NO.	RKPD	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM		PROGRAM	YA	TIDAK	
1.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	1.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	√		
2.	Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.	Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	√		
3.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	√		
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√		
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√		
6.	Program peningkatan disiplin aparatur	6.	Program peningkatan disiplin aparatur	√		
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√		
8.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√		
9.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	9.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	√		
10.	Program peningkatan kualitas kelembagaan	10.	Program peningkatan kualitas kelembagaan	√		
11.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	11.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	√		
12.	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur	12.	Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur	√		
13.	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	13.	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	√		
14.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	14.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	√		
15.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	15.	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	√		
16.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama	16.	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama	√		
17.	Program Batas Wilayah Pemerintahan	17.	Program Batas Wilayah Pemerintahan	√		
18.	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian	18.	Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian	√		
19.	Program kerjasama informasi dengan Mass Media	19.	Program kerjasama informasi dengan Mass Media	√		
20.	Program Jaminan Sosial	20.	Program Jaminan Sosial	√		
21.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	21.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	√		
22.	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	22.	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	√		
23.	Program Pembinaan Perekonomian Rakyat	23.	Tidak Ada		√	
24.	Program Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	24.	Tidak Ada		√	
25.	Program Sosialisasi Hukum Daerah	25.	Tidak Ada		√	

Dari tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa penyusunan perencanaan kegiatan pada RKPD tahun 2018 belum sepenuhnya konsisten. Terlihat dari adanya program yang ada di RPJMD tidak diakomodir di RKPD 2018.

Dalam RPJMD terdapat 25 Program, sedangkan pada RKPD terdapat 22 Program. Matrik diatas menunjukkan bahwa 22 Program dalam RKPD mengacu pada Program yang tertuang dalam RPJMD. Hal ini menandakan tingkat konsisitensi yang *sangat baik*.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan kegiatan antara RPJMD dengan RKPD dapat dilihat pada gambar 5.3 sebagai berikut :



Gambar 5.3 Diagram Keterkaitan antara Program RPJMD dan Program RKPD

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 25 program yang direncanakan dalam RPJMD tersebut ada 22 program (88,00%) yang diakomodir dalam RKPD tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *baik*, sedangkan sisanya sebanyak 3 program (12,0%)

tidak diakomodir. Dari gambar 5.3 juga terlihat ada 22 program yang ada di RKPD 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan RPJMD sebesar 100,00% artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*.

### 5.1.3 Analisis Konsistensi RKPD 2018 dan Renja Sekretariat Daerah

Dalam menganalisis dokumen perencanaan RKPD 2018 dan Renja Sekretariat Daerah dibuat berdasarkan tabel 5.5.

Tabel 5.5 Matriks Konsolidasi Program/Kegiatan antara RKPD dengan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2018

NO.	RKPD	NO.	RENJA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	√		
1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	√		
2.	<b>Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	2.	<b>Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	√		
2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	√		
2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	√		
2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	√		
2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	√		
3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	√		
3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	√		
4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	√		
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	√		
4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	√		
4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	√		
4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	√		
4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	√		
4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	√		
4.7	Penyediaan alat tulis kantor	4.7	Penyediaan alat tulis kantor	√		
4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√		
4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	√		
4.10	Penyediaan makanan dan minuman	4.10	Penyediaan makanan dan minuman	√		
4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	√		
4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	√		
4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	√		

NO.	RKPD	NO.	RENJA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	√		
4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	√		
5.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	5.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	√		
5.1	Pengadaan mobil jabatan	5.1	Pengadaan mobil jabatan	√		
5.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	5.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	√		
5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	√		
5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	√		
5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	√		
5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	√		
5.7	Pengadaan mebeleur	5.7	Pengadaan mebeleur	√		
5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	√		
5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	√		
5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	√		
5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	√		
5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	√		
5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	√		
5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	√		
5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	√		
5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	√		
5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	√		
5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	√		
5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	√		
5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	√		
5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	√		
5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	√		
5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	√		
5.24	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	√		
6.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	6.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	√		
6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	√		
6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	√		
6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	√		
7.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	7.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	√		
7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	√		
7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	√		
7.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	√		
7.4	Fasilitasi Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	√		
8.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	8.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	√		
8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	√		

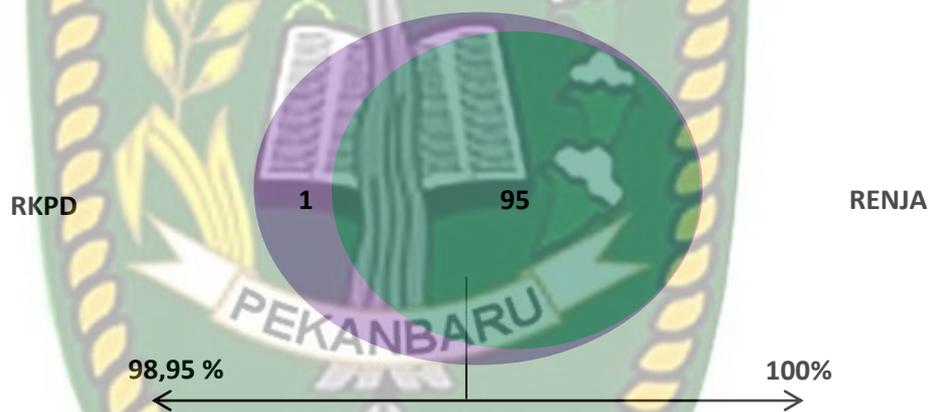
NO.	RKPD	NO.	RENJA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	√		
8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	√		
8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	√		
8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	√		
8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	√		
9.	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	9.	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	√		
9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	√		
9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	√		
9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	√		
9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	√		
9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	√		
9.6	Fasilitasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	√		
9.7	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	√		
10	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	10	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	√		
10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	√		
10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	√		
11	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	11	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	√		
11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	√		
11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	√		
11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	√		
12	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	12	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	√		
12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	√		
13	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	13	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	√		
13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	√		
14	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	14	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	√		
14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	√		
14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	√		
14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	√		
15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	√		
15.1	Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	√		
15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	√		
16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	√		
16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	√		
16.2	Fasilitasi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	√		

NO.	RKPD	NO.	RENJA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	√		
16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	√		
16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	√		
17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	√		
17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	√		
17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	√		
18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	√		
18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	√		
18.2	Fasilitasi Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	√		
19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	√		
19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	√		
19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	√		
19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	√		
20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	√		
20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	√		
21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	√		
21.1	Penyusunan standar satuan harga	21.1	Penyusunan standar satuan harga	√		
21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	√		
21.2	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sison TEPR	21.2	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sison TEPR	√		
21.3	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	21.3	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	√		
21.4	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	21.4	Tidak Ada		√	
22.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>	22.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>	√		
22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	√		

Dari tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa penyusunan perencanaan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah tahun 2018 belum sepenuhnya konsisten. Terlihat dari adanya kegiatan yang ada di RKPD tidak diakomodir di Renja Sekretariat Daerah 2018 dan adanya kegiatan yang tidak mengacu pada kegiatan yang ada di RKPD.

Dalam RKPD 2018 terdapat 22 Program dan 96 Kegiatan, sedangkan pada Renja Sekretariat Daerah terdapat 22 Program dan 95 Kegiatan. Matrik diatas menunjukkan bahwa 22 Program dalam Renja Sekretariat Daerah mengacu pada 22 Program yang tertuang dalam RKPD. Hal ini menandakan tingkat konsistinsi yang *sangat baik*.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan kegiatan antara RKPD dengan Renja dapat dilihat pada gambar 5.4 sebagai berikut :



Gambar 5.4 Diagram Keterkaitan antara kegiatan RKPD dan Kegiatan RENJA

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 96 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD tersebut ada 95 kegiatan (98,95%) yang diakomodir dalam Renja Sekretariat Dearah tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistinsi yang *sangat baik*, sedangkan sisanya sebanyak 1 kegiatan (1,05%) tidak diakomodir. Dari gambar 5.4 juga terlihat ada 95 kegiatan yang ada di Renja Sekretariat Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan RKPD sebesar 100,00% artinya menunjukkan tingkat konsistinsi yang *sangat baik*.

Untuk menganalisis konsistensi indikator kinerja program/kegiatan antara RKPD dan Renja dapat dilihat berdasarkan tabel 5.6.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Tabel 5.6 Matriks Konsolidasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan antara RKPD dan RENJA

NO.	RKPD			NO.	RENJA			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		YA	TIDAK	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
<b>1.</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>			<b>1.</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>					
1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	Penerbitan Tata Kelola Bidang Tanah Perkantoran	100 Persen	1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	Penerbitan Tata Kelola Bidang Tanah Perkantoran	100 Persen	√		
		Data Bidang Tanah Perkantoran	2 Kec			Data Bidang Tanah Perkantoran	2 Kec	√		
<b>2.</b>	<b>Program penataan penguasaan; pemilihan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>			<b>2.</b>	<b>Program penataan penguasaan; pemilihan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>					
2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	Penertiban Administrasi Pertanahan	100 Persen	2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	Penertiban Administrasi Pertanahan	100 Persen	√		
		Data Bidang Tanah	2.991 Ha			Data Bidang Tanah	2.991 Ha	√		
2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	Pengendalian, Pengawasan, Pemanfaatan Lahan Dalam Pengembangan Pembangunan	100 Persen	2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	Pengendalian, Pengawasan, Pemanfaatan Lahan Dalam Pengembangan Pembangunan	100 Persen	√		
		Tertibnya Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin	60 Sertifikat			Tertibnya Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin	60 Sertifikat	√		
2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	Penertiban Administrasi Pertanahan	100 Persen	2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	Penertiban Administrasi Pertanahan	100 Persen	√		
		Data Bidang Tanah	3.546 Ha			Data Bidang Tanah	3.546 Ha	√		
2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	Penertiban Administrasi Pertanahan	100 Persen	2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	Penertiban Administrasi Pertanahan	100 Persen	√		
		% Data Bidang Tanah	1.986 Ha			% Data Bidang Tanah	1.986 Ha	√		
<b>3.</b>	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>			<b>3.</b>	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>					
3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Informasi dan Pemetaan Permasalahan Pertanahan di Kab. Siak	100 Persen	3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Informasi dan Pemetaan Permasalahan Pertanahan di Kab. Siak	100 %	√		
		Terpetanya Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Siak	5 Kasus			Terpetanya Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Siak	5 Kasus	√		
<b>4.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>4.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√		
		Jenis dan jumlah perangko	10.15000 Materai			Jenis dan jumlah perangko	Materai 6000 =	√		

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET	
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK		
		materai dan perangko surat			materai dan perangko surat	10000 lmbp 1500 perangko pos			
4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	223.631 Liter,Air,listrik,telpon			Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	223.600 liter BBM, 8 jasa air; 7 jasa listrik; 16 jasa telepon	√	
4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8,6,4,7 jasa dekorasi,sewa gedung,tenda,saud sistem dan alat elektronik lainnya			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis jasa dekorasi, 6 jenis jasa sewa gedung/kantor/tempat, 4 jenis sewa tenda dan perlengkapannya, 7 jenis sewa sound system dan alat elektronik lainnya	√	
4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	42 Unit			Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	1 pajak bumi dan bangunan, 41 unit asuransi mobil	√	
4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85 Belanja perpanjang STNK			Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	83 belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	√	
4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah jasa kebersihan kantor	9 Kegiatan			Jumlah jasa kebersihan kantor	4 kgtn belanja bahan pengharum ruangan, 5 jenis jasa kebersihan kantor	√	
4.7	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.7	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET	
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK		
		Jumlah alat tulis kantor	249 Jenis Alat Tulis kantor		Jumlah alat tulis kantor	249 jenis alat tulis kantor	√		
4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	67,6 Jenis		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	67 jenis cetak, 6 jenis penggandaan	√		
4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80 Jenis			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80 jenis komponen instalasi listrik	√	
4.10	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.10	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah dan jenis Penyediaan makanan dan minuman	11 Jenis			Jumlah dan jenis Penyediaan makanan dan minuma	1 belanja makanan dan minuman rapat, 8 jenis belanja makanan dan minuman tamu, 19.000 porsi makanan dan minuman tamu, 2 jenis belanja makanan dan minuman kegiatan	√	
4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Ls			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Ls	√	
4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah tenaga keamanan	20 Org			Jumlah tenaga keamanan	20 orang	√	
4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah tenaga administrasi Kantor	178 Orang			Jumlah tenaga administrasi Kantor	178 orang	√	
4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah Kunjungan Kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan Dalam Daerah	1 Ls			Jumlah Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan Dalam Daerah	1 Ls	√	
4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Tertib Administrasi dan Teknis Kantor Pertanahan	100 %	4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis	Peningkatan Tertib Administrasi dan Teknis Kantor Pertanahan	100 %	√	

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET	
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK		
	teknis pertanahan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Teknis Kantor Pertanahan	100 %		pertanahan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Teknis Kantor Pertanahan	100 %	√	
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
5.1	Pengadaan mobil jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.1	Pengadaan mobil jabatan	Cakupan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	√	
		Jumlah pengadaan mobil jabatan	3 Unit			Jumlah pengadaan mobil jabatan	3 Unit	√	
5.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Cakupan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	√	
		Jumlah kendaraan Dinas	4 Unit			Jumlah kendaraan Dinas	4 Unit	√	
5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Cakupan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%		
		Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tidak Ada			Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tidak Ada	√	
5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	1 Jenis			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	1 Jenis perlengkapan gedung kantor	√	
5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas	2 Jenis			Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas	2 Jenis peralatan rumah jabatan/dinas	√	
5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	20 Unit			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	20 unit dispenser	√	
5.7	Pengadaan mebeleur	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.7	Pengadaan mebeleur	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah dan jenis mebeleur	4 Jenis			Jumlah dan jenis mebeleur	4 Jenis Meubeler	√	
5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah dan jenis Pembangunan Tempat Parkir, Taman (landscape)	1 Pemeliharaan			Jumlah dan jenis Pembangunan Tempat Parkir, Taman (landscape)	1 pemeliharaan taman;halaman	√	
5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√	
		Jumlah dan jenis Komputer;	45 Unit			Jumlah dan jenis Komputer;	20 unit Komputer;.	√	

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET		
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK			
		Printer dan kelengkapannya			Printer dan kelengkapannya	10 notebook, 15 Printer				
5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	Tidak Ada	ASN SIAK		√	
		Jumlah Penyediaan Tanda Pengenal	1500 Lembar			Tidak Ada	ASN SIAK		√	
5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	Terpublikasinya Kegiatan Event Nasional, Propinsi dan Kab. Siak	100 Persen	5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	Terpublikasinya Kegiatan Event Nasional, Propinsi dan Kab. Siak	100%	√		
		Persentase Sarana Publikasi Kegiatan Event Nasional, Propinsi dan Kab. Siak	100 Persen			Persentase Sarana Publikasi Kegiatan Event Nasional, Propinsi dan Kab. Siak	100%	√		
5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√		
		Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin rumah jabatan	5 Jenis			Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin rumah jabatan	2 jenis belanja bahan pakan ternak, 3 kegiatan pemeliharaan	√		
5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√		
		Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Kegiatan			Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 kgtm belanja bahan kelengkapan pertukangan, 1 belanja bahan/bibit tanaman, 1 kegiatan pemeliharaan	√		
5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√		
		Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	64.400 dan 11 Liter,Unit			Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	64.400 liter belanja BBM, 11 unit mobil jabatan	√		
5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	√		
		Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.520,38,7 Liter,Unit, Jenis			Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.520 liter belanja bahan bakar minyak, 38 unit jasa service kendaraan bermotor, 7 jenis belanja penggantian suku cadang kendaraan	√		

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET	
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK		
5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	bermotor			
		Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	18 Jenis			100 Persen	√		
5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	100 Persen	√		
		Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	24 Jenis			24 jenis pemeliharaan peralatan kantor	√		
5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	100 Persen	√		
		Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	2 Kegiatan			2 kegiatan pemeliharaan	√		
5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	100 Persen			
		Jumlah dan jenis Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Jenis			1 jenis Rehabilitasi sedang/berat rumah Muspida	√		
5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100 Persen	√		
		Jumlah dan jenis Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Jenis			2 jenis rehab gedung kantor Bupati	√		
5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	100 Persen	√		
		Jumlah Pembangunan Pagar, Taman, Tempat Parkir	1 Pagar, Tempat Parkir			1 pagar, taman, tempat parkir	√		
5.22	Renovasi Gedung	Meningkatkan Sarana dan	100 Persen	5.22	Renovasi Gedung	Meningkatkan Sarana dan	100%	√	

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET	
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK		
	Kantor di Wilayah Kecamatan	Prasana Aparatur Renovasi Gedung Kantor Veteran dan Gedung Serbaguna Kaec. Sungai Mandau		Kantor di Wilayah Kecamatan	Prasana Aparatur Renovasi Gedung Kantor Veteran dan Gedung Serbaguna Kaec. Sungai Mandau	Tidak Ada		√	
5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Sarana dan Prasana Aparatur	100 Persen	5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Sarana dan Prasana Aparatur	100%	√	
		terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna di Kecamatan Siak dan Kelurahan Mempura	100 Persen			terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna di Kecamatan Siak dan Kelurahan Mempura	100%	√	
5.24	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	beroperasinya unit layanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	100 persen	5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	beroperasinya unit layanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	1 ULP dan 3 pokja		√
		Sistem E-Procurement yang optimal	1500 Lembar			Sistem E-Procurement yang optimal	100 persen		√
<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>				
6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Tingkat kepatuhan aparatur	100 Persen	6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Tingkat kepatuhan aparatur	100 Persen	√	
		Jumlah Pengadaan Pakaian Kedaerahan	250 Belanja			Jumlah Pengadaan Pakaian Kedaerahan	250 belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	√	
6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	Tingkat kepatuhan aparatur	100 Persen	6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	Tingkat kepatuhan aparatur	100 Persen	√	
		Jumlah pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	4 Jenis			Jumlah pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	4 jenis pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	√	
6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	Tingkat kepatuhan aparatur	100 Persen	6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	Tingkat kepatuhan aparatur	100 Persen	√	
		Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	4 Belanja			Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	2 belanja jasa dekorasi, 1 belanja sewa tenda, 1 belanja sewa sound system	√	
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terwujudnya Pedoman Pelaksanaan APBD yang lebih baik	1 Kegiatan	7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terwujudnya Pedoman Pelaksanaan APBD yang lebih baik	1 Kegiatan	√	
		Terlaksananya Sosialisasi No 70 Tahun 2012	1 Kegiatan			Terlaksananya Sosialisasi No 70 Tahun 2012	1 Kegiatan	√	
7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan	Terwujudnya profesionalisme aparatur & stakeholder dibidang pengadaan barang/jasa	220 Aparatur+Rekanan	7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan	Terwujudnya profesionalisme aparatur & stakeholder dibidang pengadaan barang/jasa	220 Aparatur+Rekanan	√	
		Admin RUP, Pejabat	1 Kegiatan			Admin RUP, Pejabat	1 kegiatan	√	

NO.	RKPD			NO.	RENJA			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		YA	TIDAK	
	Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan			Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan				
7.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	7.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	√		
		Tersedianya Informasi Pelayanan E-Paten	100%			Tersedianya Informasi Pelayanan E-Paten	100%	√		
7.4	Fasilitasi Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	Terwujudnya Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	100 persen	7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	Tidak Ada	45 OPD		√	
		Tersedianya Sistem Laporan LAPOR!SP4N	1500 Lembar			Tidak Ada	45 OPD		√	
<b>8.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>8.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					
8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terciptanya Koordinasi kegiatan pembangunan	54 OPD	8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terciptanya koordinasi kegiatan pembangunan	54 OPD	√		
		Laporan RFK OPD	54 OPD			Laporan RFK OPD	54 OPD	√		
8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tercapainya pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah	100 Persen	8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tercapainya pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah	100%	√		
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016	100%			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016	100%	√		
8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	Pengendalian Kegiatan APBD	100 Persen	8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	Pengendalian Kegiatan APBD	100 Persen	√		
		Pelaksanaan kegiatan APBD berjalan dengan baik	100 Persen			Pelaksanaan kegiatan APBD berjalan dengan baik	100 Persen	√		
8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	Tidak Ada	1 Dok	8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	Tidak Ada	1 Dok		√	
		Tidak Ada	1 Dok			Tidak Ada	1 Dok		√	
8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	Terarah dan Terkendalinya Kegiatan Penyusunan Laporan DAK dan Tugas Pembantuan	100 persen	8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	Terarah dan Terkendalinya Kegiatan Penyusunan Laporan DAK dan Tugas Pembantuan	90%		√	
		Laporan DAK	1500 Lembar			Laporan DAK	90%		√	
8.6	Pelaporan Implementasi	Terselenggaranya Pemantauan, Evaluasi dan	100 persen	8.6	Pelaporan Implementasi	Terselenggaranya Pemantauan, evaluasi dan	100%	√		

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	Laporan Implementasi RANHAM Kab. Siak		Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	laporan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak			
		Terwujudnya Terselenggaranya Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Implementasi RANHAM Kab. Siak	1500 Lembar		Terwujudnya Pemantauan, evaluasi dan laporan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	4 Dokumen		√
<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>		<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>				
9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kemasyarakatan di Kecamatan	100 Persen	9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kemasyarakatan di Kecamatan	100%	√
		Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah Kecamatan	1 Ls			Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah Kecamatan	1 Ls	√
9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kemasyarakatan di Kecamatan	100 Persen	9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kemasyarakatan di Kecamatan	100%	√
		Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Ls			Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Ls	√
9.3	Fasilitasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	Peningkatan pengendalian dan evaluasi kebijakan	100 Persen	9.3	Fasilitasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	Peningkatan pengendalian dan evaluasi kebijakan	100%	√
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten	100 Persen			Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten	100%	√
9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	Tercapainya rapat forum komunikasi pimpinan daerah (APKASI)	100 Persen	9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	Tercapainya rapat forum komunikasi pimpinan daerah (APKASI)	100%	√
		Terlaksananya Asosiasi Pimpinan Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI)	100 Persen			Terlaksananya Asosiasi Pimpinan Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI)	100%	√
9.5	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Personalia Protokol KDH/WKDH Kab. Siak	100 Persen	9.5	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Personalia Protokol KDH/WKDH Kab. Siak	100%	√
		Persentase Protokol Kedinasan Kepala Daerah	100 Persen			Persentase Protokol Kedinasan Kepala Daerah	100%	√

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
		dan Wakil Kepala Daerah			dan Wakil Kepala Daerah			
9.6	Fasilitasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya penyelesaian perkara Perdata & TUN	100 Persen	9.6	Fasilitasi Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	100%	√	
		Terlaksananya proses penanganan perkara Perdata & TUN	5 Pekara		Terlaksananya proses penanganan perkara Perdata & TUN	5 perkara	√	
9.7	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Terwujudnya fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi warga miskin	100 Persen	9.7	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	100%	√	
		Terlaksananya proses pemberian bantuan hukum bagi wargamiskin Kab. Siak	15 Pekara		Terlaksananya proses pemberian bantuan hukum bagi wargamiskin Kab. Siak	15 Perkara	√	
<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>		<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>				
10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	100 Persen	10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	√	
		Tidak Ada	100 Persen			Tidak Ada	100%	√
10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tidak Ada	Jabatan STRUKTURAL	10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	JABATAN STRUKTURAL	√	
		Tidak Ada	Jabatan STRUKTURAL			Tidak Ada	JABATAN STRUKTURAL	√
<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>		<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>				
11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	Penataan Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	100%	√	
		Jumlah Peraturan daerah yang dikeluarkan atau disahkan	20 Perda			Jumlah Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau disahkan	20 Perda	√
11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya Publikasi Peraturan Perundang-undangan/Perda Kab. Siak	100 Persen	11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	100%	√	
		Pembuatan Website JDIH dan Peggandaan Perda	400,1 Buku,Website			Pembuatan Website JDIH dan Peggandaan Perda	400 buku & 1 website	√
11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	Tertatanya Peraturan Perundang-undangan melalui Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Daerah	100 Persen	11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	100%	√	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Koordinasi	5 Kali			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Koordinasi	5 kali koordinasi	√
<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>		<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>				
12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan	Tercapaiannya pengembangan sistem penilaian kinerja	100 Persen	12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	100%	√	

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
	terbaik	kelembagaan aparatur Camat dan Kecamatan Terbaik			kelembagaan aparatur Camat dan Kecamatan Terbaik	100%	√	
<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>		<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>				
13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	5 BUMD	13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	5 BUMD	√
		Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	5 BUMD			Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	5 BUMD	√
<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>		<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>				
14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	Tidak Ada	100 Persen	14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	Tidak Ada	100 Persen	√
		Tidak Ada	100 Persen			Tidak Ada	Tidak Ada	√
14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	Tidak Ada	45 OPD	14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	Tidak Ada	45 OPD	√
		Tidak Ada	45 OPD			Tidak Ada	45 OPD	√
14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	Beroperasinya Unit Layanan Pengadaan	Tidak Ada	14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	beroperasinya unit layanan pengadaan	1 unit	√
		Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Elektronik	Tidak Ada			jumlah layanan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik	745.319 pengunjung website	√
<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>		<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>				
15.1	Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	100 Persen	15.1	Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	100 Persen	√
		Tidak Ada	100 Persen			Tidak Ada	Tidak Ada	√
15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	Tidak Ada	100 Persen	15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	Tidak Ada	100 Persen	√
		Tidak Ada	100 Persen			Tidak Ada	Tidak Ada	√
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>		<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>				
16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	Tidak Ada	14 Kecamatan	16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	Tidak Ada	14 Kec	√
		Tidak Ada	14 Kecamatan			Tidak Ada	Tidak Ada	√
16.2	Fasilitasi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	Tidak Ada	44 Orang	16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	Tidak Ada	44 Orang	√
		Tidak Ada	44 Orang			Tidak Ada	Tidak Ada	√

NO.	RKPD		NO.	RENJA		KONSISTENSI		KET	
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK		
16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	100 Persen	16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	100 %		√
		Tidak Ada	100 Persen			Tidak Ada	Tidak Ada		
16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	Terlaksananya Safari Jumat dan Ramadhan	14 Kecamatan	16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	14 Kecamatan		√
		Pemahaman dan Pengamalan Agama	14 Kecamatan			Tidak Ada	Tidak Ada		
16.5	Pelaksanaan dan Fasilitas Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional	14 Kecamatan	16.5	Pelaksanaan dan Fasilitas Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Tidak Ada	14 Kecamatan-16 Orang		√
		Terwujudnya Pelaksanaan dan Fasilitas POSPENAS	14 Kecamatan			Tidak Ada	Tidak Ada		
<b>17.</b>	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>		<b>17.</b>	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>					
17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	Tersedianya data pendukung dan pelacakan dalam rangka penegasan batas wilayah	100 Persen	17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	Tersedianya data pendukung dan pelacakan dalam rangka penegasan batas wilayah	100%	√	
		Penegasan Batas yang telah disepakati	1 Sigmen			Penegasan Batas yang telah disepakati	1 Segmen		
17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	Tidak Ada	100 Persen	17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	Tidak Ada	100 %		√
		Tidak Ada	1 Sigmen			Tidak Ada	1 Segmen		
<b>18.</b>	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>		<b>18.</b>	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>					
18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	120 Orang	18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	120 Org	√	
		Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	120 Orang			Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	120 Org		

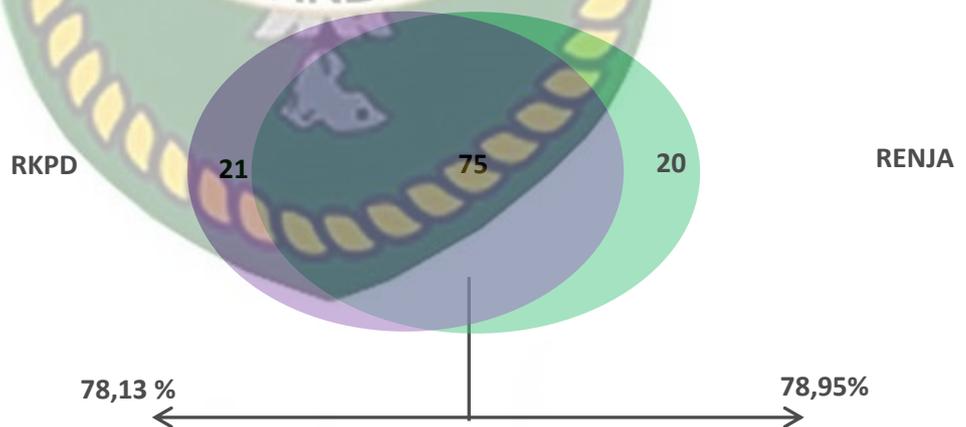
NO.	RKPD			NO.	RENJA			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		YA	TIDAK	
18.2	Fasilitasi Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama dan koordinasi permasalahan ekonomi dan keuangan	15 Kali Pertemuan	18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama dan koordinasi permasalahan ekonomi dan keuangan	15 Kali Pertemuan	√		
		Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama dan koordinasi permasalahan ekonomi dan keuangan	15 Kali Pertemuan			Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama dan koordinasi permasalahan ekonomi dan keuangan	15 Kali Pertemuan	√		
19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>			19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>					
19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	12 Eksemplar/Media	19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	12 Eksemplar/Media	√		
		Jumlah Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	12 Eksemplar/Media			Jumlah Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	12 Eksemplar/Media			
19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	Terkumpulnya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah Serta Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	100 Persen	19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	Terkumpulnya Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah Serta Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	100%	√		
		Persentase Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah Serta Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	100 Persen			Persentase Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah Serta Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	100%	√		
19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	Terdapatnya Event-event Kehumasan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tidak Ada	19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	Terdapatnya Ivent-Ivent kehumasan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	100%		√	
		Persentase Event-event Kehumasan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tidak Ada			Persentase Ivent-Ivent kehumasan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	100%		√	
20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>			20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>					
20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin	7724 RTS-PM	20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin	7724 RTS-PM	√		
		Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin	7724 RTS-PM			Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin	7724 RTS-PM	√		
21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>			21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>					
21.1	Penyusunan standar	tersedianya buku	1 Kegiatan	21.1	Penyusunan standar	tersedianya buku	1 Kegiatan	√		

NO.	RKPD			NO.	RENJA			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN			PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		YA	TIDAK	
	satuan harga	standarisasi honorarium dan biaya lainnya			satuan harga	standarisasi honorarium dan biaya lainnya				
		Standarisasi honorarium dan biaya lainnya	200 Buku			Standarisasi honorarium dan biaya lainnya	200 Buku	√		
21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	tersedianya buku standar satuan harga	1 Kegiatan	21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	tersedianya buku standar satuan harga	1 Kegiatan	√		
		Standarisasi satuan harga Kabupaten Siak	200 Buku			Standarisasi satuan harga Kabupaten Siak	200 Buku	√		
21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPR	Penyusunan dan pengendalian APBD	1 Kegiatan	21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPR	Penyusunan dan pengendalian APBD	1 Kegiatan	√		
		Laporan Monitoring dan Evaluasi	100 Persen			Laporan Monitoring dan Evaluasi	100%	√		
21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	Tercapainya Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	100 Persen	21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	Tidak Ada	1 Segmen		√	
		Terwujudnya Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	1 Sigen			Tidak Ada	100%		√	
21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	Terlaksananya Tata Kelola Administrai Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah	1 Dokumen	21.5	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		√	
		Terlaksananya Desk Pilkada	1 Dokumen			Tidak Ada	Tidak Ada		√	
<b>22.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>			<b>22.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>					
22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	Terwujudnya Pedoman Pelaksanaan APBD yang lebih baik	100%	22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	Terwujudnya Pedoman Pelaksanaan APBD yang lebih baik	100%	√		
		Terbentuknya Peraturan Bupati	100%			Terbentuknya Peraturan Bupati	100%	√		

Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa dalam dokumen RKPD terdapat 96 kegiatan, dengan beberapa indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tidak terisi. Sedangkan dalam dokumen Renja terdapat 95 kegiatan dengan beberapa indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tidak terisi.

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa penyusunan indikator kinerja dalam RKPD dan Renja kurang konsisten, terbukti dengan masih adanya kegiatan yang tidak mempunyai indikator kinerja sehingga kegiatan tersebut tidak dapat diukur.

Keterkaitan indikator kinerja program RKPD dan Renja dapat dilihat pada gambar 5.5 dibawah ini:



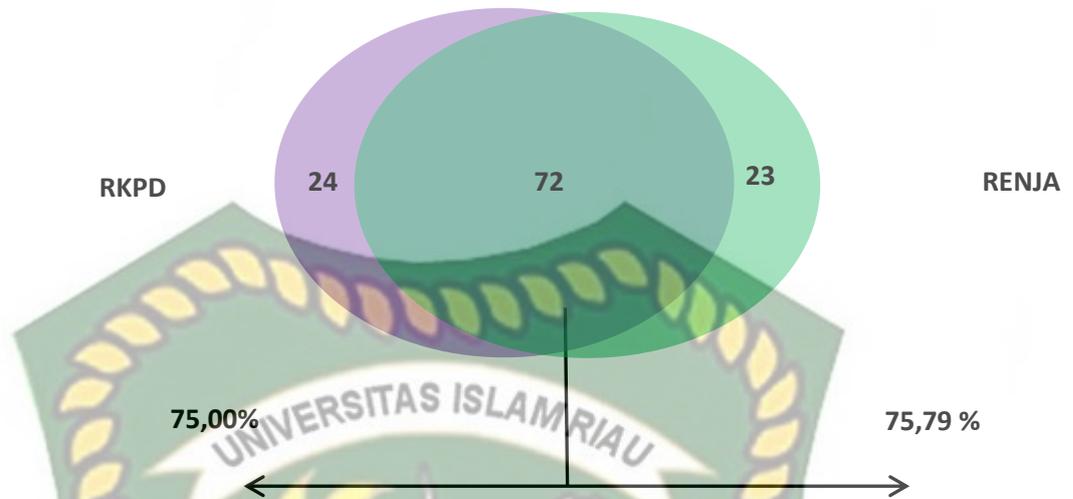
Gambar 5.5 Diagram Keterkaitan indikator kinerja program pada kegiatan RKPD dengan indikator kinerja Program pada kegiatan RENJA.

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 96 indikator program yang tercantum dalam RKPD tersebut ada 75 indikator program (78,13%) yang sama dalam Renja Sekretariat Daerah tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *cukup baik*, sedangkan sisanya sebanyak 21 indikator program (21,87%) tidak sinkron. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 95 indikator program yang ada di Renja Sekretariat Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan RKPD sebesar 78,95% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *cukup baik*, sedangkan 20 kegiatan lainnya (21,05%), penyusunannya tidak mempedomani RKPD tersebut.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pejabat perencana Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, maka didapatkan alasan kenapa tingkat konsistensi yang buruk dapat terjadi :

1. Ketidakterisian indikator kinerja program dan target pada dokumen RKPD dan Renja.
2. Adanya perubahan indikator kinerja program dan target pada dokumen Renja yang dianggap lebih benar dibandingkan dengan yang tercantum dalam dokumen RKPD.
3. Adanya perbedaan data untuk pengambilan target dari indikator tersebut.

Selanjutnya keterkaitan indikator kinerja kegiatan RKPD dan Renja dapat dilihat pada gambar 5.6 dibawah ini:



Gambar 5.6 Diagram Keterkaitan Indikator Kinerja Kegiatan RKP Dengan Indikator Kinerja Kegiatan RENJA

Berdasarkan gambar 5.6 di atas menunjukkan bahwa dari 96 indikator kegiatan yang tercantum dalam RKP tersebut ada 72 indikator kegiatan (75,00%) yang sama dalam Renja Sekretariat Daerah tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *cukup baik*, sedangkan sisanya sebanyak 24 indikator kegiatan (25,00%) tidak sinkron. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 95 indikator kegiatan yang ada di Renja Sekretariat Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan RKP sebesar 75,79% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *cukup baik*, sedangkan 23 kegiatan lainnya (24,21%), penyusunannya tidak mempedomani RKP tersebut.

## 5.2 Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran

### 5.2.1 Analisis Konsistensi Renja dan PPAS

Untuk menganalisis konsistensi dokumen Renja dan PPAS dapat dilihat dari tabel 5.7.

Tabel 5.7 Matriks Konsolidasi Program/Kegiatan antara RENJA Sekretariat Daerah dan PPAS Tahun 2018

NO.	RENJA	NO.	PPAS	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	√		
1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	√		
2.	<b>Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	2.	<b>Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	√		
2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	√		
2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	√		
2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	√		
2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	√		
3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	√		
3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	√		
4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	√		
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	√		
4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	√		
4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	√		
4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	√		
4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	√		
4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	√		
4.7	Penyediaan alat tulis kantor	4.7	Penyediaan alat tulis kantor	√		
4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√		
4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	√		
4.10	Penyediaan makanan dan minuman	4.10	Penyediaan makanan dan minuman	√		
4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	√		
4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	√		
4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	√		

NO.	RENJA	NO.	PPAS	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	√		
4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	√		
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	√		
5.1	Pengadaan mobil jabatan	5.1	Tidak Ada		√	
5.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	5.2	Tidak Ada		√	
5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	√		
5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	√		
5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	√		
5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	√		
5.7	Pengadaan mebeleur	5.7	Pengadaan mebeleur	√		
5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	√		
5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	√		
5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	√		
5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	√		
5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	√		
5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	√		
5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	√		
5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	√		
5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	√		
5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	√		
5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	√		
5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	√		
5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	√		
5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	√		
5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	√		
5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	√		
5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	√		
<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	√		
6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	√		
6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	√		
6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	√		
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	√		
7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	√		
7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	√		

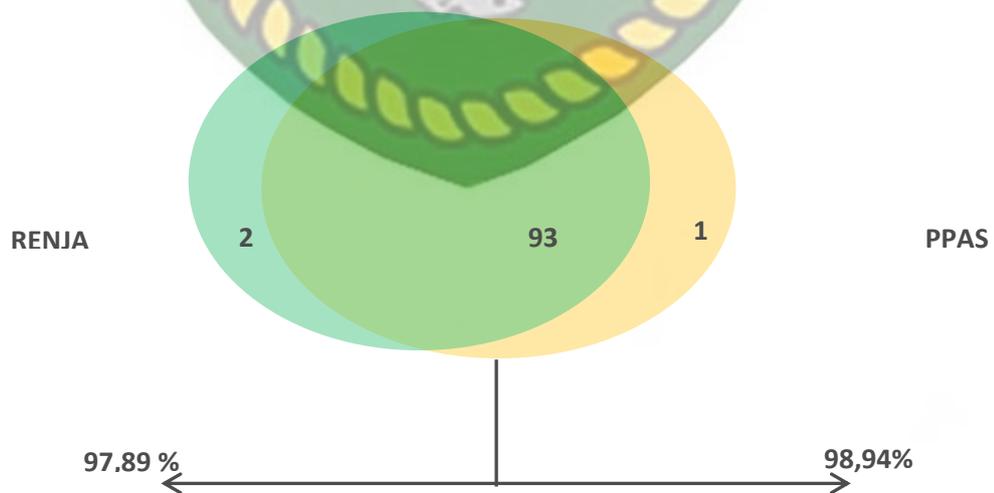
NO.	RENJA	NO.	PPAS	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	√		
7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	√		
<b>8.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>8.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	√		
8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	√		
8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	√		
8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	√		
8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	√		
8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	√		
8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	√		
<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	√		
9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	√		
9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	√		
9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	√		
9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	√		
9.5	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.5	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	√		
9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	√		
9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	√		
<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	√		
10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	√		
10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	√		
<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	√		
11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	√		
11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	√		
11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	√		
<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	√		
12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	√		
<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	√		
13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	√		
<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	√		
14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	√		
14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	√		
14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	√		

NO.	RENJA	NO.	PPAS	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	√		
15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	√		
15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	√		
16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	√		
16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	√		
16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	√		
16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	√		
16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	√		
16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	√		
17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	√		
17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	√		
17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	√		
18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	√		
18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	√		
18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	√		
19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	√		
19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	√		
19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	√		
19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	√		
20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	√		
20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	√		
21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	√		
21.1	Penyusunan standar satuan harga	21.1	Penyusunan standar satuan harga	√		
21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	√		
21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismom TEPR	21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismom TEPR	√		
21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	√		
21.5	Tidak Ada	21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)		√	
22.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>	22.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>	√		
22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	√		

Dari tabel 5.7 di atas dapat dilihat bahwa pada penyusunan perencanaan kegiatan pada PPAS tahun 2018 belum sepenuhnya konsisten terhadap Renja Sekretariat Daerah 2018. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan yang ada di Renja Sekretariat Daerah 2018 tidak diakomodir di PPAS dan adanya kegiatan di PPAS yang tidak mengacu pada kegiatan yang ada di Renja.

Dalam PPAS 2018 terdapat 22 Program dan 94 Kegiatan, sedangkan pada Renja Sekretariat Daerah terdapat 22 Program dan 95 Kegiatan. Matrik diatas menunjukkan bahwa 22 Program dalam PPAS mengacu pada 22 Program yang tertuang dalam Renja Sekretariat Daerah. Hal ini menandakan tingkat konsistensi Program yang *sangat baik*.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan kegiatan antara Renja dengan PPAS dapat dilihat pada gambar 5.7 sebagai berikut :



Gambar 5.7 Diagram keterkaitan Kegiatan Renja dan PPAS

Dari gambar 5.7 menunjukkan bahwa dari 95 kegiatan yang direncanakan dalam Renja tersebut ada 93 kegiatan (97,89%) yang diakomodir dalam PPAS tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*, sedangkan sisanya sebanyak 2 kegiatan (2,11%) kegiatan tidak diakomodir. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 94 kegiatan yang ada di PPAS 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan Renja sebesar 96,94% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*, sedangkan 1 kegiatan lainnya (1,06%) tidak konsisten terhadap Renja tersebut.

Konsistensi indikator kinerja kegiatan Renja dan PPAS dilihat berdasarkan tabel 5.8 berikut.

Tabel 5. 8 Matrik konsolidasi Indikator Kinerja kegiatan Renja dan PPAS

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
<b>1.</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>			<b>1.</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>					
1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	Data Bidang Tanah Perkantoran	2 Kec	1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	Jumlah Peta dan data Spasial Pada Lahan Pemda	1 Kec	√		
<b>2.</b>	<b>Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>			<b>2.</b>	<b>Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>					
2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	Data Bidang Tanah	2.991 Ha	2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	Jumlah lahan masyarakat yang telah di ukur (Luas 1.166 Ha)	1 Kampung		√	
2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	Tertibnya Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin	60 Sertifikat	2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	Jumlah Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak yang telah di Sertifikatkan	50 Persil		√	
2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	Data Bidang Tanah	3.546 Ha	2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	Jumlah Lahan Masyarakat yang Telah diukur (Luas 3.546 Ha)	2 Kampung		√	
2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	% Data Bidang Tanah	1.986 Ha	2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	Jumlah Lahan Masyarakat yang telah diukur (Luas 1.986 Ha)	1 Kampung		√	
<b>3.</b>	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>			<b>3.</b>	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>					
3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terpetanya Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Siak	5 Kasus	3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terpetanya Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Siak	5 Kasus	√		
<b>4.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>4.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jenis dan jumlah peranko materai dan peranko surat	Materai 6000 = 10000 Imbr 1500 peranko pos	4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jenis dan jumlah peranko materai dan peranko surat	10.15000 Materai dan Prangko Pos	√		
4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	223.600 liter, BBM, 8 jasa air; 7 jasa listrik; 16 jasa telepon	4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	223.631 Liter, Air, listrik, telpon	√		

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8,6,4,7 jasa dekorasi,sewa gedung,tenda,saud sistem dan alat elektronik lainnya	4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8,6,4,7 jasa dekorasi,sewa gedung,tenda,saud sistem dan alat elektronik lainnya	√		
4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	1 pajak bumi dan bangunan, 41 unit asuransi mobil	4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	42 Unit	√		
4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	83 belanja perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85 Belanja perpanjang STNK		√	
4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	4 kgtm belanja bahan pengharum ruangan, 5 jenis jasa kebersihan kantor	4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	9 Kegiatan	√		
4.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	249 jenis alat tulis kantor	4.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	249 Jenis Alat Tulis kantor	√		
4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	67 jenis cetak, 6 jenis penggandaan	4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	67,6 Jenis	√		
4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80 jenis komponen instalasi listrik	4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80 Jenis	√		
4.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis Penyediaan makanan dan minuma	11 Jenis	4.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis Penyediaan makanan dan minuman	11 Jenis	√		
4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Ls	4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Ls	√		
4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	20 orang	4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	20 orang	√		
4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi Kantor	178 orang	4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi Kantor	178 orang	√		
4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan Dalam Daerah	1 Ls	4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan Dalam Daerah	1 Ls	√		

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Teknis Kantor Pertanahan	100 %	4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Teknis Kantor Pertanahan	100 %	√		
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
5.1	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	3 Unit	5.1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		√	
5.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas	4 Unit	5.2	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		√	
5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tidak Ada	5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tidak Ada		√	
5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	1 Jenis perlengkapan gedung kantor	5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	1 Jenis	√		
5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas	2 Jenis peralatan rumah jabatan/dinas	5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas	2 Jenis	√		
5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	20 unit	5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	20 Unit	√		
5.7	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur	4 Jenis Meubeler	5.7	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur	4 Jenis	√		
5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	Jumlah dan jenis Pembangunan Tempat Parkir, Taman (lanscape)	1 pemeliharaan taman;halaman	5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	Jumlah dan jenis Pembangunan Tempat Parkir, Taman (lanscape)	1 Pemeliharaan	√		
5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah dan jenis Komputer; Printer dan kelengkapannya	20 unit Komputer; 10 notebook, 15 Printer	5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah dan jenis Komputer; Printer dan kelengkapannya	45 Unit	√		
5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	Tidak Ada	ASN SIAK	5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	Jumlah Penyediaan Tanda Pengenal	1500 Lembar		√	
5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	Persentase Sarana Publikasi Kegiatan Event Nasional, Propinsi dan Kab. Siak	100%	5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	Persentase Sarana Publikasi Kegiatan Event Nasional, Propinsi dan Kab. Siak	100 Persen	√		
5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin rumah jabatan	2 jenis belanja bahan pakan ternak, 3 kegiatan pemeliharaan	5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin rumah jabatan	5 Jenis	√		
5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung	1 kgtn belanja bahan kelengkapan pertukangan,1 belanja	5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung	3 Kegiatan	√		

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
		kantor	bahan/bibit tanaman, 1 kegiatan pemeliharaan			kantor				
5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	64.400 liter belanja BBM, 11 unit mobil jabatan	5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	64.400 dan 11 Liter,Unit	√		
5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.520,38,7 Liter,Unit,Jenis	5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.520,38,7 Liter,Unit,Jenis	√		
5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	18 Jenis	5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	18 Jenis	√		
5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	24 jenis pemeliharaan peralatan kantor	5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	24 Jenis	√		
5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	2 kegiatan pemeliharaan	5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	2 Kegiatan	√		
5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah dan jenis Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 jenis Rehabilitasi sedang/berat rumah Muspida	5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah dan jenis Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Jenis	√		
5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah dan jenis Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 jenis rehab gedung kantor Bupati	5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah dan jenis Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Jenis	√		
5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	Jumlah Pembangunan Pagar, Taman, Tempat Parkir	1 pagar, taman, tempat parkir	5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	Jumlah Pembangunan Pagar, Taman, Tempat Parkir	1 Pagar,Tempat Parkir	√		
5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	Renovasi Gedung Kantor Veteran dan Gedung Serbaguna Kaec. Sungai	Tidak Ada	5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	Renovasi Gedung Kantor Veteran dan Gedung Serbaguna Kaec. Sungai	100 Persen		√	

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
		Mandau				Mandau				
5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna di Kecamatan Siak dan Kelurahan Mempura	100%	5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna di Kecamatan Siak dan Kelurahan Mempura	100 Persen	√		
5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	Sistem E-Procurement yang optimal	100 persen	5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	Sistem E-Procurement yang optimal	1500 Lembar		√	
<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>					
6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kedaerahan	250 belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kedaerahan	250 Belanja	√		
6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	4 jenis pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	4 Jenis	√		
6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	2 belanja jasa dekorasi, 1 belanja sewa tenda, 1 belanja sewa sound system	6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	4 Belanja	√		
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi No 70 Tahun 2012	1 Kegiatan	7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi No 70 Tahun 2012	1 Kegiatan	√		
7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	Admin RUP, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	1 Kegiatan	7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	Admin RUP, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	1 Kegiatan	√		
7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	Tersedianya Informasi Pelayanan E-Paten	100%	7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	Tersedianya Informasi Pelayanan E-Paten	100 Persen	√		
7.4	Pengelolaan Sistem LAPORISP4N	Tidak Ada	45 OPD	7.4	Pengelolaan Sistem LAPORISP4N	Tersedianya Sistem Laporan LAPORISP4N	1500 Lembar		√	
<b>8.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>8.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					
8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan RFK OPD	54 OPD	8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan RFK	54 OPD	√		
8.2	Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan	100%	8.2	Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan	100 Persen	√		

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016				
8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	Pelaksanaan kegiatan APBD berjalan dengan baik	100 Persen	8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	Pelaksanaan kegiatan APBD berjalan dengan baik	100 Persen	√		
8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	Tidak Ada	1 Dokumen	8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	Tidak Ada	1 Dokumen		√	
8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	Laporan DAK	90%	8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	Laporan DAK	77 Buku		√	
8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	Terwujudnya Pemantauan, evaluasi dan laporan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	4 Dokumen	8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	Terwujudnya Terselenggaranya Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Implementasi RANHAM Kab. Siak	1500 Lembar		√	
<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>			<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>					
9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah Kecamatan	1 Ls	9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah Kecamatan	1 Ls	√		
9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Ls	9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Ls	√		
9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten	100%	9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten	100 Persen	√		
9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	Terlaksananya Asosiasi Pimpinan Kepala Daerah Seluruh Indonesia	100%	9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	Terlaksananya Asosiasi Pimpinan Kepala Daerah Seluruh Indonesia	100 Persen	√		

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
		(APKASI)				(APKASI)				
9.5	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	9.5	Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Protokol Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	√		
9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya proses penanganan perkara Perdata & TUN	5 perkara	9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya proses penanganan perkara Perdata & TUN	5 Pekara	√		
9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Terlaksananya proses pemberian bantuan hukum bagi wargamiskin Kab. Siak	15 Perkara	9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Terlaksananya proses pemberian bantuan hukum bagi wargamiskin Kab. Siak	15 Pekara	√		
<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>			<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>					
10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	100%	10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	100 Persen		√	
10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tidak Ada	JABATAN STRUKTURAL	10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tidak Ada	1500 Lembar		√	
<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>			<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>					
11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang dikeluarkan atau disahkan	20 Perda	11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan daerah yang dikeluarkan atau di sahkan	20 Perda	√		
11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Pembuatan Website JDIH dan Penggandaan Perda	400 buku & 1 website	11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Pembuatan Website JDIH dan Penggandaan Perda	400,1 Buku,Website	√		
11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Koordinasi	5 kali koordinasi	11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Koordinasi	5 Kali	√		
<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>			<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>					
12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	Camat dan Kecamatan Terbaik	100%	12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	Camat dan Kecamatan Terbaik	100%	√		
<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>			<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>					
13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	5 BUMD	13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	5 BUMD	√		
<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>			<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>					
14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	Tidak Ada	Tidak Ada	14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	Tidak Ada	100 Persen		√	

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	Tidak Ada	45 OPD	14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	Tidak Ada	45 OPD		√	
14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	jumlah layanan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik	745.319 pengunjung website	14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Elektronik	1500 Pengunjung		√	
<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>			<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>					
15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	Tidak Ada	15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	100 Persen		√	
15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	Tidak Ada	Tidak Ada	15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	Tidak Ada	100 Persen		√	
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>			<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>					
16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	Tidak Ada	Tidak Ada	16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	Tidak Ada	14 Kecamatan		√	
16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	Tidak Ada	Tidak Ada	16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	Tidak Ada	44 Orang		√	
16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	Tidak Ada	16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	100 Persen		√	
16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	Tidak Ada	16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	Pemahaman dan Pengamalan Agama	14 Kecamatan		√	
16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Tidak Ada	Tidak Ada	16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Terwujudnya Pelaksanaan dan Fasilitasi POSPENAS	14 Kecamatan		√	
<b>17.</b>	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>			<b>17.</b>	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>					
17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	Penegasan Batas yang telah disepakati	1 Segmen	17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	Penegasan Batas yang telah disepakati	1 Segmen	√		
17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	Tidak Ada	1 Segmen	17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	Tidak Ada	1 Segmen		√	
<b>18.</b>	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>			<b>18.</b>	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>					
18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian,	120 Org	18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian,	120 Org	√		

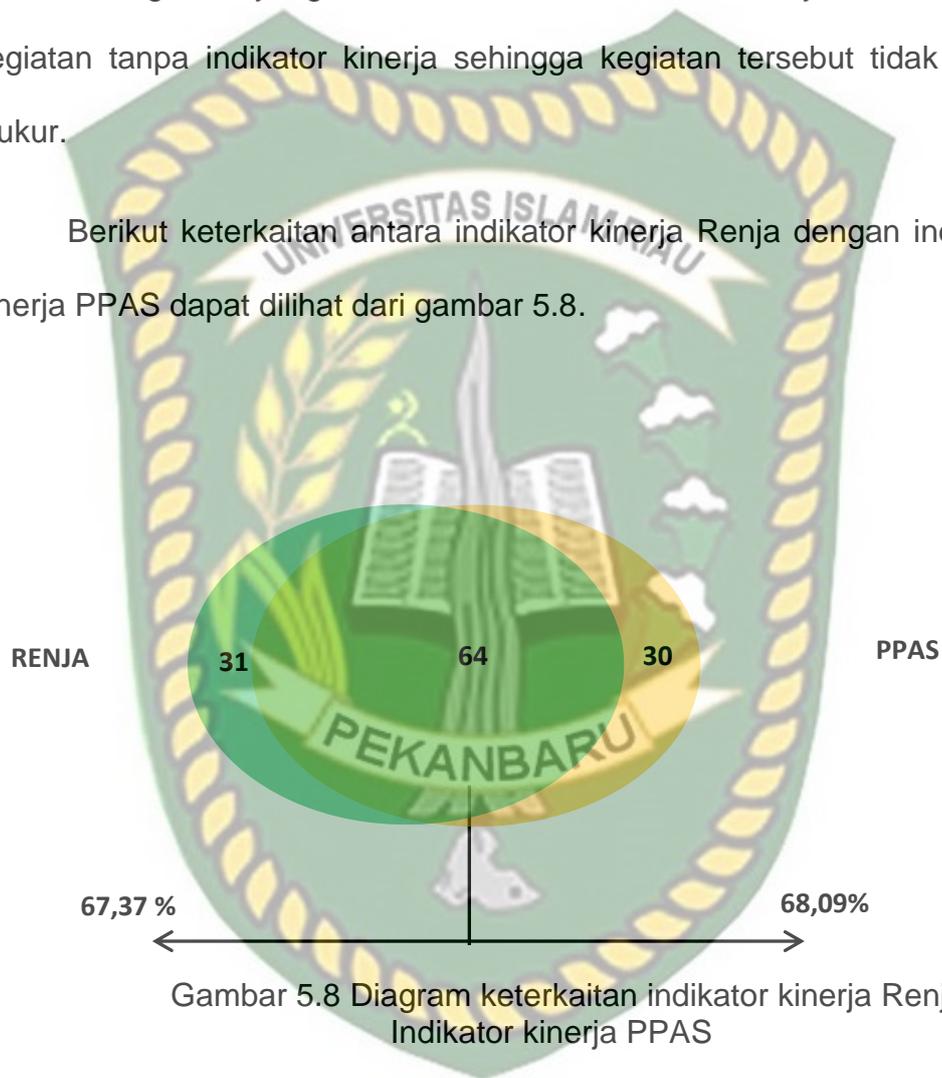
NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
		perikanan, perikanan, peternakan dan perkebunan				perikanan, perikanan, peternakan dan perkebunan				
18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama dan koordinasi permasalahan ekonomi dan keuangan	15 Kali Pertemuan	18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama dan koordinasi permasalahan ekonomi dan keuangan	15 Kali Pertemuan	√		
<b>19.</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>			<b>19.</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>					
19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Jumlah Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	12 Eksemplar/Media	19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Jumlah Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	12 Eksemplar/Media	√		
19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	Persentase Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah Serta Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	100%	19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	Persentase Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah Serta Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	100 Persen	√		
19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	Persentase Ivent-ivent kehumasan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	100%	19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	Persentase Event-event Kehumasan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1500 Lembar		√	
<b>20.</b>	<b>Program Jaminan Sosial</b>			<b>20.</b>	<b>Program Jaminan Sosial</b>					
20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin	7724 RTS-PM	20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin	7724 RTS-PM	√		
<b>21.</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>			<b>21.</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>					
21.1	Penyusunan standar satuan harga	Standarisasi honorarium dan biaya lainnya	200 Buku	21.1	Penyusunan standar satuan harga	Standarisasi honorarium dan biaya lainnya	200 Buku	√		
21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	Standarisasi satuan harga Kabupaten Siak	200 Buku	21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	Standarisasi satuan harga Kabupaten Siak	200 Buku	√		
21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismom TEpra	Laporan Monitoring dan Evaluasi	100%	21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismom TEpra	Laporan Monitoring dan Evaluasi	100%	√		
21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur	Tidak Ada	1 Segmen	21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur	Terwujudnya Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur	1 Segmen		√	

NO.	RENJA			NO.	PPAS			KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		YA	TIDAK	
		TOLOK UKUR	TARGET			TOLOK UKUR	TARGET			
	Toponimi				Toponimi	Invetarisasi Nama Unsur Toponimi				
21.5	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	Terlaksananya Desk Pilkada	1 Dokumen		√	
<b>22.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>			<b>22.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>					
22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	Terbentuknya Peraturan Bupati	100 persen	22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	Terbentuknya Peraturan Bupati	200 Buku		√	



Dari tabel 5.8 dapat dilihat bahwa penyusunan indikator kinerja dalam Renja dan PPAS kurang konsisten, terbukti dengan masih adanya indikator kegiatan yang tidak sinkron satu sama lainnya dan adanya kegiatan tanpa indikator kinerja sehingga kegiatan tersebut tidak dapat diukur.

Berikut keterkaitan antara indikator kinerja Renja dengan indikator kinerja PPAS dapat dilihat dari gambar 5.8.



Gambar 5.8 Diagram keterkaitan indikator kinerja Renja dan Indikator kinerja PPAS

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 95 indikator kinerja yang tercantum dalam Renja tersebut ada 64 indikator kinerja (67,37%) yang sama dalam PPAS tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *cukup buruk*, sedangkan sisanya sebanyak 31 indikator kinerja kegiatan (32,63%) yang tidak sinkron. Dari diagram tersebut juga

menunjukkan bahwa dari 94 indikator kegiatan yang ada di PPAS 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan Renja sebesar 68,09% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *cukup buruk*, sedangkan 30 kegiatan lainnya (31,91%), penyusunan indikator tidak berlandaskan Renja tersebut.

### 5.2.2 Analisis Konsistensi RKPD dan DPA Sekretariat Daerah 2018

Dalam menganalisis konsistensi Program/kegiatan RKPD dan DPA dibuat berdasarkan tabel 5.9.

Tabel 5.9 Matriks Konsolidasi Program/Kegiatan RKPD dan DPA

NO.	RKPD	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	√		
1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	√		
2.	<b>Program penataan penguasaan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	2.	<b>Program penataan penguasaan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	√		
2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	√		
2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	√		
2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	√		
2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	√		
3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	√		
3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	√		
4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	√		
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	√		

NO.	RKPD	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	√		
4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	√		
4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	√		
4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	√		
4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	√		
4.7	Penyediaan alat tulis kantor	4.7	Penyediaan alat tulis kantor	√		
4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√		
4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	√		
4.10	Penyediaan makanan dan minuman	4.10	Penyediaan makanan dan minuman	√		
4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	√		
4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	√		
4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	√		
4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	√		
4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	√		
5.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	5.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	√		
5.1	Pengadaan mobil jabatan	5.1	Tidak Ada		√	
5.2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	5.2	Tidak Ada		√	
5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	√		
5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	√		
5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	√		
5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	√		
5.7	Pengadaan mebeleur	5.7	Pengadaan mebeleur	√		
5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	√		
5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	√		
5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	√		
5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	√		

NO.	RKPD	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	√		
5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	√		
5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	√		
5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	√		
5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	√		
5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	√		
5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	√		
5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	√		
5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	√		
5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	√		
5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	√		
5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	√		
5.24	Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	√		
6.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	6.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	√		
6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	√		
6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	√		
6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	√		
7.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	7.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	√		
7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	√		
7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	√		
7.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-	7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-	√		

NO.	RKPD	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
	Paten)		Paten)			
7.4	Fasilitasi Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	√		
8.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	8.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	√		
8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	√		
8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	√		
8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	√		
8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	8.4	Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	√		
8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	√		
8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	√		
9.	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	9.	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	√		
9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	√		
9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	√		
9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	√		
9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	√		
9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	√		
9.6	Fasilitasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	√		
9.7	Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	√		
10	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	10	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	√		
10.1	Survey Kepuasan	10.1	Survey Kepuasan	√		

NO.	RKPD	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
	Masyarakat		Masyarakat			
10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	√		
<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	11	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	√		
11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	√		
11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	√		
11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	√		
12	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	12	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	√		
12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	√		
13	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	13	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	√		
13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	√		
14	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	14	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	√		
14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	√		
14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	√		
14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	√		
15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	√		
15.1	Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	√		
15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	√		
16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	√		
16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	√		
16.2	Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	16.2	Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	√		
16.3	Pelaksanaan Ceramah dan	16.3	Pelaksanaan Ceramah dan	√		

NO.	RKPD	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
	Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak		Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak			
16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	√		
16.5	Pelaksanaan dan Fasilitas Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	16.5	Pelaksanaan dan Fasilitas Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	√		
17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	√		
17.1	Pengawasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	17.1	Pengawasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	√		
17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	√		
18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	√		
18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	√		
18.2	Fasilitas Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	√		
19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	√		
19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	√		
19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	√		
19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	√		
20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	√		
20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	√		
21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	√		
21.1	Penyusunan standar satuan harga	21.1	Penyusunan standar satuan harga	√		
21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	√		
21.2	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPR	21.2	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPR	√		
21.3	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	21.3	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	√		

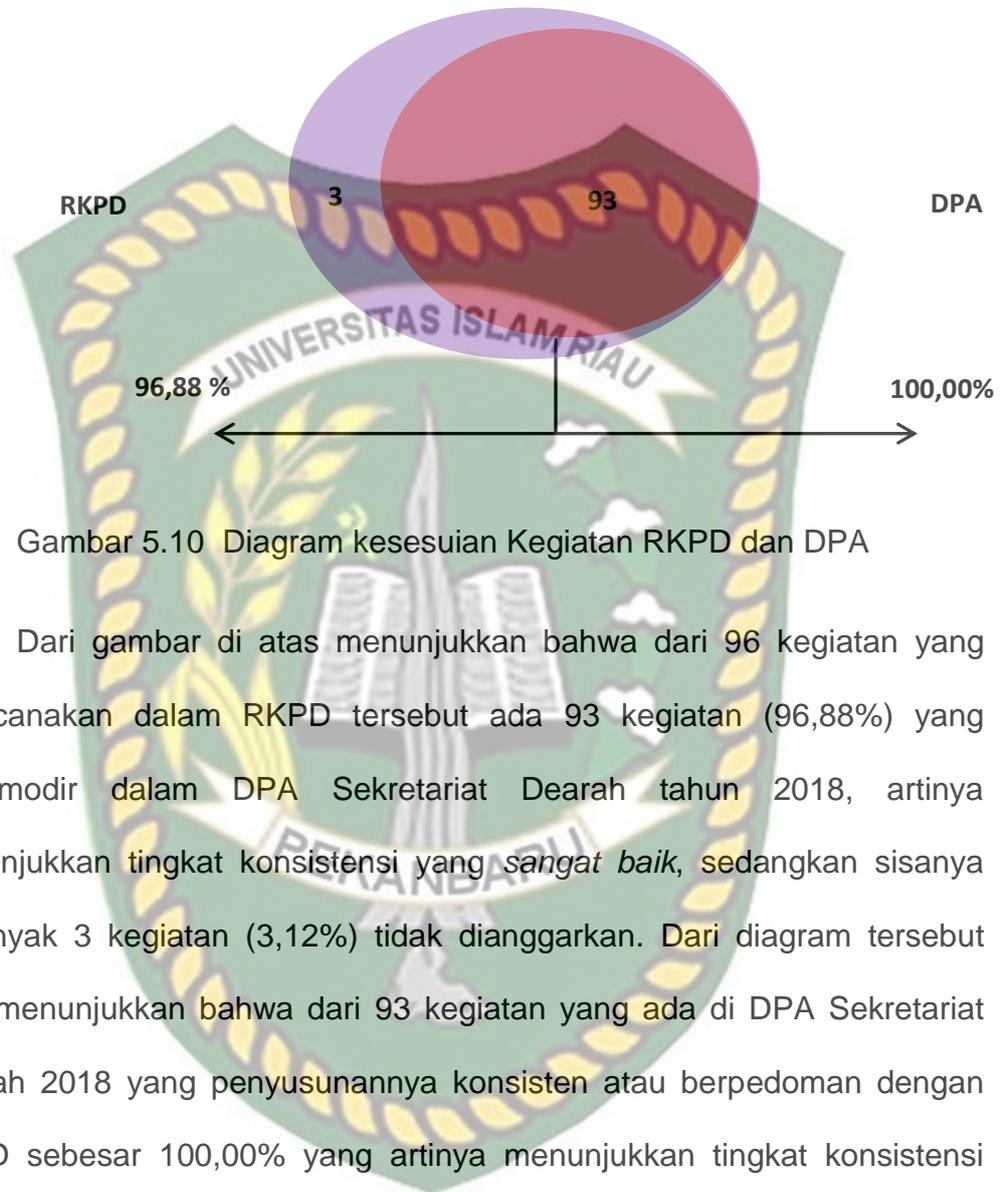
NO.	RKPD	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
21.4	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	21.4	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	√		
22.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>	22.	Tidak Ada		√	
22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	22.1	Tidak Ada		√	

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada DPA Sekretariat Daerah tahun 2018 terdiri atas 21 Program dan 93 Kegiatan. Sedangkan pada RKPD terdiri dari 22 program dan 96 kegiatan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah tahun 2018 kurang konsisten, terbukti masih ada program dan kegiatan di RKPD yang direncanakan sebelumnya dalam DPA Sekretariat Daerah tersebut tidak dianggarkan. Hal ini menandakan bahwa penyusunan DPA Sekretariat Daerah tahun 2018 tidak sepenuhnya berlandaskan RKPD tahun 2018. Keterkaitan Program yang ada pada RKPD dan DPA dapat dilihat dari diagram venn pada gambar 5.9 berikut ini :



Gambar 5.9 Diagram keterkaitan antara Program RKP dan DPA

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 22 program yang direncanakan dalam RKP tersebut ada 21 program (95,24%) yang diakomodir dalam DPA Sekretariat Daerah tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*, sedangkan sisanya sebanyak 1 program (4,76%) program tidak diakomodir. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 21 program yang ada di DPA Sekretariat Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan RKP sebesar 100,00% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*. Sedangkan untuk kesesuaian kegiatan RKP dan DPA dapat dilihat dari gambar 5.10 berikut.



Gambar 5.10 Diagram kesesuaian Kegiatan RKPD dan DPA

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 96 kegiatan yang direncanakan dalam RKPD tersebut ada 93 kegiatan (96,88%) yang diakomodir dalam DPA Sekretariat Daerah tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*, sedangkan sisanya sebanyak 3 kegiatan (3,12%) tidak dianggarkan. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 93 kegiatan yang ada di DPA Sekretariat Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan RKPD sebesar 100,00% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan Program/Kegiatan pada DPA Sekretariat Daerah berpedoman pada Program/Kegiatan di RKPD.

### 5.3 Analisis Konsistensi Antar Dokumen Penganggaran PPAS dan DPA

Konsistensi antar dokumen penganggaran untuk program kegiatan PPAS dan DPA Sekretariat Daerah dianalisis dari tabel 5.10.

Tabel 5.10 Matrik konsolidasi Program Kegiatan PPAS dan DPA Sekretariat Daerah 2018

NO.	PPAS	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	1.	<b>Program pengembangan sistem informasi pertanahan</b>	√		
1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	√		
2.	<b>Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	2.	<b>Program penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	√		
2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	√		
2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	√		
2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	√		
2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	√		
3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	√		
3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3.1	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	√		
4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	√		
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	√		
4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	√		
4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	√		
4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	√		
4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	√		
4.6	Penyediaan jasa kebersihan	4.6	Penyediaan jasa kebersihan	√		

NO.	PPAS	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
	kantor		kantor			
4.7	Penyediaan alat tulis kantor	4.7	Penyediaan alat tulis kantor	√		
4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√		
4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	√		
4.10	Penyediaan makanan dan minuman	4.10	Penyediaan makanan dan minuman	√		
4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	√		
4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	√		
4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	√		
4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	√		
4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	√		
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√		
5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	√		
5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	√		
5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	√		
5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	√		
5.7	Pengadaan mebeleur	5.7	Pengadaan mebeleur	√		
5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	√		
5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	√		
5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	√		
5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	√		
5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	√		
5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	√		
5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	√		
5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	√		
5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	√		
5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	√		

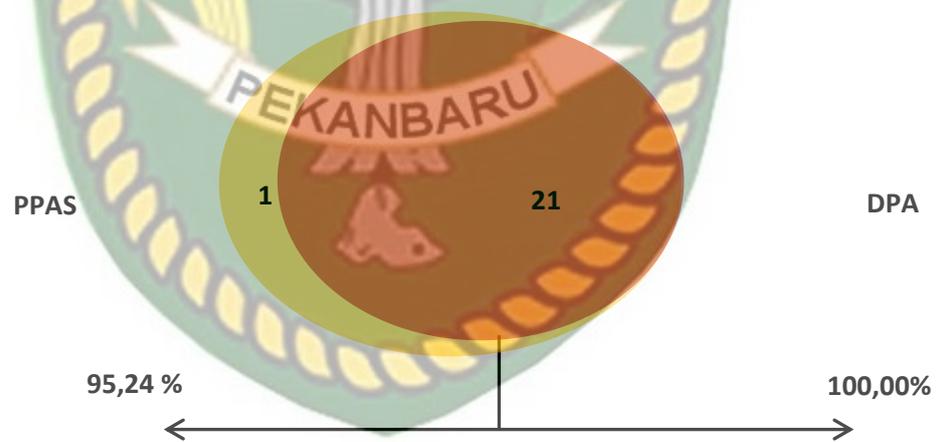
NO.	PPAS	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	√		
5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	√		
5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	√		
5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	√		
5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	√		
5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	√		
5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	√		
6.	Program peningkatan disiplin aparatur	6.	Program peningkatan disiplin aparatur	√		
6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	√		
6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	√		
6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	√		
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√		
7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	√		
7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	√		
7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	√		
7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	√		
8.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√		
8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	√		
8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	√		

NO.	PPAS	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	√		
8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	8.4	Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	√		
8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	√		
8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	√		
<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	√		
9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	√		
9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	√		
9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	√		
9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	√		
9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	√		
9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	√		
9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	√		
<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	√		
10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	√		
10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	√		
<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	√		
11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	√		
11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	√		
11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan	11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan	√		

NO.	PPAS	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
	Pembangunan Pemerintah Daerah		Pembangunan Pemerintah Daerah			
<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	√		
12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	√		
<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	√		
13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	√		
<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	√		
14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	√		
14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	√		
14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	√		
<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	√		
15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	√		
15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	√		
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	√		
16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	√		
16.2	Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	16.2	Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	√		
16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	16.3	Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	√		
16.4	Safari Jum`at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	16.4	Safari Jum`at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	√		
16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	16.5	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	√		
<b>17.</b>	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	<b>17.</b>	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	√		
17.1	Penegasan Batas Wilayah	17.1	Penegasan Batas Wilayah	√		

NO.	PPAS	NO.	DPA	KONSISTENSI		KET
	PROGRAM/KEGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	YA	TIDAK	
	Antar Kecamatan se Kab. Siak		Antar Kecamatan se Kab. Siak			
17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	√		
18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	√		
18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	√		
18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	√		
19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	√		
19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	√		
19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	√		
19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	√		
20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	√		
20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	√		
21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	√		
21.1	Penyusunan standar satuan harga	21.1	Penyusunan standar satuan harga	√		
21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	√		
21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPPRA	21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPPRA	√		
21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	√		
21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	√		
22.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>	22.	<b>Tidak Ada</b>		√	
22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	22.1	Tidak Ada		√	

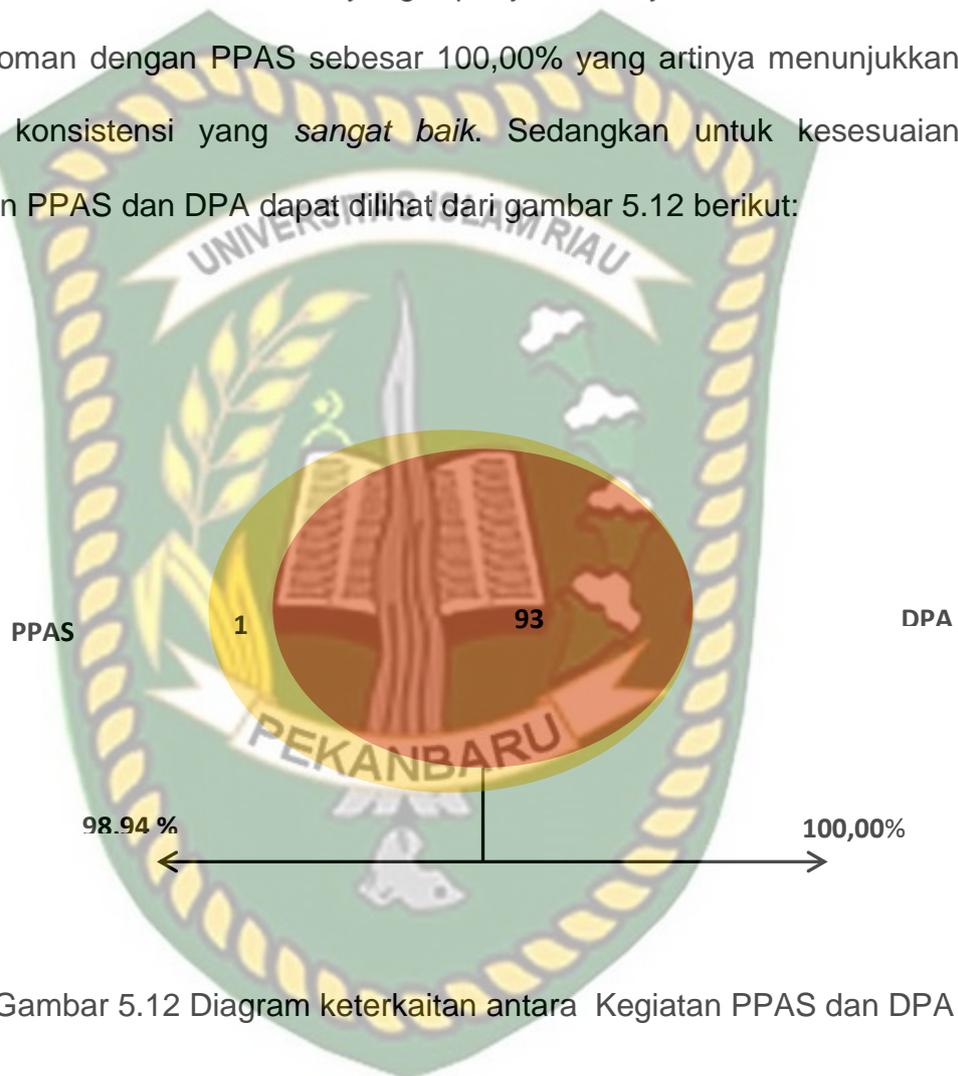
Pada tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa PPAS tahun 2018 terdiri atas 22 Program dan 94 Kegiatan. Sedangkan pada DPA terdiri dari 21 program dan 93 kegiatan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa penyusunan penganggaran Sekretariat Daerah tahun 2018 kurang konsisten, terbukti masih ada program dan kegiatan di PPAS yang ditetapkan sebelumnya dalam DPA Sekretariat Daerah tersebut tidak dianggarkan. Hal ini menandakan bahwa penyusunan DPA Sekretariat Daerah tahun 2018 tidak sepenuhnya berlandaskan PPAS tahun 2018. Keterkaitan Program yang ada pada PPAS dan DPA dapat dilihat dari diagram venn pada gambar 5.11 berikut ini :



Gambar 5.11 Diagram keterkaitan antara Program PPAS dan DPA

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 22 program yang ditetapkan dalam PPAS tersebut ada 21 program (95,24%) yang dianggarkan dalam DPA Sekretariat Dearah tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*, sedangkan sisanya

sebanyak 1 program (4,76%) program tidak diakomodir. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 21 program yang ada di DPA Sekretariat Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan PPAS sebesar 100,00% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*. Sedangkan untuk kesesuaian kegiatan PPAS dan DPA dapat dilihat dari gambar 5.12 berikut:



Gambar 5.12 Diagram keterkaitan antara Kegiatan PPAS dan DPA

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 94 kegiatan yang ditetapkan dalam PPAS tersebut ada 93 kegiatan (98,94%) yang diakomodir dalam DPA Sekretariat Dearah tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*, sedangkan sisanya sebanyak 1 kegiatan (1,06%) tidak dianggarkan. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 93 kegiatan yang ada di DPA Sekretariat

Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan PPAS sebesar 100,00% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan Program/Kegiatan pada DPA Sekretariat Daerah berpedoman pada Program/Kegiatan yang telah ditetapkan di dalam PPAS.

Selanjutnya untuk menganalisis konsistensi kinerja program/kegiatan PPAS dan DPA Sekretariat Daerah tahun 2018 dapat dilihat dari tabel 5.11.



Tabel 5.11 Matrik Konsolidasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan PPAS dan DPA Sekretariat Daerah tahun 2018

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
1.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Meningkatnya Tingkat Pengetahuan Informasi Pertanahan	100 %	1.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	Tersedianya Peta dan Tabel Data Lahan Pemda :	100 %	√		
1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	Jumlah Peta dan data Spasial Pada Lahan Pemda	1 Kec	1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	Jumlah Peta dan data Spasial Pada Lahan Pemda	1 Kec	√		
2.	Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terpenuhinya Kebutuhan Peta dan Tabel Data Lahan	100 %	2.	Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya Peta dan Tabel Data Lahan Masyarakat :	100 %	√		
2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	Jumlah lahan masyarakat yang telah di ukur (Luas 1.166 Ha)	1 Kampung	2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	Jumlah lahan masyarakat yang telah di ukur (Luas 1.166 Ha)	1 Kampung	√		
2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	Jumlah Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak yang telah di Sertifikatkan	50 Persil	2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak	Jumlah Tanah Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Siak yang telah di Sertifikatkan	50 Persil	√		
2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	Jumlah Lahan Masyarakat yang Telah diukur (Luas 3.546 Ha)	2 Kampung	2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	Jumlah Lahan Masyarakat yang Telah diukur (Luas 3.546 Ha)	2 Kampung	√		
2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	Jumlah Lahan Masyarakat yang telah diukur (Luas 1.986 Ha)	1 Kampung	2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	Jumlah Lahan Masyarakat yang telah diukur (Luas 1.986 Ha)	1 Kampung	√		
3.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Menurunnya Tingkat Permasalahan Pertanahan	100 %	3.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Teridentifikasinya Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Siak	100 %		√	
3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terpetanya Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Siak	5 Kasus	3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terpetanya Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Siak	5 Kasus	√		
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	√		
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jenis dan jumlah peranko materai dan peranko surat	10.15000 Materai dan Pranko Pos	4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jenis dan jumlah peranko materai dan peranko surat	10.15000 Materai dan Pranko Pos	√		
4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	223.631 Liter,Air,listri k,telpon	4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	223.631 Liter,Air,listri k,telpon	√		

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8,6,4,7 jasa dekorasi,sewa gedung,tenda,saud sistem dan alat elektronik lainnya	4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8,6,4,7 jasa dekorasi,sewa gedung,tenda,saud sistem dan alat elektronik lainnya	√		
4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	42 Unit	4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah	42 Unit	√		
4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85 Belanja perpanjang STNK	4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85 Belanja perpanjang STNK	√		
4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	9 Kegiatan	4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	9 Kegiatan	√		
4.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	249 Jenis Alat Tulis kantor	4.7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	249 Jenis Alat Tulis kantor	√		
4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	67,6 Jenis	4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	67,6 Jenis	√		
4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80 Jenis	4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80 Jenis	√		
4.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis Penyediaan makanan dan minuman	11 Jenis	4.10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dan jenis Penyediaan makanan dan minuman	11 Jenis	√		
4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Ls	4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Ls	√		
4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	20 orang	4.12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	20 orang	√		
4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi Kantor	178 orang	4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi Kantor	178 orang	√		
4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan Dalam Daerah	1 Ls	4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan Dalam Daerah	1 Ls	√		
4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Teknis Kantor Pertanahan	100 %	4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Teknis Kantor Pertanahan	100 %	√		

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	√		
5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tidak Ada	5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tidak Ada		√	
5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	1 Jenis	5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	1 Jenis	√		
5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas	2 Jenis	5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis peralatan rumah jabatan/dinas	2 Jenis	√		
5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	20 Unit	5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	20 Unit	√		
5.7	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur	4 Jenis	5.7	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur	4 Jenis	√		
5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	Jumlah dan jenis Pembangunan Tempat Parkir, Taman (landscape)	1 Pemeliharaan	5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	Jumlah dan jenis Pembangunan Tempat Parkir, Taman (landscape)	1 Pemeliharaan	√		
5.9	Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya	Jumlah dan jenis Komputer, Printer dan kelengkapannya	45 Unit	5.9	Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya	Jumlah dan jenis Komputer, Printer dan kelengkapannya	45 Unit	√		
5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	Jumlah Penyediaan Tanda Pengenal	1500 Lembar	5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	Jumlah Penyediaan Tanda Pengenal	1500 Lembar	√		
5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	%tase Sarana Publikasi Kegiatan Event Nasional, Propinsi dan Kab. Siak	100 %	5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	%tase Sarana Publikasi Kegiatan Event Nasional, Propinsi dan Kab. Siak	100 %	√		
5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin rumah jabatan	5 Jenis	5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin rumah jabatan	5 Jenis	√		
5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Kegiatan	5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Kegiatan	√		
5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	64.400 dan 11 Liter,Unit	5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	64.400 dan 11 Liter,Unit	√		
5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.520,38,7 Liter,Unit,Je nis	5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.520,38,7 Liter,Unit,Je nis	√		
5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis Pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas	18 Jenis	5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah dan jenis Pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas	18 Jenis	√		
5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan peralatan kantor	24 Jenis	5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan peralatan kantor	24 Jenis	√		

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
						peralatan kantor				
5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	2 Kegiatan	5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Jumlah dan jenis Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	2 Kegiatan	√		
5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah dan jenis Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Jenis	5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah dan jenis Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Jenis	√		
5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah dan jenis Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Jenis	5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah dan jenis Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Jenis	√		
5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	Jumlah Pembangunan Pagar, Taman, Tempat Parkir	1 Pagar,Temp at Parkir	5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	Jumlah Pembangunan Pagar, Taman, Tempat Parkir	1 Pagar,Tempat Parkir	√		
5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	Renovasi Gedung Kantor Veteran dan Gedung Serbaguna Kaec. Sungai Mandau	100 %	5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	Renovasi Gedung Kantor Veteran dan Gedung Serbaguna Kaec. Sungai Mandau	100 %	√		
5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna di Kecamatan Siak dan Kelurahan Mempura	100 %	5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	terlaksananya Pembangunan Gedung Serbaguna di Kecamatan Siak dan Kelurahan Mempura	100 %	√		
5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	Sistem E-Procurement yang optimal	1500 Lembar	5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	Sistem E-Procurement yang optimal	1500 Lembar	√		
<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat kepatuhan aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat kepatuhan aparatur</b>	<b>100 %</b>	√		
6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kedaerahan	250 Belanja	6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kedaerahan	250 Belanja	√		
6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	4 Jenis	6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	4 Jenis	√		
6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	4 Belanja	6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	4 Belanja	√		
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>terwujudnya Pedoman Pelaksanaan APBD yang lebih baik</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Pelaksanaan Perpres 70 Tahun 2012 yang sesuai dengan ketentuan</b>	<b>1 Kegiatan</b>		√	
7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi No 70 Tahun 2012	1 Kegiatan	7.1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi No 70 Tahun 2012	1 Kegiatan	√		

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	Admin RUP, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	1 Kegiatan	7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	Admin RUP, Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	1 Kegiatan	√		
7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	Tersedianya Informasi Pelayanan E-Paten	100 %	7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	Tersedianya Informasi Pelayanan E-Paten	100 %	√		
7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	Tersedianya Sistem Laporan LAPOR!SP4N	1500 Lembar	7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	Tersedianya Sistem Laporan LAPOR!SP4N	1500 Lembar	√		
8.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terciptanya Koordinasi kegiatan pembangunan</b>	<b>54 OPD</b>	8.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tertibnya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan serta tersedianya data pelaksanaan APBD</b>	<b>54 OPD</b>		√	
8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan RFK	54 OPD	8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan RFK	54 OPD	√		
8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016	100 %	8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017	100 %	√		
8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	Pelaksanaan kegiatan APBD berjalan dengan baik	100 %	8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	Pelaksanaan kegiatan APBD berjalan dengan baik	100 %	√		
8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	Tidak Ada	1 Dokumen	8.4	Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	Tidak Ada	1 Dokumen		√	
8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	Laporan DAK	77 Buku	8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	Laporan DAK	77 Buku	√		
8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	Terwujudnya Terselenggaranya Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Implementasi RANHAM Kab. Siak	1500 Lembar	8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	Terwujudnya Terselenggaranya Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Implementasi RANHAM Kab. Siak	1500 Lembar	√		

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
9.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	9.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kemasyarakatan di Kecamatan	95 %		√	
9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah Kecamatan	1 Ls	9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah Kecamatan	1 Ls	√		
9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Ls	9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1 Ls	√		
9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten	100 %	9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten	100 %	√		
9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	Terlaksananya Asosiasi Pimpinan Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI)	100 %	9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	Terlaksananya Asosiasi Pimpinan Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI)	100 %	√		
9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%tase Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%tase Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	√		
9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya proses penanganan perkara Perdata & TUN	5 Pekara	9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya proses penanganan perkara Perdata & TUN	5 Pekara	√		
9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Terlaksananya proses pemberian bantuan hukum bagi wargamiskin Kab. Siak	15 Pekara	9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	Terlaksananya proses pemberian bantuan hukum bagi wargamiskin Kab. Siak	15 Pekara	√		
10	Program peningkatan kualitas kelembagaan	Tidak Ada	Tidak Ada	10	Program peningkatan kualitas kelembagaan	Tidak Ada	100 %		√	
10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	100 %	10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada	100 %		√	
10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tidak Ada	1500 Lembar	10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tidak Ada	1500 Lembar		√	
11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penataan Peraturan Perundang-undangan	100 %	11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Keluar dan Disahkan	20 perda		√	
11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan daerah yang dikeluarkan atau di sahkan	20 Perda	11.1	Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan daerah yang dikeluarkan atau di sahkan	20 Perda	√		

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Pembuatan Website JDIH dan Penggandaan Perda	400,1 Buku,Website	11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Pembuatan Website JDIH dan Penggandaan Perda	400,1 Buku,Website	√		
11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Koordinasi	5 Kali	11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Koordinasi	5 Kali	√		
<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	<b>Tercapaiannya pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>12</b>	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	<b>Evaluasi Kinerja dan Penilaian Camat Serta Kecamatan Terbaik</b>	<b>100 %</b>	√		
12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	Camat dan Kecamatan Terbaik	100%	12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	Camat dan Kecamatan Terbaik	100%	√		
<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah</b>	<b>5 BUMD</b>	<b>13</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah</b>	<b>5 BUMD</b>	√		
13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	5 BUMD	13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	5 BUMD	√		
<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Beroperasinya Unit Layanan Pengadaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>14</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Pelayanan bantuan hibah dan sosial yang optimal</b>	<b>100 %</b>		√	
14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	Tidak Ada	100 %	14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	Pelayanan bantuan hibah dan sosial	100 %		√	
14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	Tidak Ada	45 OPD	14.2	Pelaksanaan Kompetisi SINOVIK	Tidak Ada	45 OPD		√	
14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Elektronik	1500 Pengunjung	14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	Jumlah Layanan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Elektronik	1500 Pengunjung	√		
<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	<b>Terkoordinirnya fase pemberangkatan Jema'ah calon haji ke embarkasi dan fase kepulangan Jema'ah haji Kabupaten Siak ke daerah asal.</b>	<b>100 %</b>		√	
15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh	Tidak Ada	100 %	15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh	Terlaksananya Ibadah Haji dan Umroh (bagi masyarakat	100 %		√	

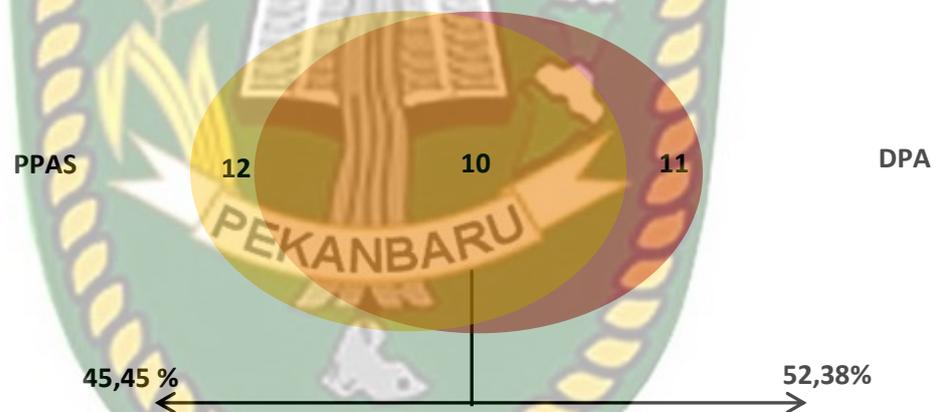
No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
	Pemerintah Kabupaten Siak				Pemerintah Kabupaten Siak	yang berprestasi)				
15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	Tidak Ada	100 %	15.2	Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam	Pelaksanaan peringatan, penyambutan dan perayaan hari besar islam	100 %		√	
16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	<b>Adanya perwakilan kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kabupaten Siak pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau</b>	<b>14 kecamatan</b>		√	
16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	Tidak Ada	14 Kecamatan	16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	14 Kecamatan		√	
16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	Tidak Ada	44 Orang	16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	Keikutsertaan kafilah Kabupaten Siak pada ajang Musabaqah MTQ Tingkat Provinsi Riau	44 Orang		√	
16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	Tidak Ada	100 %	16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	Adanya Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	100 %		√	
16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	Pemahaman dan Pengamalan Agama	14 Kecamatan	16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	Pemahaman dan Pengamalan Agama	14 Kecamatan	√		
16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Terwujudnya Pelaksanaan dan Fasilitasi POSPENAS	14 Kecamatan	16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	Terwujudnya Pelaksanaan dan Fasilitasi POSPENAS	14 Kecamatan	√		
17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	<b>Tersedianya data pendukung dan pelacakan dalam rangka penegasan batas wilayah</b>	<b>100 %</b>	17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	<b>Pemasangan Patok/Pilar Batas Hasil Pelacakan</b>	<b>100 %</b>		√	
17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	Penegasan Batas yang telah disepakati	1 Segmen	17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	Penegasan Batas yang telah disepakati	1 Segmen	√		
17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	Tidak Ada	1 Segmen	17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	Tidak Ada	1 Segmen		√	
18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian, perikanan,</b>	<b>120 Orang</b>	18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi</b>	<b>120 Orang</b>	√		

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
	Pembangunan di bidang perekonomian	perikanan, peternakan dan perkebunan			Pembangunan di bidang perekonomian	pertanian, perikanan, perikanan, peternakan dan perkebunan				
18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian, perikanan, perikanan, peternakan dan perkebunan	120 Org	18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengembangan Produksi pertanian, perikanan, perikanan, peternakan dan perkebunan	120 Org	√		
18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	Terlaksananya pertemuan fasilitas kerjasama dan koordinasi permasalahan ekonomi dan keuangan	15 Kali	18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	Terlaksananya Kebijakan dan Tata Perundangan yang terarah dan berorientasi ekonomi, keuangan, pajak hukum, dan hukum bisnis	100 %		√	
19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	19.	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	<b>Tingkat Pelayanan Informasi dalam Kehumasan</b>	<b>100%</b>		√	
19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Jumlah Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	12 Eks	19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Jumlah Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	12 Eks	√		
19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	%tase Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah Serta Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	100 %	19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	%tase Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah Serta Tugas-tugas Kehumasan Lainnya	100 %	√		
19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	%tase Event-event Kehumasan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1500 Lembar	19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	%tase Event-event Kehumasan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	1500 Lembar	√		
20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	<b>Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin</b>	<b>7724 RTS-PM</b>	20.	<b>Program Jaminan Sosial</b>	<b>Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin</b>	<b>7724 RTS-PM</b>	√		
20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin	7724 RTS-PM	20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	Tersalurnya Beras Sejahtera untuk masyarakat miskin	7724 RTS-PM	√		
21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>tersedianya buku standarisasi honorarium dan biaya lainnya</b>	<b>1 Kegiatan</b>	21.	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>dijadikan buku standarisasi honorarium dan biaya lainnya</b>	<b>1 Kegiatan</b>	√		
21.1	Penyusunan standar satuan harga	Standarisasi honorarium dan biaya lainnya	200 Buku	21.1	Penyusunan standar satuan harga	Standarisasi honorarium dan biaya lainnya	150 Buku		√	

No.	PPAS			No.	DPA			Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Ya	Tidak	
		Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target			
21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	Standarisasi satuan harga Kabupaten Siak	200 Buku	21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	Standarisasi satuan harga Kabupaten Siak	100 Buku		√	
21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPR	Laporan Monitoring dan Evaluasi	100%	21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPR	Laporan Monitoring dan Evaluasi	100%	√		
21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	Terwujudnya Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	1 Segmen	21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	Terwujudnya Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	1 Segmen	√		
21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	Terlaksananya Desk Pilkada	1 Dokumen	21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum (Desk Pilkada)	Terlaksananya Desk Pilkada	1 dokumen	√		
22.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>	<b>Terwujudnya Pedoman Pelaksanaan APBD yang lebih baik</b>	<b>100 %</b>	22.	<b>Tidak Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>		√	
22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	Terbentuknya Peraturan Bupati	200 Buku		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		√	

Dari tabel 5.11 dapat dilihat bahwa penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan dalam PPAS dan DPA kurang konsisten, terbukti dengan masih adanya indikator kegiatan yang tidak sinkron satu sama lainnya dan adanya kegiatan tanpa indikator kinerja sehingga kegiatan tersebut tidak dapat diukur.

Berikut keterkaitan antara indikator kinerja Program PPAS dengan indikator kinerja Program DPA dapat dilihat dari gambar 5.13



Gambar 5.13 Diagram keterkaitan indikator kinerja PPAS dan Indikator kinerja DPA

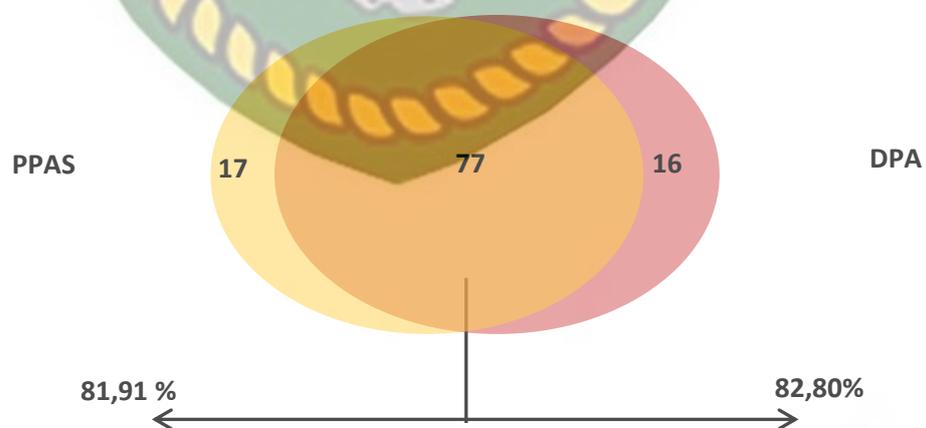
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 22 indikator kinerja program yang tercantum dalam PPAS tersebut ada 10 indikator kinerja (45,45%) yang sama dalam DPA tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat buruk*, sedangkan sisanya sebanyak 12 indikator kinerja program (54,55%) yang tidak sinkron. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 21 indikator kinerja program yang ada di DPA

2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan PPAS sebesar 52,38% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *buruk*, sedangkan 11 kegiatan lainnya (47,62%), penyusunan indikator tersebut tidak berlandaskan PPAS.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pejabat perencana Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, maka didapatkan alasan kenapa tingkat konsistensi yang buruk dapat terjadi :

4. Ketidakterisian indikator kinerja program dan target pada dokumen PPAS dan dokumen DPA.
5. Adanya perubahan indikator kinerja program dan target pada dokumen DPA yang dianggap lebih tepat sebelum pengesahan APBD.

Selanjutnya keterkaitan antara indikator kinerja kegiatan PPAS dengan indikator kinerja kegiatan DPA dapat dilihat dari gambar 5.14



Gambar 5.14 Diagram keterkaitan indikator kinerja Kegiatan dalam PPAS dan DPA

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 94 indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam PPAS tersebut ada 77 indikator kinerja (81,91%) yang sama dalam DPA tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *baik*, sedangkan sisanya sebanyak 17 indikator kinerja program (18,09%) yang tidak sinkron. Dari diagram tersebut juga menunjukkan bahwa dari 93 indikator kinerja kegiatan yang ada di DPA 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan PPAS sebesar 82,80% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *baik*, sedangkan 16 kegiatan lainnya (17,20%), penyusunan indikator tersebut tidak berlandaskan PPAS.

Kemudian dalam menganalisis konsistensi pagu program/kegiatan PPAS dan DPA mengacu pada tabel 5.12.

Tabel 5.12 Matriks Konsolidasi pagu Program/Kegiatan PPAS dan DPA

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
1.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	135.000.000	1.	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	135.000.000	√		
1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	135.000.000	1.1	Pengukuran dan pemetaan lahan-lahan pemda di Kabupaten Siak	135.000.000	√		
2.	Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	753.320.000	2.	Program penataan penguasaan; kepemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah	753.320.000	√		
2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	180.000.000	2.1	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Koto Gasib	180.000.000	√		
2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga	213.320.000	2.2	Sertifikat Tanah Bagi Keluarga	213.320.000	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsisten si		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
	Miskin Kabupaten Siak			Miskin Kabupaten Siak				
2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	200.000.000	2.3	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Siak	200.000.000	√		
2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	160.000.000	2.4	Informasi Tanah Desa di Kecamatan Dayun	160.000.000	√		
3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>162.000.000</b>	3.	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	<b>162.000.000</b>	√		
3.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	162.000.000	3.1	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	162.000.000	√		
4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>27.659.348.487</b>	4.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>27.659.348.487</b>	√		
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	75.000.000	4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	75.000.000	√		
4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	4.301.388.000	4.2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	4.276.788.000		√	
4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.081.250.000	4.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.081.250.000	√		
4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	274.000.000	4.4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	274.000.000	√		
4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	369.516.000	4.5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	369.516.000	√		
4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.504.250.000	4.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.504.250.000	√		
4.7	Penyediaan alat tulis kantor	1.218.750.000	4.7	Penyediaan alat tulis kantor	1.218.750.000	√		
4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.204.483.500	4.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.204.483.500	√		
4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	602.250.000	4.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	602.250.000	√		
4.10	Penyediaan makanan dan minuman	5.891.750.000	4.10	Penyediaan makanan dan minuman	5.891.750.000	√		
4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.000.000.000	4.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.000.000.000	√		
4.12	Penyediaan jasa	294.093.120	4.12	Penyediaan jasa	294.093.120	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsisten si		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
	keamanan kantor			keamanan kantor				
4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	3.543.098.400	4.13	Penyediaan jasa administrasi kantor	3.567.698.400		√	
4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	254.520.000	4.14	Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah	254.520.000	√		
4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	44.999.467	4.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor teknis pertanahan	44.999.467	√		
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>15.049.286.000</b>	<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>15.049.286.000</b>	√		
5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	159.000.000	5.3	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	159.000.000	√		
5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	97.250.000	5.4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	97.250.000	√		
5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	100.000.000	5.5	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	100.000.000	√		
5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	423.500.000	5.6	Pengadaan peralatan gedung kantor	423.500.000	√		
5.7	Pengadaan mebeleur	168.250.000	5.7	Pengadaan mebeleur	168.250.000	√		
5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	1.265.373.000	5.8	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman rumah jabatan	1.265.373.000	√		
5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	446.000.000	5.9	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	446.000.000	√		
5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	100.000.000	5.10	Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN	100.000.000	√		
5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	691.650.000	5.11	Pengadaan Sarana Publikasi	691.650.000	√		
5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	75.250.000	5.12	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	75.250.000	√		
5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	259.550.000	5.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	259.550.000	√		
5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	946.350.000	5.14	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	946.350.000	√		
5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1.054.730.000	5.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1.054.730.000	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
	dinas/operasional			dinas/operasional				
5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	679.878.000	5.16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	679.878.000	√		
5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	952.150.000	5.17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	952.150.000	√		
5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	801.500.000	5.18	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	801.500.000	√		
5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	120.750.000	5.19	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	120.750.000	√		
5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.482.250.000	5.20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.482.250.000	√		
5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	1.037.750.000	5.21	Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Landscape Kantor	1.037.750.000	√		
5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	383.325.000	5.22	Renovasi Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	383.325.000	√		
5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	3.259.410.000	5.23	Pembangunan Gedung Kantor di Wilayah Kecamatan	3.259.410.000	√		
5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	545.370.000	5.24	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Siak	545.370.000	√		
<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>810.076.000</b>	<b>6.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>810.076.000</b>	√		
6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	227.900.000	6.1	Pengadaan Pakaian Kedaerahan	227.900.000	√		
6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	119.176.000	6.2	Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH beserta perlengkapannya	119.176.000	√		
6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	463.000.000	6.3	Penyediaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Hari Besar	463.000.000	√		
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>481.540.000</b>	<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>481.540.000</b>	√		
7.1	Sosialisasi	87.720.000	7.1	Sosialisasi	87.720.000	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
	peraturan perundang-undangan			peraturan perundang-undangan				
7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	141.510.000	7.2	Pelatihan/training kepada PA/KPA, Kassubag Program dan Admin RUP, Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan	141.510.000	√		
7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	85.800.000	7.3	Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten)	85.800.000	√		
7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	166.510.000	7.4	Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N	166.510.000	√		
<b>8.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>847.883.480</b>	<b>8.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>847.883.480</b>	√		
8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	184.350.000	8.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	184.350.000	√		
8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	223.078.480	8.2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	223.078.480	√		
8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	141.835.000	8.3	Penyusunan laporan pembinaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Siak	141.835.000	√		
8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	104.920.000	8.4	Fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal	104.920.000	√		
8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	125.900.000	8.5	Penyusunan Laporan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan	125.900.000	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsisten si		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	67.800.000	8.6	Pelaporan Implementasi Rencana Aksi Nasioanal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kab. Siak	67,800,000	√		
<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>4.153.333.200</b>	<b>9.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>4.136.223.200</b>		√	
9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	116.000.000	9.1	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	116,000,000	√		
9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1.010.000.000	9.2	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	1,010,000,000	√		
9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	1.281.293.200	9.3	Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Siak	1,281,293,200	√		
9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	102.800.000	9.4	Rapat forum komunikasi pimpinan daerah ( APKASI )	85.690.000		√	
9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	575.000.000	9.5	Protokoler Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	575,000,000	√		
9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	924.340.000	9.6	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	924,340,000	√		
9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	143.900.000	9.7	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	143,900,000	√		
<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	<b>213.600.000</b>	<b>10</b>	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan</b>	<b>213,600,000</b>	√		
10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	113.600.000	10.1	Survey Kepuasan Masyarakat	113,600,000	√		
10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	100.000.000	10.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan	100,000,000	√		
<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>1.248.812.850</b>	<b>11</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>1.244.312.850</b>		√	
11.1	Penyusunan	789.740.000	11.1	Penyusunan	789,740,000	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsisten si		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
	Peraturan Daerah			Peraturan Daerah				
11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	121.500.000	11.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	117.000.000		√	
11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	337.572.850	11.3	Koordinasi Pengawasan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah	337,572,850	√		
12	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	<b>386.260.000</b>	12	<b>Program pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur</b>	<b>386,260,000</b>	√		
12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	386.260.000	12.1	Evaluasi kinerja dan penilaian camat serta kecamatan terbaik	386,260,000	√		
13	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	<b>29.931.985</b>	13	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD</b>	<b>29,931,985</b>	√		
13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	29.931.985	13.1	Koordinasi dan evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah	29,931,985	√		
14	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>517.530.000</b>	14	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>517,530,000</b>	√		
14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	29.990.000	14.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hibah dan Sosial	29,990,000	√		
14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	140.320.000	14.2	Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi SINOVIK	140,320,000	√		
14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	347.220.000	14.3	Pengadaan Sarana dan prasarana peningkatan keterampilan aparatur	347,220,000	√		
15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	<b>2.512.099.913</b>	15.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama</b>	<b>2,512,099,913</b>	√		
15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	1.966.915.442	15.1	Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak	1,966,915,442	√		
15.2	Peringatan,	545.184.471	15.2	Peringatan,	545,184,471	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsisten si		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
	Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam			Penyambutan dan Perayaan Hari Besar Islam				
16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	<b>7.947.291.866</b>	16	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama</b>	<b>7.953.291.866</b>		√	
16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	4.679.089.215	16.1	Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak	4,679,089,215	√		
16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	1.917.369.313	16.2	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Riau	1,917,369,313	√		
16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	149.128.698	16.3	Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak	149,128,698	√		
16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	307.832.952	16.4	Safari Jum'at dan Ramadhan Pemerintah Kabupaten Siak	307,832,952	√		
16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	893.871.688	16.5	Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)	899.871.688		√	
17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	<b>380.000.000</b>	17.	<b>Program Batas Wilayah Pemerintahan</b>	350.000.000		√	
17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	230.000.000	17.1	Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan se Kab. Siak	200,000,000		√	
17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	150.000.000	17.2	Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas Wilayah Kab. Siak	150,000,000	√		
18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	<b>684.113.150</b>	18.	<b>Program Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang perekonomian</b>	<b>678.713.150</b>		√	
18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian	78.377.000	18.1	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian	78,377,000	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsisten si		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
	Inflasi			Inflasi				
18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	605.736.150	18.2	Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan Keuangan	600.336.150		√	
<b>19.</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	<b>1.535.441.284</b>	<b>19.</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan Mass Media</b>	<b>1,535,441,284</b>	√		
19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	293.130.000	19.1	Pengadaan Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	293,130,000	√		
19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	1.130.564.000	19.2	Pendampingan Pimpinan ; Pengumpulan Dokumentasi Serta Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Lainnya	1,130,564,000	√		
19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	111.747.284	19.3	Ivent - Ivent Kehumasan	111,747,284	√		
<b>20.</b>	<b>Program Jaminan Sosial</b>	<b>565.955.000</b>	<b>20.</b>	<b>Program Jaminan Sosial</b>	<b>560.555.000</b>		√	
20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	565.955.000	20.1	Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran Raskin	560.555.000		√	
<b>21.</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.513.638.000</b>	<b>21.</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.548.638.000</b>		√	
21.1	Penyusunan standar satuan harga	287.800.000	21.1	Penyusunan standar satuan harga	287,800,000	√		
21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	425.450.000	21.2	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Bahan dan Upah	425,450,000	√		
21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPPRA	343.765.000	21.3	Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan APBD Melalui Sismon TEPPRA	343,765,000	√		
21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	150.000.000	21.4	Database Toponimi, Kode, Batas Wilayah, Identifikasi dan Inventarisasi Nama Unsur Toponimi	185.000.000		√	
21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan	306.623.000	21.5	Tata Kelola Administrasi Pemilihan Umum	306,623,000	√		

No.	KUA PPAS		No.	DPA		Konsistensi		Ket
	Program/Kegiatan	PPAS (Rp.)		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ya	Tidak	
	Umum (Desk Pilkada)			(Desk Pilkada)				
22.	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</b>	73.990.000	22.	Tidak Ada	Tidak Ada		√	
22.1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD	73.990.000	22.1	Tidak Ada	Tidak Ada		√	

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah alokasi anggaran yang tercantum pada PPAS 2018 belum konsisten dengan APBD tahun anggaran 2018. Masih terdapat pagu pada DPA yang lebih tinggi dari pada pagu pada PPAS dan ditemui adanya pagu anggaran pada program/kegiatan yang sudah dialokasikan dalam PPAS, tetapi tidak dianggarkan pada program/kegiatan DPA tahun anggaran 2018.

Berdasarkan konfirmasi dengan pejabat perencana Sekretariat Daerah Kabupaten Siak terkait hal diatas, diperoleh penjelasan sebagaimana pernyataan berikut :

*“Pergeseran anggaran kegiatan terjadi karena adanya penyesuaian standar satuan harga baik barang dan jasa.Pergeseran alokasi anggaran kegiatan pasti mengakibatkan pergeseran anggaran pada program.Hanya ada 1 (satu) program, Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan 1 (satu) kegiatan, kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD yang sudah ditetapkan alokasi anggarannya di PPAS tetapi tidak dianggarkan, hal ini*

*disebabkan program tersebut tidak tercantum dalam RPJMD, sehingga tidak diperbolehkan untuk dianggarkan dalam APBD”.*

#### **5.4 Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara**

##### **5.4.1 Proses Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah**

Proses perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Siak berdasarkan hasil wawancara dengan responden 1, 2, 3, dan 4 didapatkan keterangan bahwa prosesnya dimulai dari pengusulan rancangan awal renja Sekretariat Daerah, kemudian setelah melalui proses musrenbang selanjutnya dibahas pada Forum OPD yang nantinya akan menghasilkan rumusan RKPD. RKPD inilah yang akan menjadi dasar untuk penyusunan Renja Sekretariat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan PPAS dan RAPBD untuk penetapan anggaran tahunan dengan tahapan komisi dan banggar DPRD Kabupaten Siak. Keterangan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden-responden berikut ini :

Menurut responden 1 (Kasubbag Program Sekretariat Daerah) adalah sebagai berikut :

*“Proses perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Daerah dimulai dari usulan masing-masing bagian, di Sekretariat daerah ini terdapat 10 bagian, semua usulan bagian direkapitulasi sebagai satu usulan Sekretariat Daerah ke BAPPEDA”*

Pernyataan dari responden 2 (Koordinator Pokja II) adalah sebagai berikut :

*“Usulan Program/Kegiatan berupa rancangan renja Sekretariat Daerah akan kami verifikasi untuk selanjutnya dibawa dalam Forum OPD. Forum OPD ini pada dasarnya merupakan musrenbang OPD di mana setelah hasil musrenbang kecamatan, OPD terkait diminta untuk menyikapi usulan-usulan dari masyarakat tersebut dan dituangkan ke dalam renja OPD yang bisa dipakai untuk kegiatan tahun 2018 sesuai dengan skala prioritas yang ada.”*

Pernyataan dari responden 3 (Kepala BAPPEDA) adalah sebagai berikut :

*“Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang telah diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 adalah Forum Perangkat Daerah. Usulan Program/Kegiatan OPD akan dibahas secara intensif didalam forum OPD untuk mensinkronkan Program/Kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran Dewan, untuk selanjutnya akan kita tetapkan menjadi RKPD melalui peraturan bupati, RKPD inilah yang nantinya akan menjadi acuan utama bagi OPD dalam penyusunan Renja OPD dan menjadi pedoman OPD dalam menyusun RKA Perangkat Daerah”*

Menurut Responden 4 (Kepala BKD) adalah sebagai berikut :

*“Proses penganggaran dimulai dari KUA PPAS, penyusunan KUA dan PPAS didasarkan pada dokumen perencanaan RKPD yang nantinya akan dilaporkan paling lambat minggu pertama di bulan Juni. PPAS ini sebagai patokan batas maksimal anggaran kepada OPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA mereka.”*

#### **5.4.2 Kelemahan Proses Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah**

Kelemahan proses perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah yang dapat menyebabkan inkonsistensi antara dokumen tersebut, menurut responden 1 inkonsistensi terjadi dikarenakan sulitnya berkoordinasi dan peran aktif bagian Sekretariat Daerah dalam proses perencanaan yang masih kurang. Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut :

*“Kendala saya adalah sulitnya berkoordinasi dengan bagian dan kurangnya peran aktif bagian dalam proses perencanaan. Masing-masing bagian lambat menyerahkan data yang diperlukan, sampai batas waktu yang ditentukan dan data belum selesai sepenuhnya sudah diserahkan.. pada akhirnya yang belum menyelesaikan tugasnya meng- copy paste data yang lama...”*

Menurut Responden 2, kelemahan proses perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah dikarenakan sistem pelaporan Sekretariat Daerah yang sering terlambat dan kurangnya anggota pejabat perencana, serta batas waktu koreksi yang sangat terbatas.

*“Adanya pergantian pejabat perencana, dari sisi kapasitas pejabat perencana cukup baik, namun anggota pembantu pejabat perencana yang masih kurang,..Setda ini seringkali terlambat dalam pelaporan data perencanaan yang dibutuhkan dan kewalahan dalam mengolah data, hal ini tidak bisa terlepas dari jumlah staf yang terbatas,.. Hal inilah yang terkadang mengganggu kinerja perencanaan yang sering dikejar deadline,..bukan hanya setda saja, dinas lainnya juga seperti itu, sehingga kita kurang optimal dalam mengoreksi dokumen tersebut”*

Menurut responden 3 kelemahan dalam proses perencanaan dan Penganggaran disebabkan karena kurangnya kualitas pejabat perencana dan kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.

*“Perencanaan dan penganggaran adalah proses integral yang tidak dapat dipisahkan...Ada banyak faktor yang menjadi penyebab inkonsistensi perencanaan dan penganggaran di tingkat OPD, Hambatan yang paling dominan adalah tidak ada komitmen dalam OPD dan lemahnya SDM aparatur dalam perencanaan serta kurangnya kualitas pejabat perencana, sehingga kesulitan untuk membuat perencanaan dalam waktu yang terkadang sangat singkat,..selain itu komitmen bersama kita semua untuk menyelaraskan antara perencanaan penganggaran dirasa masih kurang..”*

Sedangkan dari sisi proses penganggaran responden 4 menyatakan sebagai berikut :

*“Integrasi eplaning ke soffit masih membutuhkan waktu yang lama dan terkadang perlu penyempurnaan, kurangnya tenaga IT yang hanya berjumlah 2 orang untuk membantu 45 OPD..waktu cetak KUA PPAS yang sangat mepet”*

#### **5.4.3 Upaya Mewujudkan Konsistensi Perencanaan dan penganggaran**

Agar perencanaan dan penganggaran terintegrasi, konsisten dan mengikat maka ada beberapa upaya yang dilakukan, sebagaimana jawaban dari beberapa responden berikut.

Menurut responden 1 seharusnya BAPPEDA berperan aktif meminta dokumen yang diperlukan, tidak hanya kepada kasubbag program, namun ikut berkoordinasi dengan kepala bagian Sekretariat Daerah.

*“ Diharapkan BAPPEDA atau Pokja juga ikut mendesak kepala bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran ini, dokumen yang diperlukan, karena kasubbag program adalah pejabat eselon IV, sedangkan Kepala bagian adalah pejabat eselon III.”*

Menurut responden 2 untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang konsisten maka perlu diadakan pelatihan untuk pejabat perencana, serta penambahan anggota pejabat perencana.

*“sebaiknya diadakan pelatihan untuk pejabat perencana untuk meningkatkan kualitas pemahaman,..juga perlu penambahan jumlah anggota,..rentang waktu pembahasan dengan penetapan APBD jangan terlalu singkat, sudah pembahasan sampai dini hari, ketok palu nya besok siang nya..kapan kami ada waktu mengoreksi..”*

Ditambahkan juga oleh responden 2 :

*“semestinya ada memory serah terima jabatan, apa-apa yang telah dirumuskan oleh pejabat lama diserahkan kepada pejabat yang baru sehingga pejabat yang baru sudah tahu apa saja langkah-langkah harus dilakukan kedepannya, jadi pejabat yang baru tinggal meneruskan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh pejabat sebelumnya”.*

Menurut responden 3 bahwa untuk mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, tentunya pihak-pihak terlibat langsung

dalam proses penyusunan rancangan anggaran benar-benar harus memahami dan mempedomani dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD dan RKPD.

*“Tentunya kita harus mengingatkan kembali pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan penganggaran agar tetap mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yaitu RPJMD dan RKPD maka perencanaan dan penganggaran kita tentunya konsisten”.*

Disebutkan pula bahwa mewujudkan konsistensi sudah seharusnya pada awal penyusunan Renstra dirapatkan dengan melibatkan semua kepala bagian di Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, sehingga Renstra yang disusun telah memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan dan tidak akan dirubah lagi.

Menurut responden 4 menyarankan dilakukannya rapat percepatan anggaran.

*“Hal yang perlu diperhatikan adalah program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah,..untuk kedepannya akan kami lakukan rapat percepatan anggaran terkait penetapan estimasi target PAD dan belanja daerah.”*

## 5.5 Pembahasan Kaitan Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

Berdasarkan Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah tahun 2018 yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh analisis sebagai berikut :

1. Untuk analisis Konsistensi antara RPJMD 2016-2021 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
  - 1) Terjadi inkonsistensi terkait Tujuan dan Sasaran yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang tidak mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 Kabupaten Siak. Seharusnya dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah terkait pernyataan Tujuan dan Sasaran harus memperhatikan dokumen RPJMD sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
  - 2) Terkait program dan indikator kinerja program menurut penulis cukup konsisten, namun masih ada beberapa program yang tercantum dalam RPJMD tidak diakomodir dalam Renstra, dan masih terdapatnya perbedaan indikator kinerja tersebut. Kedua hal ini menunjukkan bahwa RPJMD terkadang tidak menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan Renstra.
2. Untuk analisis konsistensi antara RPJMD dan RKPD, terkait program menurut penulis cukup konsistensu, walaupun masih ada program yang

tercantum dalam RPJMD tidak diakomodir dalam RKPD, hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKPD terkadang tidak berlandaskan RPJMD.

3. Untuk analisis konsistensi antara RKPD dan Renja
  - 1) Terkait Program dan kegiatan, menurut penulis cukup konsisten, walaupun masih ada kegiatan yang tercantum dalam RKPD tidak diakomodir dalam Renja, hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Renja terkadang tidak berlandaskan RKPD.
  - 2) Terkait Indikator kinerja program dan kegiatan, menurut penulis kurang konsisten, hal ini terjadi dikarenakan di dalam dokumen baik RKPD maupun Renja didapati beberapa kegiatan yang tidak mempunyai indikator kinerja program dan kegiatan. Seharusnya target indikator kinerja sudah dinyatakan dengan jelas pada awal tahap perencanaan.
4. Untuk analisis konsistensi antara Renja dan PPAS
  - 1) Terkait Program dan kegiatan, menurut penulis cukup konsisten, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang tercantum dalam Renja tidak diakomodir dalam PPAS, dan terdapatnya kegiatan diluar Renja. hal ini menunjukkan bahwa penyusunan PPAS terkadang tidak berlandaskan Renja.
  - 2) Terkait Indikator kinerja program dan kegiatan, menurut penulis kurang konsisten, hal ini terjadi dikarenakan di dalam dokumen baik Renja maupun PPAS didapati beberapa kegiatan yang tidak

mempunyai indikator kinerja program dan kegiatan. Seharusnya pada tahapan ini target indikator kinerja sudah dinyatakan dengan jelas dan terukur. Penulis berpendapat untuk nomenklatur kegiatan yang tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur dilarang untuk dianggarkan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.

5. Untuk analisis konsistensi antara RKPD dan DPA

Terkait Program dan kegiatan, menurut penulis cukup konsisten, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang tercantum dalam RKPD yang tidak dianggarkan dalam DPA.

6. Untuk analisis konsistensi antara PPAS dan DPA

1) Terkait Program dan kegiatan, menurut penulis cukup konsisten, walaupun masih terdapat program dan kegiatan yang tercantum dalam PPAS tidak diakomodir dalam DPA, program dan kegiatan tersebut tidak diakomodir disebabkan karena program dimaksud tidak ada dalam program RPJMD. Seharusnya dalam penyusunan perencanaan terhadap program sudah dilakukan sejak awal proses perencanaan bukan diakhir dalam proses penganggaran untuk penetapan DPA.

2) Terkait Indikator kinerja program dan kegiatan, menurut penulis kurang konsisten, hal ini terjadi dikarenakan di dalam dokumen baik PPAS maupun DPA didapati beberapa kegiatan yang tidak mempunyai indikator kinerja program dan kegiatan. Seharusnya

pada penetapan DPA, target indikator kinerja program dan kegiatan sudah dinyatakan dengan jelas dan terukur, karena indikator kinerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, dan untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum/tidak serta untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

- 3) Terkait pagu indikatif, menurut penulis kurang konsistensi, masih terdapatnya alokasi anggaran pada DPA melebihi alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam PPAS. Seharusnya PPAS sebagai patokan batas maksimal anggaran yang kita berikan kepada OPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA sebelum disepakati dengan DPRD. Terhadap program yang tidak terdapat dalam RPJMD tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD/DPA.

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Agar berjalan baik, sebaiknya penganggaran tidak mendikte proses perencanaan, dan sebaiknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana / kemampuan keuangan daerah agar realistis.

Seperti yang dikemukakan juga oleh Pekei (2016:23) ciri-ciri perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah:

1. Punya target yang jelas.

Satu daerah dengan daerah lain mempunyai target yang berbeda yang tercantum dalam Renstra (Rencana Strategi) daerah masing-masing. Perencanaan baik apabila dari target yang dimiliki mempunyai langkah-langkah yang jelas untuk melaksanakannya.

2. Konsisten dan realistis.

Yang sering terjadi adalah berbeda antara apa yang direncanakan dengan apa yang dikerjakan sehingga pekerjaan tidak sesuai lagi dengan perencanaan yang dibuat dan disetujui bersama. Perencanaan juga harus mengukur sumber daya yang dimiliki, sehingga perencanaan yang dibuat bukanlah yang tidak mungkin dilaksanakan.

3. Mempunyai pengawasan yang kontinyu.

Dengan alur dan sistem yang jelas sehingga perencanaan akan menjadi alat kontrol yang kontinyu.

4. Jelas target fisik dan pembiayaan.

Perencanaan harus mempunyai target pencapaian apa yang dikerjakan termasuk kualitas dan persyaratan secara fisik lainnya. Disamping itu perencanaan juga jelas target anggarannya.

5. Terukur.

Sehingga dalam pelaksanaannya memudahkan menentukan indikator keberhasilannya.

6. Ada batas waktu yang jelas dari setiap pekerjaannya.

Berdasarkan ciri-ciri diatas dan hasil analisis maka perencanaan yang baik belum dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yaitu

tidak memiliki target yang jelas, kurang konsisten dan tidak terukur terkait indikator kinerja.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan konsep perencanaan yang dilaksanakan oleh pejabat perencana tersebut tidak dipahami dengan baik begitu juga komitmen pimpinan yang ada dalam melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran tersebut walaupun semua tahapan proses tersebut dilalui dan dijalankan sepenuhnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa responden.

Penulis juga mengambil pendapat yang disampaikan oleh Caiden dan Wildavsky (1974) dalam bukunya *Planning and Budgeting in Poor Countries* mengatakan bahwa di samping pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional tergantung pada kemampuan para perencana untuk merumuskan strategi, tindakan dan kebijakan yang diperlukan juga tergantung pada seberapa jauh sumberdaya yang ada diarahkan dan digunakan secara efisien dan efektif melalui anggaran pendapatan dan belanja pemerintah dan menurut mereka untuk menjaga konsistensi kebijakan atau suatu konsep/program membutuhkan sikap tegas (komitmen) untuk menjamin kebijakan itu berlangsung, yang lain sikap fleksibilitas untuk mengakomodasi antar kebijakan tersebut agar dapat berjalan.

Hasil penelitian terhadap indikator kinerja menunjukkan bahwa secara umum indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut belum memenuhi kriteria

indikator kinerja yang baik. Ini ditandai dengan adanya Tujuan dan Sasaran pada Renstra Sekretariat Daerah yang inkonsisten dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2016-2021 serta ditemuinya di setiap dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah masih adanya beberapa kegiatan yang tidak mempunyai indikator program/kegiatan.

Penulis juga mengambil pendapat yang disampaikan oleh Keban (2001) yang pernyataannya sebagai berikut: “Isi, proses dan konteks merupakan parameter yang sering digunakan untuk mengukur kualitas suatu rencana strategis. Suatu rencana dapat dianggap berkualitas baik apabila isi dari dokumen tersebut menggambarkan aspirasi dan kehendak para stake holders nya, kualitas dokumen itu juga dapat dinilai dari proses yang ditempuh atau metode yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada”.

Sinkronisasi antara indikator kinerja program dan kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan sehingga perencanaan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai target-target pembangunan secara optimal.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari analisis konsistensi antar dokumen perencanaan terlihat bahwa :
  - 1) Pada analisis konsistensi antara RPJMD dan Renstra terlihat ketidakkonsistenan/ketidaksesuaian antara Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021.
  - 2) Pada analisis konsistensi program RPJMD dan RKPD sudah cukup konsisten, namun masih ada beberapa program yang tidak diakomodir pada RKPD Kabupaten Siak tahun 2018..
  - 3) Pada analisis konsistensi program dan kegiatan RKPD dan Renja sudah cukup konsisten, namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak masuk pada Renja Tahun 2018 atau sebaliknya ada di RKPD tapi tidak ada di Renja.
  - 4) Pada analisis konsistensi indikator kinerja antara RKPD dan Renja masih kurang konsisten, hal ini lebih dikarenakan masih didapatinya indikator kinerja program/kegiatan yang tidak terisi.

2. Dari analisis konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terlihat bahwa :
  - 1) Pada analisis konsistensi program dan kegiatan antara Renja dan PPAS cukup konsisten, namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak masuk pada PPAS atau sebaliknya ada di Renja tapi tidak ada di PPAS.
  - 2) Pada analisis konsistensi indikator kinerja antara Renja dan PPAS masih kurang konsisten, menunjukkan bahwa dari 94 kegiatan yang ada di PPAS yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan Renja sebesar 68,09% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *cukup buruk*.
  - 3) Pada analisis konsistensi program dan kegiatan antara RKPD dan DPA cukup konsisten, namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan pada DPA.
3. Dari analisis konsistensi antara dokumen penganggaran maka dapat dilihat bahwa :
  - 1) Pada analisis konsistensi program dan kegiatan antara PPAS dan DPA terlihat bahwa program dan kegiatan di DPA yang sesuai dengan PPAS sebesar 100,00%, dengan persentase sebesar ini menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*.
  - 2) Pada analisis konsistensi indikator kinerja antara PPAS dan DPA masih kurang konsisten, menunjukkan bahwa dari 21 program yang ada di DPA yang penyusunannya konsisten atau berpedoman

- dengan PPAS sebesar 52,38% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *buruk*, dan dari 93 kegiatan yang ada di DPA yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan PPAS sebesar 82,80% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *baik*.
- 3) Pada analisis konsistensi alokasi anggaran antara PPAS dan DPA masih kurang konsisten, analisa menunjukkan bahwa dari 21 program yang ada di DPA yang penyusunannya konsisten dengan PPAS sebesar 42,86% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat buruk*, dan dari 93 kegiatan yang ada di DPA yang penyusunannya konsisten dengan PPAS sebesar 96,77% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang *sangat baik*. Bahkan masih ditemui 3 (tiga) yang alokasi anggaran di DPA lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan alokasinya di PPAS.
  4. Dalam penelitian masih terdapat program dan kegiatan yang direncanakan mulai dari dokumen perencanaan RKPD sampai dengan dokumen penganggaran PPAS, padahal program tersebut tidak tercantum dalam RPJMD, hal ini menunjukkan dalam penyusunan RKPD sampai dengan PPAS tidak mengacu RPJMD, terkesan copy paste dari program kegiatan yang ada pada RKPD tahun sebelumnya.
  5. Ketidakkonsistenan/Inkonsistensi disebabkan karena :
    - 1) Kurangnya komitmen stakeholder terhadap dokumen perencanaan. dan lemahnya SDM aparatur dalam menjaga kekonsistenan perencanaan dan penganggaran,

- 2) Lemahnya kapasitas SDM aparatur dan Kurangnya kualitas dari pejabat perencanaan dan penganggaran, tercermin dari penyusunan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang tidak terisi sehingga tidak dapat diukur.
- 3) Masih adanya kelemahan dari sistem perencanaan (e-planning) dan penganggaran (sofit) yang telah ada serta belum terintegrasi secara sempurna penggunaan aplikasi yang berbeda tersebut.
- 4) Kurangnya perhatian terhadap konsistensi indikator kinerja.
- 5) Kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan serta belum adanya sanksi yang jelas apabila terjadi inkonsistensi.

## 6.2 Saran

1. Sekretaris Daerah seharusnya melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan oleh konsultan yang lebih mengarah kepada pemahaman terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Kepala Bagian Setda harus mengoptimalkan kualitas pejabat perencana dan tim perencana di Sekretariat Daerah terutama pada tiap bagian.
3. Penyerahan dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah harus lebih awal sehingga BAPPEDA mempunyai cukup waktu

untuk melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut.

4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak dan Kepala BKD Kabupaten Siak harus mengupgrade sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran (*e-planning dan e-budgeting*) agar terintegrasi optimal dan seharusnya mengunci program yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD serta PPAS. Kemudian didalam sistem tersebut dapat memberikan tanda-tanda khusus pada kegiatan ketika indikator kinerjanya tidak terisi atau berbeda dari dokumen perencanaan sebelumnya.
5. Perlunya komitmen bersama antara eksekutif dan DPRD Kabupaten Siak untuk taat terhadap peraturan perundangan di bidang perencanaan dan penganggaran daerah.
6. TAPD dan POKJA harus konsisten untuk meneliti kesesuaian antara semua dokumen perencanaan dan penganggaran.
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak perlu mengisi kekosongan pejabat fungsional perencana di BAPPEDA Kabupaten Siak dengan salah satu tugas untuk menelaah kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran.
8. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian sinkronisasi Indikator Kinerja dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Siak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. (1989). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta

Rauf, Rahyunir (2018) *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)*. Zanafa Publishing. Pekanbaru

Sugiyono (2003), *Statistika untuk Penelitian*, CV. Alfabeta. Bandung

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta

Terry, George. R. (1960) *The Principles of Management*, Third Edition Homewood Illinois: Richard Irwin

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho F. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Gramedia/Elexmedia Komputindo. Jakarta

### JURNAL, MAKALAH DAN TESIS

Agus Sugiarto, Dyah Mutiarin (2017). *Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Daerah*. *Journal of Governance and Public Policy* Vol. 4 No. 1 Februari 2017.

Australia Indonesia Partnership, *Perencanaan Pengeluaran dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Pada Direktorat Jenderal Bina Marga-Indonesia Infrastructure Initiative*, Kementerian PU, Jakarta Maret 2010

Caiden and Wildavsky (1974). *Planning and Budgeting in Poor Countries* Google Books. [www.google.com](http://www.google.com)

Conyers, Diana & Hill, Peter. (1984). *An Introduction to Development Planning In The Third World*. The Pitman Press Ltd Bath. Avon, Scotland

Deputi IV BPKP.(2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. BPKP. Jakarta

Diana Novita Rambu Bangi Ata (2015). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumba Timur. Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Universitas Terbuka.

Elitrisiana Modesianne R.Y(2018) Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Pembangunan Daerah Volume IV Edisi Tahun 2018.

Ferdinandus Diri Burin, Candra Fajri Ananda, David Kaluge (2015). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 6 No. 2 Bulan Juli Tahun 2015.

Hogye, Mihaly. *Theoretical Approaches to Public Budgeting*

Meri Darlina, Yannizar, Siti Hodijah (2016). Analisis Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4, April-Juni 2016

Meldayeni (2011), Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2007-2010, Universitas Andalas

Octavianti, Rini, (2008). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan. Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas, tidak dipublikasikan

Ramadhiani Fitry (2012). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau tahun 2010. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

Saifuddin. (2008). Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Puskesmas Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2007. Tesis Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi

Administra Kebijakan Kesehatan. Program Pascasarjana  
Universitas Diponegoro. Semarang

Sri Endang Mulyati (2010), Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Sumardi (2010), Keterkaitan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah, *Journal of Rural and Development* Volume 1 No. 1 Februari 2010, FE Universitas Sebelas Maret

Wahyuningsih, Rutiana D., (2007). Responsibilitas Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah, LGSP

World Bank (2010), *Modul Pelatihan MKPP + SKPD Propinsi NTT*, Peac Program World Bank

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)

Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak tahun 2016 Nomor 12)

Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2018

Peraturan Bupati Nomor 9 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Siak